



UNIVERSITAS INDONESIA

**FAKTOR – FAKTOR EKONOMI MAKRO YANG
MEMPENGARUHI INVESTASI ASING LANGSUNG (FDI)
PADA SEKTOR PERKEBUNAN DI INDONESIA
PERIODE (Tahun 1980 – 2007)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ekonomi**

**Nama: Henny Maria Anastasia
NPM: 0706180685**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER DAN PERENCANAAN
KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN INFRASTRUKTUR
JAKARTA, DESEMBER 2010**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, Januari 2011



(Henny Maria Anastasia)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Henny Maria Anastasia

NPM : 0706180685

Tanda Tangan 

Tanggal : 4 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Henny Maria Anastasia

NPM : 0706180685

Program Studi : Magister dan Perencanaan Kebijakan Publik

Judul Tesis : Faktor – faktor Ekonomi Makro yang Mempengaruhi
Investasi Asing Langsung (*FDI*) Pada Sektor
Perkebunan di Indonesia Periode (1980–2007)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima
sebagai
bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister
pada Program Studi Managemen dan Perencanaan Kebijakan Publik
Fakultas Ekonomi , Universitas Indonesia.**

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Sulastrri Surono, Ph.D (.....)

Penguji : Dr. Mahyus Ekananda (.....)

Penguji : Dr. Ir. Widyono Soetjipto (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 13 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang selama ini telah memberikan rahmat dan karunianya yang tak terbatas selama saya kuliah sampai menyelesaikan tugas akhir ini sehingga saya mampu menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai persyaratan kelulusan pada Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik (MPKP) di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Penulis menyadari begitu banyak dukungan, motivasi, bantuan baik moril maupun materi serta harapan dari berbagai pihak agar kuliah dan tugas tesis ini dapat saya selesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor, Dekan, dan segenap Civitas Akademika Universitas Indonesia.
2. Arindra A. Zainal, Ph.D selaku Ketua Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FE,UI
3. Ibu Prof. Sulastri Surono S.E., M.Sc., Ph.D. dan Dr. Mahyus Ekananda selaku pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Para Dosen, Sekretariat dan karyawan MPKP , FE, UI yang telah berkenan memberikan ilmu dan pengetahuannya dan tidak bosan membina dan memotivasi saya sebagai mahasiswa FE,UI
5. Kepala BPS, BKPM, Gubernur B I beserta jajarannya yang telah membantu memberikan berbagai informasi dan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.
6. Ibu, suami SY.Sagino dan sekaligus pelindung, pembimbing dan motivator saya yang sudah sabar menemani saya dalam suka dan duka, adik-adik Ivonne, Theresia, Devin dan anak-anak Caesar, Vanessa, Victoria yang telah memberikan toleransinya dan support selama saya menjalani perkuliahan yang begitu banyak menyita waktu mereka.
7. Romo Yulius dan Kelompok Orang Muda Katolik Keuskupan Agung Makassar yang selalu memberikan doa dan semangat muda untuk selalu belajar dan bekerja dalam Tuhan.
8. Staff dan Karyawan The Secrets Spa di Makassar dan Jakarta yang telah memberikan bantuan dan kerjasama yang baik selama saya menyelesaikan kuliah saya.
9. Semua teman seperjuangan diangkatan XVII dan XVIII,MPKP ,FE,UI yang telah membantu saya menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan dalam

menempuh proses pembelajaran di FE,UI dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak agar tesis ini bisa sesuai dan bermanfaat.

Terimakasih.

Jakarta, 13 Januari 2011

Hormat Saya

Penulis.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henny Maria Anastasia
NPM : NPM : 0706180685
Program Studi : Magister dan Perencanaan Kebijakan Publik
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


Faktor – faktor Ekonomi Makro yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung (*FDI*) Pada Sektor Perkebunan di Indonesia Periode (1980–2007)

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Januari 2011

Yang menyatakan:


Henny Maria Anastasia
NPM: 0706180685

ABSTRAK

Nama : Henny Maria Anastasia
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Faktor – faktor Ekonomi Makro yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung (FDI) Pada Sektor Perkebunan di Indonesia Periode (1980–2007)

Tesis ini membahas tentang Faktor – faktor Ekonomi Makro yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung (FDI) Pada Sektor Perkebunan di Indonesia Periode (1980–2007). Perumusan masalahnya adalah 1) faktor – faktor ekonomi makro yang mempengaruhi investasi asing langsung (*FDI*) pada sektor perkebunan di Indonesia periode (tahun 1980 – 2007), 2) sejauh mana faktor-faktor ekonomi makro tersebut mempengaruhi *FDI* di sektor perkebunan di Indonesia pada tahun 1980- 2007.

Untuk menjawab pertanyaan dan perumusan masalah tersebut diatas maka digunakan metode penelitian literatur review dan analisis data. Analisis *Co-Integration*, digunakan untuk mengetahui faktor-faktor ekonomi makro yang mempengaruhi *FDI* di Indonesia dan apakah factor-faktor tersebut saling berkointegrasi dalam jangka panjang. Pengujiannya dilakukan dengan pengujian *Unit root* untuk menguji stasionaris data dan pengujian *Co-Integrasi* Engle dan Granger (1987).

Berdasarkan hasil literature review dan hasil analisis data maka disimpulkan data stasioner pada bentuk first differentnya, variabel bebas dan tidak bebas dalam persamaan regresi kointegrasi memiliki hubungan jangka panjang (*long-run relationship*) yaitu bahwa bahwa data time series (dari variabel) yang menyimpang dari rata-ratanya dalam jangka pendek (*short run*), akan bergerak bersama-sama dan saling menyesuaikan menuju kondisi keseimbangan (mendekati mean) dalam jangka panjang (*long run*). Nilai *R-squared* sebesar 0,81 menunjukkan bahwa 81 % keragaman variabel *FDI* mampu dijelaskan oleh variabel bebas dalam model, sementara 19 % sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai *Prob(F-statistic)* sebesar 0,000003 menunjukkan bahwa secara bersama-sama semua variabel bebas dalam model mempengaruhi variabel *FDI*. Nilai *t-statistic* pada semua variabel bebas menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas mempengaruhi variabel *FDI* pada taraf nyata 10 persen, kecuali variabel Konstanta, *FINR* dan *LERUS* tidak signifikan. Faktor-faktor ekonomi makro yang mempengaruhi *FDI* di Indonesia yaitu : 1) *GDP* dimana jika nilai *GDP* meningkat sebesar 1 persen maka akan meningkatkan *FDI* sebesar 1.95 persen. 2) *DINR* Jika suku bunga naik sebesar 1 persen maka akan menurunkan *FDI* sebesar 0.039 % .3) Harga Konsumen (*LCINP*), Jika harga konsumen meningkat sebesar 1 persen maka akan meningkatkan *FDI* sebesar 0.747 % . 5) Krisis, jika terjadi krisis di Indonesia maka *FDI* akan turun sebesar 2.070 % . Hal ini berarti hasil dari regresi bermanfaat.

Kata kunci: *Foreign Direct Investment (FDI), Co-Integration, Unit-Root, Crisis*

ABSTRAC

Name : Henny Maria Anastasia
Study Program: Master of Planning Public Policy
Title : Macro Economic factors Affecting Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia in Plantation Period (1980-2007)

This thesis discusses the Macro Economic factors Affecting the Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia's Plantation Period (1980-2007). Formulation of the problem is that 1) Macroeconomic factors that affect foreign direct investment (FDI) in the plantation sector in Indonesia, the period (1980 - 2007), 2) How the macroeconomic factors that affect FDI in plantation sector in Indonesia in 1980 to 2007.

To answer the question and formulating the problems mentioned above we used the literature review of research methods and data analysis. Analysis of Co-Integration, is used to determine the macro economic factors that affect FDI in Indonesia and whether these factors has Co-Integration in mutual long term. The test is done by testing for unit root test and the test data stasionaris Co-Integration Engle and Granger (1987).

Based on a literature review and results of data analysis, we conclude stationary data in the form of a first differentnya, independent and dependent variables in the cointegration regression equation has a long term relationship (long-run relationship) is that the time series data (of variable) that deviate from the average -rating in the short term (short run), will move together and mutually adjust to the conditions of equilibrium (near the mean) in the long run (long run). R-squared value of 0.81 indicates that 81% of FDI variable diversity can be explained by independent variables in the model, while 19 % were explained by other variables outside the model. Value Prob (F-statistic) of 0.000003 indicates that together all independent variables in the model affect the FDI variable. The value of t-statitic on all independent variables showed that each independent variable affects the variable FDI in signifikan level of 10 percent, except for variable constants, FINR and LERUS not significant. Macro economic factors that affect FDI in Indonesia was: 1) GDP, if the value of GDP where rise by 1 percent it will increase FDI by 1.95 percent. 2) DINR If interest rates rise by 1 percent it will lower the FDI amounted to 0.039 % .3) Consumer Index Prices (LCINP), if consumer prices rise by 1 percent it will increase FDI by 0.747%. 5) Crisis, if the crisis in Indonesia, then FDI will decrease by 2.070%. This means that the results of the regression is useful.

Keywords: Foreign Direct Investment (FDI), Co-Integration, Unit-Root, Crisis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih.....	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk Kepentingan Akademis	vi
Abstrak/Abstract	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel,	xii
Daftar Gambar,	xiii
Daftar Lampiran	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	11
1.3. Perumusan Hypotesa	14
1.4. Tujuan Penelitian	15
1.5. Manfaat Penelitian	15
1.6. Kerangka Pemikiran	16
1.7. Metodologi Penelitian	17
1.8. Jenis dan Sumber Data	19
1.9. Sistematika Penulisan	19
2. TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1. FDI dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi FDI	22
2.2. Faktor-faktor non ekonomi di Indonesia yang mempengaruhi FDI	25
2.2.1. Resiko Politik dan Birokrasi Pemerintah	25
2.2.2. Iklim Investasi	28
2.2.3. Kebijakan Investasi Asing (FDI Policy) di Indonesia	32
2.3. Faktor-Faktor Ekonomi Makro yang Mempengaruhi FDI	41
2.4. Pertumbuhan Ekonomi (GDP).....	50
3. METODE PENELITIAN	53
3.1. Pendekatan /Desain Penelitian	53
3.2. Perumusan Model Persamaan Faktor-Faktor Penentu FDI	53
3.3. Jenis dan Sumber Data	54
3.4. Penentuan Variabel dan Definisi Operasional Variabel	54
3.5. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	54
3.6. Metode Analisis Data	55
3.6.1. Model Estimasi Ekonometrika	55
3.6.2. Uji Stasionaris Data (Uji Unit Root)	55

3.6.3. Uji Co-Integration Data	58
4. FDI DAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN DI INDONESIA	61
4.1. RPJP Pemerintah Indonesia di sektor perkebunan	61
4.2. Peluang Investasi dan Isu Kebijakan Pemerintah di Bidang Investasi Menghadapi Krisis Global	63
4.2.1. Dampak Kenaikan Pajak Eksport	65
4.2.2. Efektifitas Mendorong Pertumbuhan Hilir	67
4.3. Sasaran Pembangunan di sektor Perkebunan dalam Pemerintahan SBY tahun 2010	69
5. HASIL DAN PEMBAHASAN	73
5.1. Perkembangan Investasi Asing (FDI) di Indonesia di Sektor Perkebunan tahun 1980 – 2007	73
5.1.1. Hasil Estimasi Model Ekonometrika	75
5.1.2. Analisa Regresi Co-Integration	75
5.1.3. Pengujian Stasioneritas (<i>Unit Root</i>)	76
5.1.4. Model Regresi Co-Integrasi	81
5.1.5. Hasil Model Regresi Co-Integration Terpilih	81
5.2. Pembahasan Hasil Model Regresi Co-Integration Terpilih	85
6. KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI	88
6. 1. Kesimpulan	88
6.2. Saran dan Rekomendasi	89
LAMPIRAN – LAMPIRAN	91
DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1. Dampak Kenaikan Pajak Ekspor Perkebunan terhadap Beberapa Aspek Industri Perkebunan
- Tabel 5.1. Perkembangan Investasi Asing Langsung (FDI) sector perkebunan di Indonesia. (juta US \$)
- Tabel 5.2. Hasil Uji Stasioneritas Data *Level*
- Tabel 5.3. Hasil Uji Stasioneritas Residual
- Tabel 5.4. Hasil Persamaan Model Faktor-Faktor Penentu FDI
- Tabel 5.5. Matriks Korelasi Persamaan Model Faktor-Faktor Penentu FDI
- Tabel 5.6. Rangkuman Hasil estimasi
- Tabel.2.1. Lokasi yang Paling Disukai oleh Top 100 TNC
- Tabel 2.2 : Peringkat Indonesia mengenai Perlindungan Bisnis oleh Polisi versi WEF 2007
- Tabel 2.3 : Beberapa UU/Peraturan yang Berpengaruh terhadap Efektivitas UU PM No.25, 2007
- Tabel 2.4. Peran Dan Kontribusi Investasi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1. Perbandingan Grafik Pertumbuhan FDI (US \$ juta) dan PDB (%) Tahun 2002- 2008
- Gambar 1.2. Perkembangan Realisasi Investasi di Indonesia 1990- 2008 (US\$ Juta/Million/PMA dan Milliar Rupiah Untuk PMDN)
- Gambar 2.1 Pertumbuhan Arus Masuk Net FDI ke Indonesia, 1984 – 2008 (sebagai % PDB)
- Gambar 2.2. Matriks dari Kinerja dan Potensi Arus Masuk FDI, 2004*
- Gambar 2.3. Kualitas Infrastructure (rangking)
- Gambar 2.4. Masalah-masalah utama dalam melakukan bisnis di Indonesia, (%)
- Gambar 2.5. Perkembangan Investasi Asing Langsung (FDI) di Indonesia, 1990 – 2008 (dalam juta US \$)
- Gambar 2.6. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Realisasi Investasi Asing Langsung (FDI) Periode 2002 - 2008 (dalam juta US \$)
- Gambar 4.1 . Jumlah Luas Tanaman Perkebunan 5 Besar tahun 2003-2007 (dalam 000 hektar)
- Gambar 4.2. Ekspor 5 hasil Perkebunan di Indonesia (dalam nilai FOB 000 \$ US) 2003 – 2007
- Gambar 5.1. FDI di Sektor Perkebunan di Indonesia (juta US \$)
- Gambar 5.2 Perilaku Data Pada Level
- Gambar 5.3 Perilaku Data Pada *Firt Difference*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Unit Root test Data Level ADF Test	91
Lampiran 2. Unit Root test Data Level PP test.....	92
Lampiran 3. Unit Root test First Difference ADF Test	99
Lampiran 4. Unit Root test First Difference PP test.....	100
Lampiran 5. Uji Kointegrasi ADF Engle Granger (1987)	107
Lampiran 6. Actual, Fitted, Residual.....	108
Lampiran 7. Unit Root Test	109
Lampiran 8. Uji Autokorelasi	110
Lampiran 9. Uji Heterolelastisitas	111
Lampiran 10. Uji Multikolinieritas	112
Lampiran 11. Data tesis FDI di sektor perkebunan di Indonesia tahun 1980 sampai dengan tahun 2007	113
Lampiran 12. Data tesis FDI di sektor perkebunan di Indonesia tahun 1980 sampai dengan tahun 2007 dalam logaritma	114



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II menyusun RKP 2010 (Rencana Kerja Pemerintah 2010, Sekneg, 2009) yang akan dijalankan oleh Pemerintahan hasil Pemilu Presiden tahun 2009. Pemerintah telah menetapkan temanya yaitu pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat. Prioritasnya berturut-turut sebagai berikut :

1. Pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
3. Pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing yang didukung oleh pembangunan perkebunan, infrastruktur, dan energi.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.

Perekonomian Indonesia diperkirakan akan mengalami pertumbuhan paling cepat di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2010. Pertumbuhan ini didorong oleh tingginya harga-harga komoditas perkebunan yang menopang pendapatan masyarakat pedesaan dan suksesnya pemilu presiden yang berdampak terhadap pulihnya daya beli masyarakat dan investasi di dalam negeri. Indonesia berhasil menghindari resesi yang telah memukul ekonomi di banyak negara Asia tahun ini. Pasalnya, perekonomian Indonesia lebih banyak digerakkan oleh permintaan domestik daripada ekspornya. Investasi dan ekspor bakal jadi pendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2010 yang diperkirakan mencapai 5,5 persen. Tren penurunan suku bunga kredit, ekspansi usaha sektor riil, dan pemulihan ekonomi global merupakan faktor- faktor pemicu pertumbuhan investasi dan ekspor.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berharap bisa membuat laju pertumbuhan

ekonomi mencapai lebih dari 5 persen pada tahun 2010 dan lebih cepat lagi pada tahun-tahun berikutnya. Menurut Wang Leong Ho, ekonom senior dari Barclays Capital di Singapura, melambungnya harga-harga komoditas di sektor perkebunan dan pertambangan Indonesia memberikan nilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. "Menguatnya harga-harga komoditas memberi keuntungan bagi industri pertambangan dan perkebunan skala kecil," tutur Wang. Indeks kepercayaan konsumen Indonesia pun pada bulan Juli lalu melompat naik sampai pada titik tertingginya. Tertinggi sejak Desember 2004, waktu SBY pertama kali menduduki jabatan presidennya.

Tahun 2010 pertumbuhan kredit akan lebih tinggi dibandingkan tahun ini namun tidak akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2008," ujar Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Halim Alamsyah, saat Seminar Prospek Industri Keuangan dan Perbankan Tahun 2010, di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Jakarta, Senin (30/11). "Tahun 2010, kami melihat revival atau kebangkitan sektor investasi. Sektor investasi kemungkinan akan tumbuh sekitar 7%-9% tahun depan dan ini akan baik bagi ekonomi kita," ujar Halim. Ia juga mengatakan, sektor ekspor dan impor akan lebih baik seiring kondisi global baik. "Dengan ini maka pola pertumbuhan ekonomi kita akan menjadi seimbang dibandingkan dengan tahun 2009," tuturnya. (Kompas.com).

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Laju pertumbuhan ekonomi suatu Negara sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi. Salah satu faktor produksi yang mempengaruhi laju pertumbuhan pembangunan di Indonesia adalah sumber dana jangka panjang untuk investasi (*capital stock*). Kebutuhan dana yang besar tersebut terjadi karena adanya upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara maju, baik di kawasan regional maupun kawasan global. Indonesia masih belum mampu menyediakan dana pembangunan tersebut. Akumulasi modal (*capital stock*) biasanya digunakan untuk menjalankan perekonomian dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam perekonomian yang terbuka, sumber pembiayaan pembangunan

tidak hanya tergantung pada faktor domestik saja, tetapi dapat bersumber dari luar negeri. Disamping berupaya menggali sumber pembiayaan dalam negeri, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri, salah satunya adalah Penanaman Modal Asing Langsung (*foreign direct investment=FDI*). Hal ini dibutuhkan karena dana dari dalam negeri tidak mencukupi untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara maksimal (*full employment*).

Apakah kehadiran investasi asing, khususnya investasi langsung, umum disebut Penanaman Modal Asing (PMA) atau *Foreign Direct Investment* (FDI) di suatu negara menguntungkan negara tersebut, khususnya dalam hal pembangunan dan pertumbuhan ekonomi? Banyak bukti empiris seperti pengalaman-pengalaman di Korea Selatan, Malaysia, Thailand, China, dan banyak lagi negara lainnya yang menunjukkan bahwa kehadiran PMA memberi banyak hal positif terhadap perekonomian dari negara tuan rumah. Persatuan Bangsa-Bangsa memperkirakan aliran investasi asing langsung (FDI) dunia akan stabil tahun 2010 dan meningkat pada 2011-2012 karena penggabungan (merger) lintas batas oleh perusahaan multinasional yang terangkat oleh tumbuhnya kepercayaan bisnis."FDI, tempat banyak negara berkembang bergantung untuk membiayai perekonomian mereka, akan meningkat menjadi 1,3-1,5 triliun dollar AS pada tahun 2011 dan 1,6-2,0 triliun dollar AS pada tahun 2012 dari 1,2 dollar AS tahun ini," kata Badan Urusan Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD).

Literatur teori juga memberi argumen yang kuat bahwa ada suatu korelasi positif antara FDI dan pertumbuhan ekonomi di negara penerima. Dalam Laporan pada ADB Hiro Lee dari Research Institute for Economics and Business Administration, Kobe University mencontohkan Borenztein (1998) yang menguji pengaruh FDI terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan menggunakan data FDI yang berikan oleh negara-negara industri kepada beberapa negara berkembang. Hasilnya menyatakan bahwa FDI merupakan kendaraan yang penting untuk mentransfer teknologi, dan FDI memberi kontribusi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan PMDN. Ada juga indikasi bahwa FDI memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi

dampak ini sangat tergantung pada persediaan sumberdaya manusia dalam ekonomi negara penerima. Dalam era globalisasi ekonomi dunia dan persaingan yang semakin ketat tidak hanya dalam perdagangan namun juga dalam investasi internasional saat ini, apakah Indonesia masih menarik bagi investasi asing? Atau apa daya tarik Indonesia relatif dibandingkan negara-negara lain untuk menarik investasi asing masuk dan membantu Indonesia menghadapi krisis global?

Saat ini sudah terdapat banyak studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung (foreign direct investment atau FDI). Namun demikian metodologi yang digunakan dan hasil studi masih sangat bervariasi. (UNCTAD 2008). Balasubramanyam et al. (1999) dalam ADB report (2004) menguji empat hipotesa FDI dan kontribusinya terhadap pertumbuhan dan hasilnya bahwa i) FDI dapat mendorong pertumbuhan dalam perdagangan liberal, ii) tingkat ambang endowment sumberdaya manusia diperlukan untuk mempromosikan pertumbuhan melalui FDI, iii) pemanfaatan efektif sumber daya manusia dalam hubungannya dengan FDI memerlukan pasar domestik untuk barang produksi, iv) teknologi dan keterampilan imbas dari FDI tidak hanya terwujud dengan adanya FDI tetapi dengan lingkungan yang kompetitif.

Meskipun faktor-faktor yang dianggap tetap (*ceteris paribus*) pengaruhnya sangat kuat, seperti variabel makro ekonomi yaitu pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tetapi masih juga terdapat kesimpulan yang berbeda dan menimbulkan berbagai perdebatan. FDI menjadi salah satu sumber pembiayaan (modal) yang penting bagi negara berkembang, dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan melalui transfer asset dan manajemen, serta transfer teknologi guna mendorong perekonomian negara. (Borensztein, 1998 dalam ADB report 2004)

Investasi asing langsung (*FDI*) merupakan suatu sumber pembiayaan yang potensial. Ditengah kontroversi terhadap investasi asing langsung yang dianggap sangat kecil kontribusinya terhadap pendapatan nasional yang disebabkan banyaknya bahan baku yang masih diimport dan keuntungan yang diperoleh ditransfer keluar negeri, pada

periode Orde Baru (1965-1998) investasi asing langsung yang digunakan berasal dari pinjaman negara-negara donor dari luar negeri yang mempunyai kepentingan politis dan ekonomi dan investasi perusahaan-perusahaan asing langsung (*Foreign Direct Investment- FDI*) pada beberapa bidang industri yang mengharuskan penggunaan bahan-bahan import dari negara lain. Bahan baku import dengan mesin-mesin yang diproduksi oleh Negara-negara investor menjadikan Indonesia sebagai Negara industrialis yang hanya menyumbangkan tenaga kerja (murah) dalam industri manufaktur. Namun demikian pihak yang pro terhadap investasi asing langsung menilai bahwa kontribusi yang diberikan oleh datangnya FDI adalah terbukanya kesempatan kerja, adanya barang-barang produksi yang dihasilkan untuk ekspor dan memenuhi kebutuhan domestik, terserapnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata dari tahun 1969 s/d 1997 adalah 6,9 % dengan fluktuasi dari 6% sampai 8 % pertahun (BPS). Panayotou (1998) menjelaskan bahwa FDI lebih penting dalam menjamin kelangsungan pembangunan dibandingkan dengan aliran bantuan atau modal portofolio (surat berharga), sebab terjadinya FDI disuatu negara akan diikuti dengan *transfer of technology, know-how, management skill*, resiko usaha relatif kecil dan lebih *profitable*.

Buruknya iklim investasi di Indonesia sejak tahun 1998 memang menjadi permasalahan krusial bagi perekonomian, karena imbasnya bukan saja terhadap fundamental ekonomi, tetapi juga terhadap sektor riil serta penyerapan tenaga kerja serta distribusi pendapatan. Masalah masalah dalam negeri baik dari sosial dan politik telah menghilangkan kepercayaan investor pada pemerintah dan masyarakat Indonesia. Gerakan ormas dan partai yang dilakukan secara destruktif telah menimbulkan trauma psikis bagi para investor. Sistem pemerintahan yang rapuh dan ambivalen telah menepis kepercayaan dunia internasional terhadap bangsa ini.

Temuan JETTRO (2005) menyebutkan bahwa permasalahan utama investasi di Indonesia adalah permasalahan peningkatan upah buruh yang menempati urutan pertama dengan 84,4 %, sulit dan rumitnya masalah perpajakan dengan 72,0%, ketidakpastian dan ketidakjelasan kebijakan pemerintah sebesar 67,7%, sulit dan rumitnya perpajakan

dan prosedur perdagangan sebesar 67,6, buruknya kondisi infrastruktur sebesar 54,7 dan isu ketenaga kerjaan, demonstrasi buruh sebesar 37,0%. Angka-angka tersebut jelas menggambarkan bahwa iklim investasi di Indonesia amat buruk, sehingga menjadi wajar jika para investor enggan untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

Dalam survai pelayanan institusi publik, WEF (2005) menempatkan Indonesia pada peringkat 89 dari 117 negara, sedangkan Survei The Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC) mengenai buruknya birokrasi pada tahun 2005, Indonesia mendapat point 8,2 lebih buruk dari Vietnam yang mendapatkan point 7,63 .

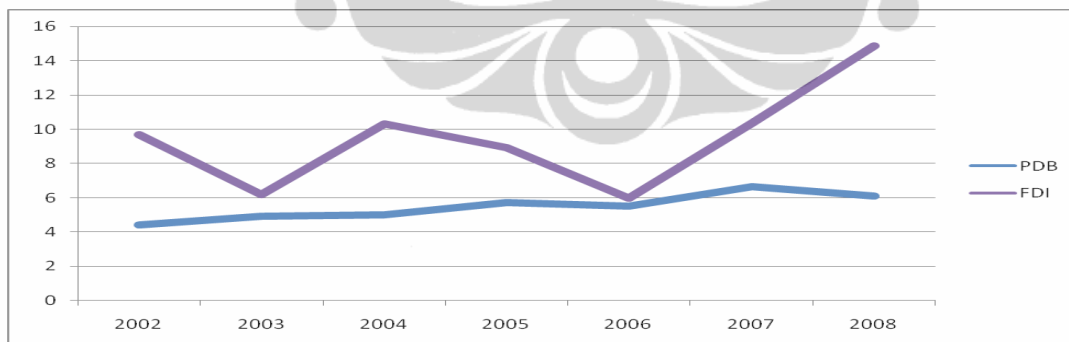
Buruknya iklim investasi asing di Indonesia saat ini sedang diperbaiki melalui peningkatan pelayanan terhadap pelaku usaha international. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap investasi asing. Pada akhir Februari tahun 2006, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan investasi. Paket kebijakan tersebut keluar dalam bentuk Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2006. Paket kebijakan ini oleh sebagian kalangan dinilai agak konkret karena terdapat suatu program, tindakan, target penyelesaian, dan penanggung jawab masing-masing program. Program tersebut antara lain meliputi kelembagaan pelayanan investasi, sinkronisasi peraturan pusat dan daerah, kepabeanan dari cukai, perpajakan, ketenagakerjaan, usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Hal yang amat menggembirakan dalam paket kebijakan ini adalah keputusan pelayanan investasi dengan mekanisme satu atap, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa : "Pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dalam Pasal 2 huruf c dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap".

Kebijakan ini dilanjutkan dan lebih ditegaskan lagi dengan Undang-Undang Penanaman Modal No.25 tahun 2007 yang lebih terbuka baik dari subjek penanaman

modal asing yang semakin beragam mulai dari perorangan sampai badan hukum sampai pada keragaman jenis usaha yang bisa dilakukan oleh investor asing.

Hal ini tentunya mempunyai dampak positif dan negative bagi dunia perekonomian di Indonesia. Keluarnya paket kebijakan Inpres No.3 Tahun 2006 dan undang-undang PMA No. 25 tahun 2007 di bidang investasi tersebut diharapkan mampu mendongkrak kinerja investasi di Indonesia. Sebab, pemerintah menyadari bahwa investasi dapat diharapkan memberikan nilai bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kisaran angka 6 - 7% merupakan target pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan SBY-Budiono yang sangat optimis. Hal ini wajar, karena sebelum dilanda krisis pada 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada 7,8%. Berdasarkan data Bappenas dan BKPM untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 4,8% di tahun 2004 dibutuhkan nilai investasi Rp 479,9 triliun, pertumbuhan ekonomi 5,0% di tahun 2005 dibutuhkan investasi Rp 379,8 triliun, dan pada tahun 2006 untuk pertumbuhan ekonomi 5,5% dibutuhkan investasi Rp 471,4 triliun. Pertumbuhan ekonomi naik dari 5,5% pada tahun 2006 menjadi 6,63% pada tahun 2007, dan sedikit turun menjadi 6,1% pada 2008. Untuk tahun 2009 diproyeksikan ekonomi nasional akan tumbuh antara 4 – 4,5% dan realisasi investasi berkisar Rp.150 triliun.



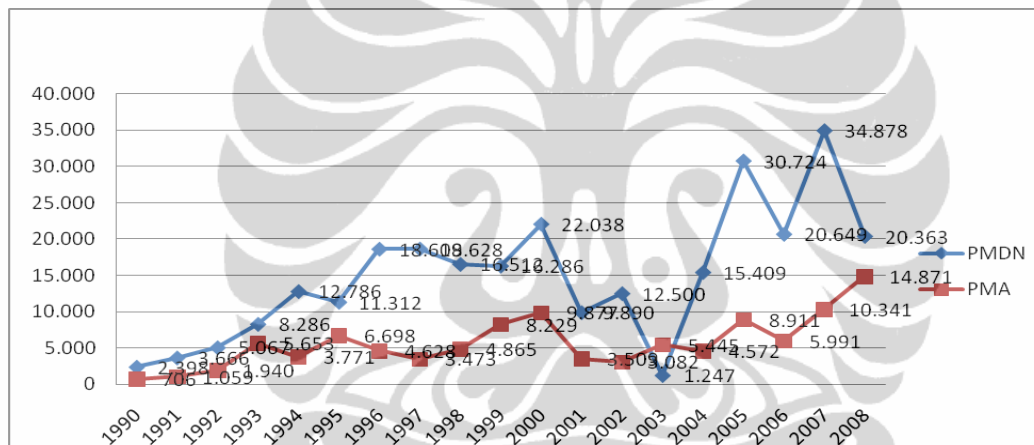
Sumber: BKPM 2009

Gambar 1.1. Perbandingan Grafik Pertumbuhan FDI (US \$ juta) dan PDB (%) Tahun 2002- 2008

Secara sepintas, dapat dilihat dari gambar 1.1 bahwa setelah kebijakan Inpres No.3 Tahun 2006 dan undang-undang PMA No. 25 tahun 2007 di bidang investasi diberlakukan PDB meningkat dari 5,5 % pada tahun 2006 menjadi 6,63 % pada tahun 2007 . Krisis ekonomi 2008 membawa dampak pada PDB yang menurun dari 6,63 % menjadi 6,1 % sedangkan investasi asing langsung (FDI) tidak menurun tetapi malah meningkat. Berbagai pertanyaan mengemuka, apakah paket kebijakan tersebut sudah cukup memberikan daya tarik investasi?. Kiranya perlu pula dikaji, bagaimana kontribusi kebijakan tersebut dalam konteks daya tarik bagi pertumbuhan kegiatan investasi di Indonesia, khususnya investasi asing. Karena bagaimanapun, kebijakan pemerintah masih memegang peranan penting bagi pertumbuhan maupun penurunan nilai investasi di Indonesia.

Kontribusi penanaman modal asing (PMA) dalam melakukan investasi di Indonesia, mencapai angka hingga 78 persen dari total realisasi investasi untuk PMA dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Sedangkan dalam rencana investasi, kontribusi PMA 61% dari total rencana investasi PMA dan PMDN. Menurut Ketua Komite Tetap KADIN Bidang Antar Daerah yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Herman Heru Suprobo, dalam rangka mendorong peningkatan peran dunia usaha dalam investasi nasional, maka proyeksi tahunan rencana ataupun realisasi PMA dan PMDN menggunakan asumsi bahwa laju pertumbuhan rata-ratanya, lebih tinggi dari laju pertumbuhan kebutuhan investasi nasional yaitu sekitar 20 persen per tahun. "Harus diakui, bahwa kontribusi PMA dalam rencana maupun realisasi investasi, lebih besar dibanding PMDN," ujar Herman seperti tertulis dalam siaran pers untuk Vivanews pada 26 November 2009. Menurut Herman, untuk mencapai target pertumbuhan 6,3-6,8 per tahun, proyeksi realisasi investasi per tahun untuk total PMA dan PMDN periode 2010-2014, diperkirakan nilainya sekitar Rp 225,5 - 253,2 triliun. Besarnya proyeksi rencana investasi per tahun untuk total PMA dan PMDN diperkirakan adalah sekitar Rp 699,1 - 784,9 triliun. Karena itu, Herman mendorong agar pemerintah

segera menyelesaikan berbagai peraturan yang tumpang tindih dan menerbitkan peraturan yang akan memberikan kenyamanan berinvestasi bagi asing sekaligus mendatangkan nilai tambah bagi negara dari investasi itu. Kalau ada anggapan investasi PMA itu merugikan negara, hal ini tidak benar karena pemerintah telah membuat rambu-rambu dan peraturan untuk memproteksi investasi Indonesia dengan baik. Bahkan dengan investasi PMA ini, justru akan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran Indonesia,” katanya. Karena itu, Herman berpendapat, pemerintah harus membuat peraturan yang memberikan daya tarik bagi asing dan juga bisa meningkatkan value added bagi pemerintah. Intinya, iklim investasi dan kebijakan pemerintah harus mendukung peningkatan investasi serta penerimaan negara.



Sumber: BKPM.2009

Gambar : 1.2. Perkembangan Realisasi Investasi di Indonesia 1990- 2008 (US\$ Juta/Million/PMA dan Milliar Rupiah Untuk PMDN)

Pemilihan jenis usaha yang tepat oleh pemerintah daerah dalam menawarkan *investasi asing langsung (FDI)* di Indonesia tidak hanya dapat memberikan tambahan dalam peningkatan pendapatan negara (pertumbuhan ekonomi Negara/daerah saja) tetapi juga dapat memberi pengaruh yang besar terhadap pemerataan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitarnya. (sesuai dengan salah satu tujuan perencanaan pembangunan PBB) . Salah satu bidang investasi yang saat ini terbuka dan mendapat perhatian investor asing adalah *investasi asing langsung (FDI)* dibidang

perkebunan. Sebab dengan meningkatnya harga komoditas (CIP) perkebunan didunia international seperti CPO dan coklat telah menimbulkan ketertarikan investor asing pada sektor perkebunan. Indonesia selain luas lahan yang sangat berpotensi ada beberapa faktor pendukung yang lain seperti buruh yang terampil dan tersedia dalam jumlah yang cukup, kebutuhan dunia akan bahan pokok hasil perkebunan yang bervariasi seperti minyak sawit, kopi, coklat dan yang lainnya sangat potensial untuk ditanam di Indonesia juga menjadi penunjang FDI di sektor perkebunan. Investasi pada bidang perkebunan yaitu terdiri dari perkebunan sebagai pemasok bahan baku serta industri- industri pengolahannya. Terbukanya peluang investasi asing (FDI) di Indonesia di bidang perkebunan juga akan membuka peluang akan usaha industri lainnya yang menggunakan bahan baku hasil perkebunan.

Pemerintah dalam RPP telah mencanangkan program revitalisasi sektor perkebunan sejak pertengahan 2006. Terdapat tiga komoditas perkebunan yang masuk dalam program revitalisasi tersebut: kelapa sawit, kakao, dan karet. Ketentuan terkait dengan program revitalisasi sektor perkebunan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perkebunan No. 33/Permentan/OT.140/7/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 117/PMK.06/2006. Bukan hanya pasar domestik yang dijadikan target market, tetapi dengan berbagai kebijakan fiskal pemerintah berusaha menarik penduduk dunia untuk dapat membeli hasil perkebunan di Indonesia. Memasuki era globalisasi pasar investasi asing di bidang perkebunan sangat dibutuhkan dalam memenuhi permintaan produk perkebunan dan hasil pengolahannya .

Pengembangan investasi di sektor perkebunan diharapkan akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, serta pengembangan wilayah pedesaan. Namun berkembangnya investasi di suatu wilayah sangat tergantung dari potensi dan kemampuan sumberdayanya seperti fasilitas infrastruktur, pendanaan, teknologi, sumberdaya manusia, dan sistem tata niaga komoditas agribisnis/agroindustri di wilayah tersebut. Selain itu, penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi perkebunan sangat diharapkan bagi

pengembangan agribisnis/agroindustri yang berkelanjutan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *UNCTAD* (2003), Indonesia mengalami arus modal yang cenderung negatif sejak tahun 1998. Yang menarik dari laporan ini adalah mengapa kemerosotan investasi asing langsung (*foreign direct investment – FDI*) yang terjadi di Indonesia tidak terjadi di negara-negara Asia lainnya yang juga mengalami krisis ekonomi yang sama (*IMF*, 2003). Perbedaan ini menjadi alasan yang kuat untuk dipercaya bahwa terdapat faktor-faktor yang menjadi masalah bagi investor asing di Indonesia yang tidak terdapat di negara Asia lainnya. Untuk itu perlu dilakukan kajian mendalam yang menganalisis faktor-faktor apakah yang secara signifikan mempengaruhi investasi asing langsung (*foreign direct investment – FDI*) khususnya pada sektor perkebunan di Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Terdapat tiga komoditas perkebunan yang masuk dalam program revitalisasi Pemerintah : kelapa sawit, kakao, dan karet sejak pertengahan 2006. Ketentuan program revitalisasi sektor perkebunan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perkebunan No. 33/Permentan/OT.140/7/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 117/PMK.06/2006. Setelah berjalan 3 tahun, pemerintah perlu melihat kembali sejauh mana implementasi atas program ini. Ketiga komoditas di atas merupakan primadona sektor perkebunan kita dan menduduki peringkat teratas dalam peta perkebunan dunia. Namun sayang, dalam perkembangannya, produksi ketiga komoditas perkebunan ini menunjukkan gejala penurunan. Penyebabnya adalah rendahnya produktivitas. Oleh karena itu, memang tepat apabila pemerintah mengadakan program revitalisasi untuk mengembalikan produktivitas ketiga komoditas perkebunan ini.

Indonesia adalah negara yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit terluas di dunia yaitu sekitar 6,2 juta hektare. Urutan kedua adalah Malaysia dengan 4,5 juta hektare. Pada 2008, total revitalisasi perkebunan membutuhkan pembiayaan investasi sebesar 12 triliun rupiah dengan sasaran luas areal 539.000 hektare. Sementara itu, total pembiayaan yang dibutuhkan sekitar Rp 40 triliun untuk masa hingga 2010 dengan

perluasan lahan sekitar 2 juta hektare. Pasalnya, sasaran dari program revitalisasi ini, tidak hanya sekadar peningkatan produksi komoditas, tetapi juga untuk peningkatan ekonomi daerah tertentu yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Negara. Terkait dengan program revitalisasi ini, sejumlah bank telah menyatakan komitmennya untuk terlibat. Saat ini terdapat sekitar 14 bank yang terlibat dalam program revitalisasi dengan total komitmen sekitar Rp. 34,3 triliun, di mana Bank BRI sebagai kontributor terbesar yakni sebesar Rp.12 triliun dan disusul Bank Mandiri Rp.11 triliun. Dengan demikian, masih ada kekurangan dana investasi sebesar Rp.7 triliun untuk dapat menutupi seluruh kebutuhan pembiayaan revitalisasi sektor perkebunan ini. (Bisnis Indonesia, 2008).

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dan masalah-masalah yang ada di Indonesia, maka permasalahan yang ditemukan adalah bahwa besarnya dana investasi yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam program revitalisasi sektor perkebunan dan pemerintah membutuhkan bantuan dana investasi apakah dari dalam negeri maupun dari investasi asing langsung (FDI). Dari dalam negeri bantuan investasi yang dibutuhkan tidak mencukupi oleh karena itu pemerintah berdaya upaya agar investasi asing langsung mau melakukan investasi di sektor perkebunan di Inonesia. Meningkatnya harga komoditas perkebunan mendorong terjadinya suplay yang membutuhkan Investasi besar-besaran di bidang perkebunan

Oleh karena itu perlunya diadakan penelitian tentang berbagai faktor ekonomi maupun non ekonomi yang dapat mempengaruhi atau membuat meningkatnya investasi asing langsung di Indonesia (FDI) dan bagaimana factor-faktor ini dapat mempengaruhi investasi asing langsung di sektor perkebunan di Indonesia. Ada 2 faktor utama yang mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia yaitu ekonomi dan non ekonomi. Hal ini seperti apa yang dikemukakan oleh para ahli seperti Sarwedi (2002) yang menggunakan beberapa variabel sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment-FDI*), faktor tersebut adalah GDP (*Gross Domestic Product*), pertumbuhan ekonomi (*growth*), upah pekerja, resiko politik dan ekspor. Dalam tesis ini permasalahan yang akan di teliti adalah factor-faktor ekonomi

yang mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia (FDI).

Selanjutnya data yang akan dijadikan sebagai obyek analisis menggunakan data sekunder berupa data *time series* tahunan, yaitu dari tahun 1980 – 2007 dari BKPM, BPS dan ADB, dan berbagai sumber yang berkompeten. Pilihan untuk menggunakan data dari tahun 1980 - 2007 ini didasari atas pertimbangan bahwa selama tahun 1980 - 2007 banyak terjadi pasang surut atas kondisi ekonomi dunia yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Indonesia terutama di sektor perkebunan.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam di atas, bahwa analisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung (*foreign direct investment* – FDI) sangat kompleks, yang melibatkan faktor-faktor di luar ilmu ekonomi, sehingga pembahasan dalam kajian ini dibatasi hanya berdasarkan pada analisis faktor ekonomi makro. Faktor ekonomi makro yang dipertimbangkan dalam kajian ini adalah: nilai ekspor, pendapatan nasional riil, kurs valuta asing, tingkat bunga kredit dalam dan luar negeri, dan tingkat harga. Dalam penelitian ini pengaruh non ekonomi tidak akan dibahas, faktor di luar ekonomi didekati dengan situasi sebelum krisis ekonomi 1998 (0) dan setelah krisis ekonomi 1998 (1) dengan menggunakan peubah *dummy*. Perumusan masalah yang akan diajukan dan coba dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor ekonomi makro apakah yang mempengaruhi investasi asing langsung (*Foreign direct investment FDI*) di sektor perkebunan di Indonesia?
2. Sejauh mana faktor-faktor ekonomi makro tersebut dapat mempengaruhi investasi langsung (*foreign direct investment FDI*) di sektor perkebunan di Indonesia ?

1.3. Perumusan Hypotesa

Dari perumusan masalah di atas dan beberapa literature review maka dapat dibuat suatu hipotesa awal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung (*FDI*) di bidang perkebunan di Indonesia

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Nilai ekspor perkebunan Indonesia (LEXF) berpengaruh pada pembentukan investasi

asing langsung (FDI) pada sektor perkebunan di Indonesia. Jika nilai ekspor perkebunan Indonesia (EXIF) meningkat maka investasi asing langsung (FDI) pada sektor perkebunan di Indonesia akan meningkat. Begitupun sebaliknya jika nilai ekspor menurun maka nilai FDI akan menurun jumlahnya .(Dornbusch *et all.*, 1995).

2. Gross Domestik Produk (LGDP) berpengaruh pada pembentukan investasi asing langsung (FDI) pada sektor perkebunan di Indonesia. Jika Gross Domestik Produk (LGDP) meningkat maka investasi asing langsung (FDI) pada sektor perkebunan di Indonesia akan meningkat. Peningkatan GDP mengidentifikasi adanya permintaan barang dan jasa yang tentunya membutuhkan investasi (Sudono , 1996)
3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (LERUS) berhubungan negatif terhadap investasi sektor industri pertanian. Penurunan nilai tukar akan mengurangi investasi melalui pengaruh negatifnya pada absorpsi domestik sehingga penurunan tingkat kurs akan menyebabkan nilai riil aset masyarakat yang disebabkan kenaikan tingkat-tingkat harga akan menyebabkan penurunan permintaan domestik masyarakat sehingga investor akan merespon dengan penurunan pengeluaran / alokasi modal pada investasi (Shikawa, 1994).
4. Tingkat suku bunga dalam negeri (DINR) berhubungan negatif terhadap investasi sektor industri perkebunan. Tingkat suku bunga mempunyai pengaruh yang signifikan pada dorongan untuk berinvestasi. Apabila terjadi penurunan tingkat suku bunga maka akan meningkatkan pembelian barang-barang modal tahan lama dimasa yang akan datang dan sebaliknya apabila tingkat suku bunga meningkat, seseorang lebih memilih untuk menabung dengan mendapati resiko usaha yang paling kecil daripada bergumul dengan resiko yang cenderung lebih besar pada dunia usaha (investasi) (Iswardono, 1994).
5. Suku bunga luar negeri (FINR) berhubungan negatif terhadap investasi di sektor industri perkebunan. Tingkat suku bunga luar negeri mempunyai pengaruh dorongan melakukan investasi . Apabila terjadi peningkatan suku bunga luar negeri maka akan meningkatkan pembelian barang-barang modal tahan lama dimasa yang akan datang dan sebaliknya apabila tingkat suku bunga meningkat, seseorang lebih memilih untuk

menabung dengan mendapati resiko usaha yang paling kecil daripada bergumul dengan resiko yang cenderung lebih besar pada dunia usaha (investasi) (Iswardono, 1994).

6. Tingkat indeks harga konsumen (LCINP) berhubungan positif terhadap investasi sektor industri perkebunan (Y) . Tingkat harga penjualan maupun laba total merupakan faktor-faktor yang menjelaskan tingkat investasi. Tingkat harga penjualan tersebut dapat mencerminkan sebagai suatu harapan-harapan mengenai output dimasa depan yang selanjutnya dapat mempengaruhi keuntungan yang tentunya mendorong investasi (Dornbusch *et all.*, 1995).
7. DKRISIS : Situasi Ekonomi Dunia digunakan dengan pengubah dummy dimana situasi sebelum krisis ekonomi tahun 1980 - 1996 (0) dan sesudah krisis tahun 1997 - 2007 (1) . Situasi Krisis menurunkan FDI sedangkan non krisis memberikan peluang investasi yang cukup baik.

1.4. Tujuan Penelitian

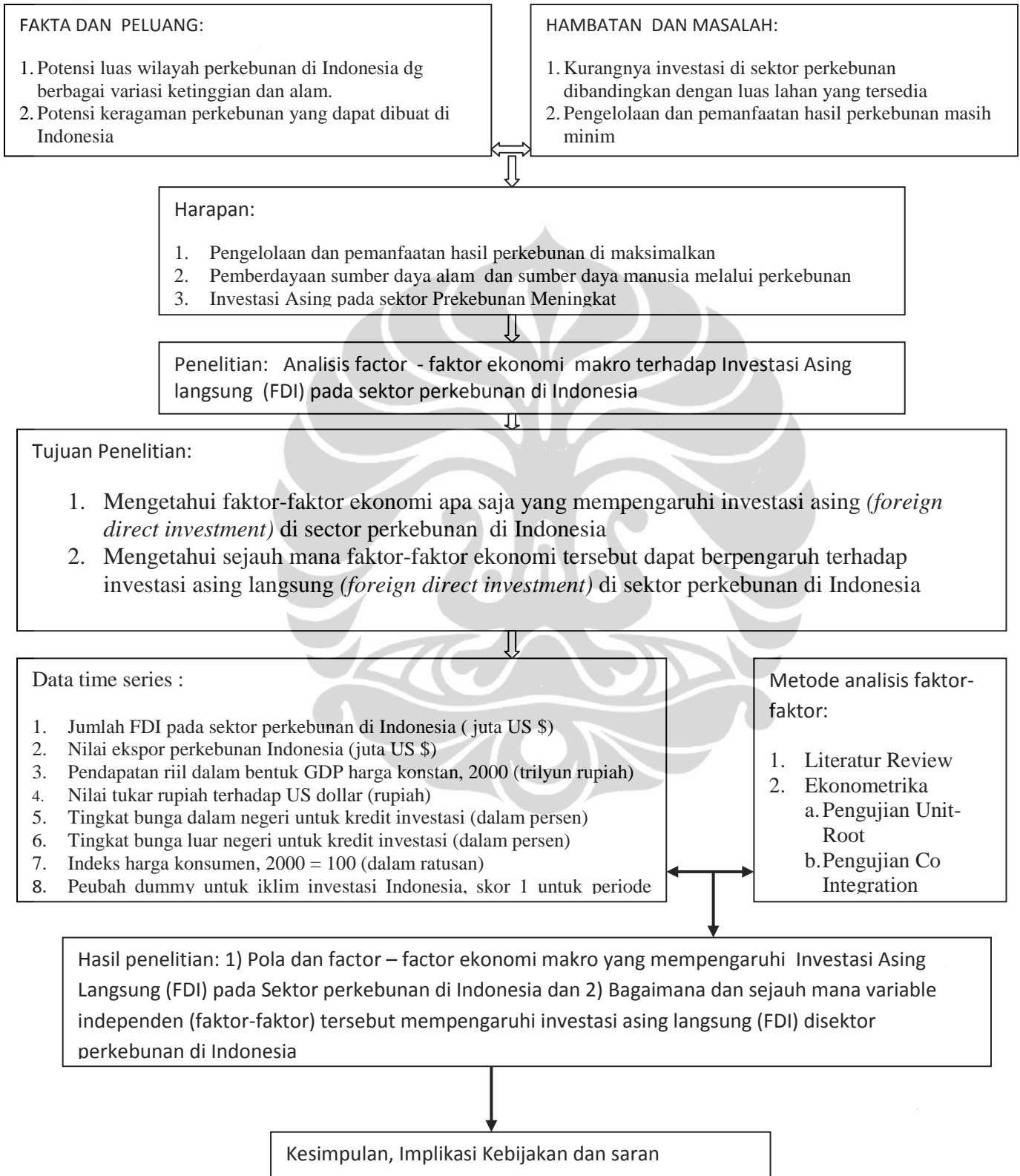
Dari hipotesa tersebut diatas maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah

1. Mengetahui apa saja faktor-faktor ekonomi makro yang mempengaruhi investasi asing langsung (*foreign direct investment FDI*) di sektor perkebunan di Indonesia.
2. Mengetahui sejauh mana faktor-faktor ekonomi tersebut dapat berpengaruh pada investasi asing langsung (*foreign direct investment /FDI*) di sektor perkebunan di Indonesia pada tahun 1980 - 2007

1.5. Manfaat Penelitian

Agar pemerintah Indonesia dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan jumlah investasi asing langsung (*foreign direct investment FDI*) di sektor perkebunan di Indonesia sehingga kebutuhan masyarakat baik untuk kebutuhan ekspor dan kebutuhan lokal akan hasil perkebunan dan hasil pengolahannya dapat dipenuhi mengingat biaya investasi di bidang perkebunan sangat besar.

1.6. KERANGKA PEMIKIRAN:



1.7. Metodologi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan pertama, digunakan literatur review sebagai analisa deduktif . Ada beberapa teori investasi yang akan dijadikan sebagai kajian pustaka dalam penelitian ini untuk melihat faktor-faktor ekonomi makro apa saja yang mempengaruhi investasi asing langsung (FDI) di sektor perkebunan di Indonesia..

Untuk menjawab permasalahan kedua, yaitu sejauh mana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap investasi asing langsung (FDI) di Indonesia dengan menggunakan berbagai data yang ada dan menggunakan beberapa teori ekonometrika. Analisis ekonometrika yang akan di gunakan adalah ; Analisis regresi Co-Integrasi,. Adapun alasan penggunaan analisis Co-Integrasi adalah karena investasi asing langsung (FDI) yang dilakukan oleh investor berdurasi jangka waktu yang lama atau jangka panjang sehingga menjadi penting untuk melihat dan mengetahui keterkaitan antar variabel independen yang mempengaruhi infestasiasing langsung tersebut dalam jangka panjang. Persamaan regresi cointegrasi yang digunakan dalam kajian ini adalah model faktor-faktor penentu FDI:

$$LFDIF_t = b_0 + b_1 LEXIF_t + b_2 LRGDP_t + b_3 LERUS_t + b_4 DINR_t + b_5 FINR_t + b_6 LCINP_t + b_7 D_t + \varepsilon_t \dots\dots\dots (1.1)$$

$LFDIF_t$ = Investasi asing langsung pada sektor perkebunan (juta US\$) dalam logaritma

$LEXIF_t$ = Nilai ekspor perkebunan Indonesia (juta US\$) dalam logaritma

$LRGDP_t$ = Pendapatan riil dalam bentuk GDP nominal (triliun rupiah) dalam logaritma

$LERUS_t$ = Nilai tukar rupiah terhadap US dollar dalam logaritma

$DINR_t$ = Tingkat bunga dalam negeri untuk kredit investasi (dalam persen)

$FINR_t$ = Tingkat bunga luar negeri untuk kredit investasi (dalam persen)

$LCINP_t$ = Indeks harga konsumen, tahun 2000 = 100 (ratusan) dalam logaritma

D_t = Peubah dummy untuk iklim investasi Indonesia, skor 0 untuk periode sebelum krisis (1980 -1996) skor 1 untuk periode krisis 1997: Q-3 – 2000: Q-1.

t = Waktu (tahun)

ε = Kesalahan pengganggu

$b_0, b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6$ dan b_7 = Konstanta

Model regresi tersebut di atas, juga pernah digunakan dan diuji oleh Eko Setiobudi (2006) dalam tesisnya menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung (FDI) pada sektor pertanian di Indonesia dan hasilnya adalah bahwa sebanyak 6 faktor ekonomi yang mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia yaitu nilai ekspor pertanian, pendapatan riil dalam bentuk GDP, nilai tukar rupiah terhadap dollar US, tingkat suku bunga dalam dan luar negeri serta indeks harga konsumen.

Adapun metode analisis data dilakukan dengan model ekonometrik dan akan dilakukan dengan :

1.7.1. *Pengujian Unit Root*

Pengujian stasioneris data dimaksudkan untuk mengetahui sifat dan kecenderungan data yang dipergunakan, apakah mempunyai pola yang stabil/normal/stasioner atau tidak, karena data-data time series dalam bidang ekonomi pada umumnya bersifat non stasioner sehingga ketika dipergunakan sebagai suatu variabel dalam regresi akan menghasilkan regresi yang palsu (*spurious regression*).

1.7.2. *Pengujian Co-integration*

Pengujian Co-integrasi diperlukan untuk mengetahui apakah dua atau lebih variabel independen berintegrasi bersama. Pengujian Co-integrasi adalah pengujian pendahuluan untuk menghindari hasil regresi yang tidak bermanfaat (*spurious regression*) dan juga dapat dianggap sebagai pengujian keseimbangan atau hubungan jangka panjang dari beberapa variabel ekonomi yang diteliti. Variabel yang berkointegrasi adalah variabel yang saling menyesuaikan diri untuk mencapai keseimbangan dalam jangka panjang. Jika dua atau lebih variabel berkointegrasi maka hasil regresi bermanfaat (Gujarati, 1995:725)

1.8. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dan informasi yang diperlukan dalam analisis ini adalah data publikasi (data sekunder) yang berkaitan dengan perkembangan investasi asing langsung (FDI) yang diperoleh dari data BKPM yaitu berdasarkan pada data realisasi investasi asing langsung pada sektor perkebunan di Indonesia, ekspor dan investasi perkebunan Indonesia serta besaran nilai-nilai peubah makro ekonomi (seperti GDP, nilai ekspor perkebunan, tingkat suku bunga, nilai tukar dan kondisi ekonomi dunia) yang diperoleh berbagai terbitan Biro Pusat Statistik (BPS) atau dari Departemen Keuangan dan Departemen Pertanian, Asian Development Bank, dan UNCTAD.

Data yang digunakan sebagai obyek penelitian adalah data time series tahunan dari tahun 1980 sampai tahun 2007 disebabkan pada jangka waktu tersebut terjadi pasang surut dalam kondisi ekonomi makro Indonesia dan peubah dummy (0) digunakan untuk membedakan data sebelum krisis tahun 1980 - 1987 dan dummy (1) untuk data setelah krisis tahun 1998 – 2007

1.9. Sistematika Penulisan

Agar penulisan tesis dapat dilakukan secara sistematis, maka akan disusun dalam dalam bab-bab sebagai berikut :

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, jenis dan sumber data serta ruang lingkup dan pembatasan masalah.

Bab 2. Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian terutama faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi besarnya investasi asing

langsung (FDI) di Indonesia. Literature Review Faktor-Faktor Ekonomi Makro Yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung Sektor Perkebunan di Indonesia (*Foreign Direct Investment-FDI*) Pada Sektor perkebunan di Indonesia . Mengetahui faktor-faktor ekonomi makro yang mempengaruhi investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment-FDI*) pada sektor perkebunan di Indonesia berdasarkan pada literatur review dan sekaligus melakukan analisa diskriptif atas faktor-faktor tersebut serta analisa perkembangan investasi asing langsung pada sektor perkebunan di Indonesia.

Bab 3. Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan bagaimana model co-integration dijalankan serta langkah-langkah estimasinya. Memaparkan Pendekatan /Desain Penelitian, Perumusan Model Persamaan, Jenis dan Sumber Data, Penentuan Variabel dan Definisi Operasional Variabel, Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data, Metode Analisis Data.

Bab 4. Pembangunan Sektor Perkebunan di Indonesia

Bab ini akan menguraikan realitas kontribusi sektor perkebunan selama ini dalam pembangunan perekonomian di Indonesia serta rencana pembangunan sektor perkebunan dalam pemerintahan SBY-Boediono dan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II selanjutnya yang tentunya akan menentukan jalan panjang sektor perkebunan ke depan. Sejarah pembangunan perkebunan dan industry pengolahannya di Indonesia yang selama ini telah dibangun baik oleh pemerintah Orde Lama dan Orde Baru serta hasilnya.

Uraian mengenai sejarah pembangunan perkebunan, penting dalam rangka melihat kecenderungan serta perkembangan sektor perkebunan di Indonesia, mengingat dalam kurun waktu beberapa dasawarsa sektor perkebunan sempat menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Peranan perkebunan dan industry pengolahannya yang diharapkan dalam perekonomian Indonesia dimasa pemerintahan SBY dan Boediono akan diuraikan dalam Bab ini mengingat perekonomian nasional, baik dari sisi kebijakan

viskal dan moneter serta kebijakan di sektor pembangunan perkebunan, akan menentukan kemajuan dan kontribusinya berupa nilai ekspor hasil-hasil perkebunan, terbukanya lapangan kerja bagi SDM atau penyerapan sumber daya manusia dan upah tenaga kerja di sektor perkebunan .

Bab 5. Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan memaparkan tentang pembahasan masalah serta menguraikan hasil-hasil penelitian berdasarkan pada metodologi yang telah diuraikan dalam bab I. Pola dan faktor-faktor ekonomi makro yang mempengaruhi Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment-FDI*) Pada Sektor Perkebunan di Indonesia. Mengetahui dan menentukan faktor-faktor mana saja dari beberapa faktor yang ada dalam literatur review, pola, bagaimana dan sejauh mana variable independen mempengaruhi mempengaruhi FDI pada sektor perkebunan, berdasarkan pada analisa regresi Co-Integration.

Bab 6. Kesimpulan, Saran dan Rekomendasi

Bab ini akan membahas tentang kesimpulan penelitian, implikasi hasil penelitian terhadap kebijakan serta saran/rekomendasi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. FDI (Foreign Direct Investment) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi FDI.

Apakah FDI itu? Mengapa FDI penting bagi sebuah negara? Menurut Harrod-Domar salah satu faktor yang sangat menentukan proses pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang pesat maka setiap negara harus menabung dan menginvestasikannya sebanyak mungkin dari GNPnya (Todaro, 2000). Rostow (Todaro, 2000) berkeyakinan bahwa langkah utama atau kunci untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan adalah peningkatan modal tabungan nasional dan investasi. Investasi mempunyai dua fungsi ganda yaitu dapat menambah penciptaan pendapatan dan dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian. Jadi kesimpulannya salah satu faktor yang berperan dalam siklus ekonomi dan mampu mendorong majunya pertumbuhan ekonomi adalah Investasi.

Biasanya, FDI terkait dengan investasi aset-aset produktif, misalnya pembelian atau pembangunan konstruksi sebuah pabrik, pembelian tanah, perkebunan dan pertanian, peralatan atau bangunan; atau konstruksi peralatan atau bangunan yang baru yang dilakukan oleh perusahaan asing. Penanaman kembali modal (*reinvestment*) dari pendapatan perusahaan dan penyediaan pinjaman jangka pendek dan panjang antara perusahaan induk dan perusahaan anak atau afiliasinya juga dikategorikan sebagai investasi asing langsung. Kini mulai muncul corak-corak baru dalam FDI seperti pemberian lisensi atas penggunaan teknologi tinggi.

Penanaman modal asing langsung atau yang sering disebut dengan *foreign direct investment* (FDI) adalah investasi yang dibuat untuk mendapatkan suatu kepentingan yang berkelanjutan dalam suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh investor dengan tujuan untuk mengefektifkan kegiatan manajemen perusahaan (Robbock *et al.*, 1989). Sedangkan menurut Krugman dalam Sarwedi (2002) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *foreign direct investment* (FDI) adalah arus modal internasional dimana

perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya pemindahan sumberdaya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri.

Ada beberapa teori lain yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi FDI :

The Kian Wie (1996) menyebutkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi FDI yang berperan sebagai pendorong dan penarik bagi investasi penanaman modal asing yaitu,

1. *Pull factor* : kebijakan pemerintah yang menguntungkan investor luar negeri
2. *Push factor* : meningkatnya upah tenaga kerja dan biaya lahan serta kebijakan pemerintah negara asal yang memberikan tekanan pada investor (*home*)

Sedangkan dalam *World Investment Report* tahun 1994 mengalirnya penanaman modal asing (FDI) di beberapa negara disebabkan karena hubungan yang saling pengaruh mempengaruhi antara faktor ekonomi dan non ekonomi (kebijakan pemerintahannya). Ada beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi investasi asing dalam negeri yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi negara-negara penerima modal asing (GDP)
2. Potensi pasar dalam negeri (demand)
3. tingkat keuntungan yang tinggi (inflasi)
4. tenaga kerja yang dibutuhkan tersedia dalam jumlah yang cukup (SDM)

selain itu ada beberapa faktor lain seperti tersedianya sumber daya alam yang berlimpah, teknologi baru yang berkembang serta lahan yang cukup dalam menghasilkan produk dan jasa yang dibutuhkan.

Sejak tahun 2005 dalam laporan UNCTAD (UNCTAD 2005) ditemukan berbagai sumber sumber baru FDI muncul diantara pengembangan dan transisi ekonomi global. Dalam sepuluh tahun terakhir ditemukan semakin banyak perusahaan-perusahaan

Transnasional muncul sebagai pelaku utama bahkan sebagai pemain Global. Link baru perusahaan-perusahaan transnasional seolah memasuki seluruh negara di dunia yang akan memberikan dampak luas dalam membentuk lanskap ekonomi dunia baru. Asia terutama telah menjadi magnet utama bagi arus FDI diikuti Amerika Latin dan Afrika walaupun lebih rendah jumlah FDI yang masuk tetapi laju pertumbuhan FDI nya cukup tinggi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang atraktif Asia Tenggara menjadi incaran para investor asing baik dari Eropah maupun dari Amerika.

Robbock *et al.* (1989) menyebutkan beberapa pendekatan dalam investasi asing langsung (*foreign direct investment – FDI*), yaitu: pendekatan wawasan global (*the global horizon approach*), pendekatan ketidaksempurnaan pasar (*the market imperfections approach*) dan pendekatan daur hidup produk (*the product life cycle model*) (Robbock *et al.* (1989). Kemudian teori yang dikemukakan oleh Dunning tentang *organization location and internalization (OLI) framework* (Ball dan Mc. Culloh, 1996) dianggap sebagai teori kontemporer mengenai investasi asing langsung (*foreign direct investment – FDI*), dimana Dunning mengembangkan suatu pendekatan *eclectic* dengan memadukan tiga teori utama (*foreign direct investment – FDI*), yaitu teori organisasi industrial, teori internalisasi dan teori lokasi.

Menurut Ball dan Mc. Culloh (1996), ada 2 faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi investasi di luar negeri adalah faktor non ekonomi dan ekonomi. Faktor non ekonomi yang termasuk di dalamnya adalah faktor politik dan hukum, faktor sosial budaya dan faktor daya saing. Faktor politik dan hukum yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan multinasional adalah mengenai pembatasan impor, kepemilikan saham, alih teknologi, pesaing dalam bentuk perusahaan pemerintah, pengiriman keuntungan, stabilitas kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perpajakan. Faktor sosial budaya yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah estetika, sikap dan kepercayaan, agama, budaya materi, pendidikan, bahasa dan organisasi kemasyarakatan. Faktor ekonomi yang perlu dipertimbangkan antara lain nilai ekspor, GDP, pendapatan riil, inflasi, kurs valuta asing, tingkat bunga, ketersediaan kredit, kebiasaan pembayaran

nasabah dan *rate of return* (ROR) investasi yang sama.

Faktor daya saing pada dasarnya melihat daya saing perusahaan terhadap perusahaan pesaing. Dalam hal ini aspek yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah ukuran, kekuatan finansial, pangsa pasar, strategi pemasaran, efektifitas program promosi, tingkat kualitas lini produk, sumber produk, kebijaksanaan harga, tingkat layanan purna jual dan saluran distribusi dan cakupan pasar pesaing.

Negara-negara disub region Asia situasi dan kondisinya sangat bervariasi, baik sumber daya alamnya, ekonomi, stuktur industri, tingkat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, strategi politik dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pada gelombang pertama *FDI* selama tahun 1970 perusahaan-perusahaan di Asia memanfaatkan kesempatan tersebut dalam memicu ekspansi mereka keluar negeri. Sasarannya adalah negara-negara berkembang yang ada di Asia. Dimana pertumbuhan ekonomi mereka cukup mempengaruhi para investor asing untuk melakukan ekspansi. Akibatnya lahir beberapa perusahaan transnasional di Asia yang membidik pasar region Asia Timur dan Asia Tenggara terutama dan pasar dunia. Tahun 1990-an perusahaan besar dari Asia Tenggara terutama Dari Malaysia, Singapore dan Thailand juga mulai melakukan ekspansi keluar negeri. Malaysia lahir Petronas, SingTel dari Singapore dan PTTEP dari Thailand. Industri yang banyak diminati di negara-negara Asia adalah otomotif, kimia, baja, elektronik, dan perbankan sejak tahun 2000.

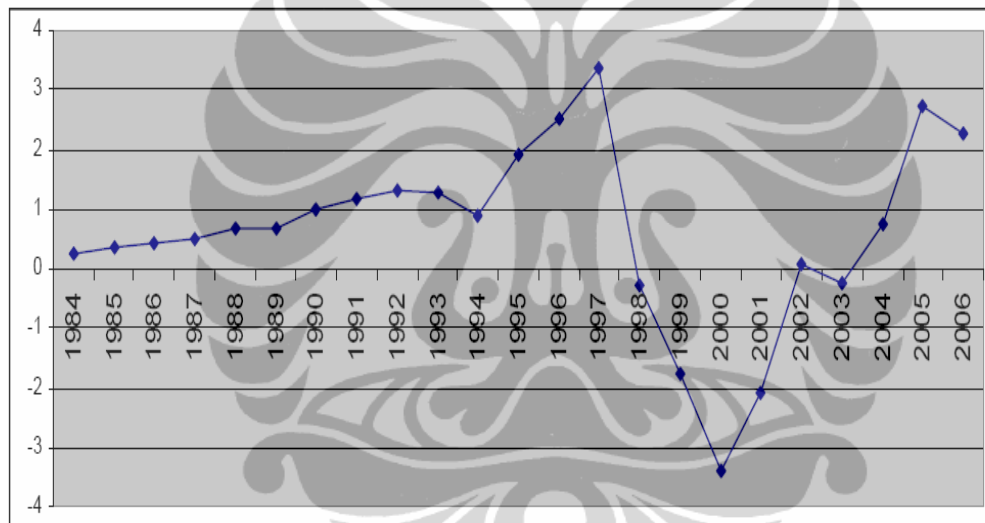
Terlihat dari *FDI* yang masuk kenegara-negara Asean dalam Word Report Investment (UNCTAD, 2009) sejak tahun 1990 meningkat secara drastis setiap tahunnya. Tahun 1990 jumlah stock *FDI* hanya 64,303 million US\$ dan pada tahun 2000 sebanyak 266,760 million US\$, dan pada tahun 2008 berada di angka 663,044 million US\$. Dalam jangka waktu 18 tahun jumlah *FDI* yang beredar di negara-negara Asean meningkat 10 kali lipat. Informasi ini tentunya dapat menjadi informasi penting bagi pemerintah SBY dan Boediono dalam mengambil langkah langkah yang menarik bagi investor (*FDI*), terutama untuk paling tidak mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis 2008 dan setelah Pemilu 2009. Berbagai kendala non ekonomi setidaknya sangat

berpengaruh pada jumlah *FDI* yang masuk keIndonesia sehingga perlunya strategi-strategi ekonomi mutakhir untuk menarik *FDI* ke Indonesia.

2.2 Faktor-faktor Non Ekonomi di Indonesia.

2.2.1 Resiko Politik dan Birokrasi Pemerintah

Peran penting dari *FDI* sebagai salah satu sumber penggerak pembangunan ekonomi yang pesat selama era Orde Baru tidak bisa disangkal. Selama periode tersebut, pertumbuhan arus masuk *FDI* ke Indonesia memang sangat pesat, terutama pada periode 80-an dan bahkan mengalami akselerasi sejak tahun 1994 (Grafik 2.1).



Sumber: *database* dari ADB (Key Indicators of Developing Asian and Pacific Countries; beberapa tahun) dan BKPM, beberapa tahun)

Gambar 2.1 Pertumbuhan Arus Masuk Net FDI ke Indonesia, 1984 – 2008 (sebagai % PDB)

Sejak krisis 1997 hingga sekarang pertumbuhan arus masuk FDI ke Indonesia masih relatif lambat jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang juga terkena krisis yang sama seperti Thailand, Korea Selatan dan Filipina. Bahkan hingga tahun 2001 arus masuk net FDI ke Indonesia negatif dalam jumlah dollar yang tidak kecil, dan setelah itu kembali positif terkecuali tahun 2003 (Gambar 2.1). Arus masuk net negatif itu

disebabkan banyak FDI yang menarik diri atau pindah lokasi ke negara-negara tetangga. (ADB, 2004). Situasi ekonomi Indonesia juga menjadi salah satu pertimbangan mengapa Investasi asing mengalami penurunan . Banyaknya pabrik yang dialokasikan kembali kenegara tetangga serta menurunnya permintaan produk dan jasa akibat menurunnya kemampuan masyarakat untuk membeli membuat Investasi Asing langsung merosot.

Masalah politik yang mendominasi Indonesia dan terus bergulir sejak tahun 1998 dengan reformasi di bidang politik telah membuat Indonesia dijauhi oleh investor dunia. Bahkan Indonesia sampai sekarang tidak termasuk lokasi tujuan penting bagi MNCs (atau TNCs). Laporan dari UNCTAD tahun 2006 menunjukkan bahwa dari Asia Tenggara dan Timur, hanya Singapura, China (termasuk Hong Kong), Taiwan, Malaysia, Jepang dan Korea Selatan yang masuk di dalam daftar tujuan penting bagi TNCs terbesar di dunia. Juga untuk TNCs terbesar dari kelompok negara-negara berkembang, negara-negara Asia Tenggara dan Timur ini termasuk lokasi penting (Tabel 2.3).

Tabel.2.1. Lokasi yang Paling Disukai oleh Top 100 TNC

For largest world TNCs		For largest developing-country TNCs	
Economy	Location intensity	Economy	Location intensity
United States	92.0	United States	50.0
United Kingdom	91.0	Hong Kong (China)	33.9
Netherlands	89.6	United Kingdom	33.7
Germany	87.4	China	30.0
France	83.5	Singapore	26.4
Italy	81.4	Netherlands	25.0
Brazil	81.0	Japan	22.5
Belgium	80.0	Malaysia	20.3
Switzerland	79.4	Canada	16.2
Mexico	78.0	Australia	15.0
Canada	77.3	Germany	15.0
Spain	76.4	Cayman Islands	13.7
Singapore	73.7	Taiwan Province of China	13.2
Poland	72.0	Virgin Islands, United Kingdom	12.5
Japan	70.3	Bermuda	11.2
Czech Republic	70.0	France	11.2
Australia	69.7	Brazil	10.4
Argentina	68.0	Belgium	10.0
China	66.0	Mexico	9.5
Hong Kong (China)	65.6	Poland	8.8
Austria	64.0	Czech Republic	7.5
Portugal	64.0	Italy	7.5
Denmark	61.0	Spain	7.5
Finland	55.1	Korea, Republic of	6.7
Hungary	55.0	Austria	6.2
Sweden	54.5	Colombia	6.2
Luxembourg	54.0	Denmark	6.2
Russian Federation	54.0	Panama	6.2
Malaysia	53.5	Sweden	6.2
Norway	53.5	Switzerland	6.2
Venezuela	52.0	United Arab Emirates	6.2
Turkey	50.0	Argentina	5.0
Korea, Rep. of	49.5	Chile	5.0
New Zealand	49.0	Hungary	5.0
Taiwan Province of China	49.0	Nicaragua	5.0

Sumber: UNCTAD, 2009

Lebih parah lagi, menurut laporan yang sama, Indonesia termasuk negara dengan kinerja dan potensi FDI yang rendah (Gambar 2.1)

	High FDI performance	Low FDI performance
	Front-runners	Below potential
High FDI potential	Australia, Bahamas, Bahrain, Belgium, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria, Chile, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Dominican Republic, Estonia, Finland, Hong Kong (China), Hungary, Iceland, Ireland, Jordan, Kazakhstan, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Netherlands, New Zealand, Panama, Poland, Portugal, Qatar, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Trinidad and Tobago and United Arab Emirates.	Algeria, Argentina, Austria, Belarus, Brazil, Canada, Denmark, France, Germany, Greece, Islamic Republic of Iran, Israel, Italy, Japan, Kuwait, Libyan Arab Jamahiriya, Mexico, Norway, Oman, Philippines, Republic of Korea, Russian Federation, Saudi Arabia, Switzerland, Taiwan Province of China, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Kingdom and United States.
	Above potential	Under-performers
Low FDI potential	Albania, Angola, Armenia, Azerbaijan, Bolivia, Congo, Costa Rica, Ecuador, Ethiopia, Gabon, Gambia, Georgia, Guyana, Honduras, Jamaica, Kyrgyzstan, Mali, Mongolia, Morocco, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Republic of Moldova, Romania, Sudan, Tajikistan, Uganda, United Republic of Tanzania, Viet Nam and Zambia.	Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Colombia, Côte d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Egypt, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinea, Haiti, India, Indonesia, Kenya, Madagascar, Malawi, Myanmar, Nepal, Niger, Pakistan, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Sri Lanka, Suriname, Syrian Arab Republic, TFYR of Macedonia, Togo, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Yemen and Zimbabwe.

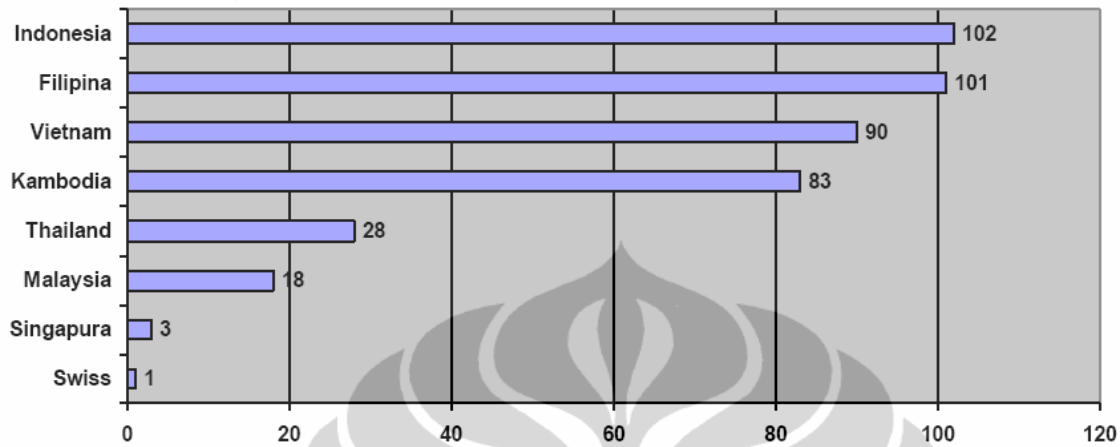
Keterangan: * rata-rata tiga tahun untuk 2002-2004.
Sumber: UNCTAD (2006)

GAMBAR 2.2. Matriks dari Kinerja dan Potensi Arus Masuk FDI, 2004*

2.2.2 Iklim Investasi

Beberapa Kendala Investasi yang dihadapi oleh perusahaan multi nasional di Indonesia diakibatkan oleh berbagai faktor social dan budaya selain dari birokrasi dan politik dalam negeri. Iklim investasi yang tidak atractive menjadi kendala non ekonomi bagi FDI di Indonesia. Infrastructure yang berkualitas rendah, birokrasi, ksumber dayamanuasi yang tidak terdidik dan berkompeten, peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan yang restriktifserta berbagai hal lain semakin membuat iklim investasidi Indonesia tidak kondusif bagi investor. Hasil survei tahunan terhadap perusahaan-perusahaan di 131 negara dari World Economic Forum (WEF, 2007) yang berpusat di Geneva (Swiss) untuk *The Global Competitiveness Report 2007-2008* memperlihatkan

permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi pengusaha-pengusaha di Indonesia.

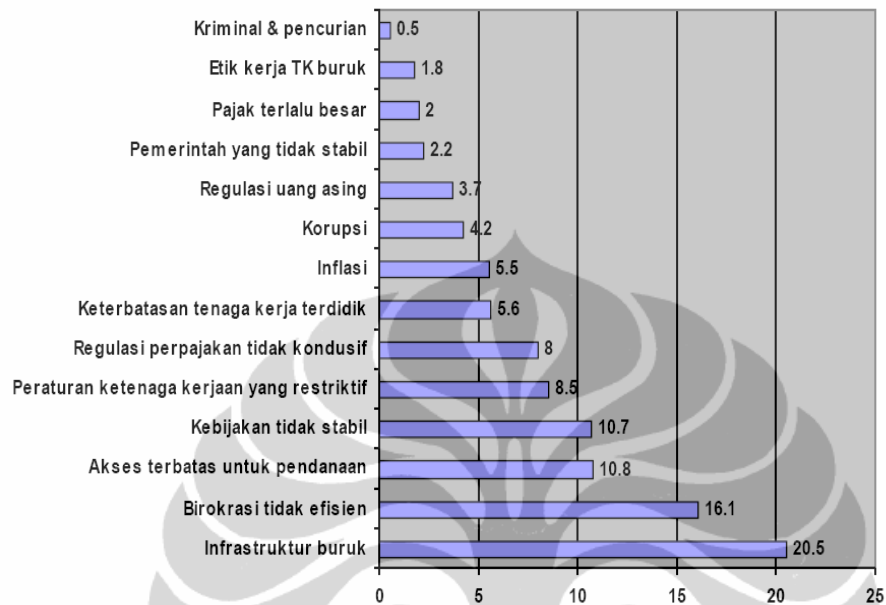


Sumber : WEF (2006 dan 2007)

Gambar 2.3. Kualitas Infrastructure dibeberapa negara (rangking)

Seperti yang dapat dilihat di **Gambar 2.3**, dimana Indonesia berada di posisi 102, satu poin lebih rendah daripada Filipina untuk kelompok negara-negara yang memiliki Infrastruktur yang buruk (dalam arti kuantitas terbatas dan kualitas buruk) . Indonesia tetap pada peringkat pertama dibawah negara, Philipina, Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia. Jika dalam survei *WEF* selama beberapa tahun berturut-turut belakangan ini menempatkan Indonesia pada posisi sangat buruk untuk infrastruktur, ini berarti memang kondisi infrastruktur di dalam negeri sangat memprihatinkan. Padahal, salah satu penentu utama keberhasilan suatu negara untuk dapat bersaing di dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini dan di masa depan adalah jumlah dan kualitas infrastruktur yang mencukupi. Buruknya infrastruktur dengan sendirinya meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya menurunkan daya saing harga dengan konsumwensi ekspor menurun. Konsekwensi lainnya adalah menurunnya niat investor asing (atau *FDI*) untuk membuka usaha di dalam negeri, dan ini pasti akan berdampak negatif terhadap produksi dan ekspor di dalam negeri. Memang opini pribadi dari para pengusaha Indonesia yang masuk di dalam sampel survei mengenai buruknya infrastruktur di dalam negeri selama ini sejalan dengan kenyataan bahwa Indonesia selalu berada di peringkat

rendah, bahkan terendah di dalam kelompok ASEAN.



Sumber: (WEF, 2007)

Gambar 2.4. Masalah-masalah utama dalam melakukan bisnis di Indonesia, (%)

Dari **Gambar 2.4** Birokrasi tetap menjadi salah satu problem terbesar yang dihadapi bukan hanya Indonesia tetapi juga banyak negara lain di Asia, termasuk di negara-negara yang terkena krisis ekonomi 1997/98, meskipun reformasi dalam skala lumayan telah berlangsung di negara-negara tersebut. Birokrasi pemerintah yang tidak efisien berada pada peringkat kedua dalam kelompok masalah-masalah investasi . Jika dalam survei tahun lalu keterbatasan akses keuangan tidak merupakan suatu problem serius, hasil survei tahun ini masalah itu berada di peringkat ketiga.

Sebagai suatu ilustrasi, dari sejumlah negara yang diteliti oleh lembaga *think-tank Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang menurut laporan yang sama dari PERC, para birokrat di Cina, India dan Vietnam, memperkaya diri sendiri tampaknya bukan menjadi motif utama. Tindakan para pejabat tingginya yang sangat birokratif, lebih banyak didasarkan pada keinginan mempertahankan kekuasaan, selain memang ada

keinginan kuat para pejabat di semua level untuk menjaga kepentingan menteri-menteri atau wilayah-wilayah tertentu yang mereka wakili."Sangat sedikit atau tidak ada insentif untuk bekerja sama dengan sektor swasta," demikian PERC. Dengan kondisi tersebut, India tetap negara dengan birokrasi terburuk, dengan skor 9,1. Negara Asia lain yang skornya juga di bawah rata-rata adalah Vietnam dan Cina yang masing-masing 8,5, Malaysia 7,5, Filipina 6,5 dan Taiwan 6,33.

Masih banyak pejabat tinggi pemerintah yang memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang dekat mereka. "Dalam kasus Indonesia, masalahnya adalah pada mahalnya persetujuan atau lisensi. Banyak pejabat senior pemerintah terjun ke bisnis atau menggunakan posisi mereka untuk melindungi dan mengangkat kepentingan bisnis pribadinya," demikian disebutkan oleh PERC yang dikutip dari Kompas berbasis di Hongkong, Indonesia termasuk terburuk dan tak mengalami perbaikan yang berarti sejak 1999, meskipun masih lebih baik dibanding Cina, Vietnam dan India. Pada tahun 2000, misalnya, Indonesia memperoleh skor 8,0 atau tak bergerak dari skor 1999, dari kisaran skor yang dimungkinkan, yakni nol untuk terbaik dan 10 untuk terburuk. Tahun 1998, PERC juga menempatkan Indonesia sebagai negara nomor satu paling korup di Asia. Sementara Transparency International (TI) tahun 1998 mendudukkan Indonesia di posisi keenam negara paling korup sedunia, setelah tahun 1995 peringkat pertama (Kompas, Senin, 13 Maret 2000). Masih menurut Kompas yang sama, skor 8,0 atau jauh di bawah rata-rata ini didasarkan pada pertimbangan yang sama.

Asia merupakan salah satu region yang menarik bagi perusahaan transnasional dalam pengembangan bisnisnya. Kurang lebih 90 % dari 100 perusahaan transnasional yang masuk ke Asia. Hasilnya dapat dilihat dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang pesat di beberapa negara Asia yang telah terintegrasi dalam sistem produksi Global. Walaupun sedikit terganggu dalam krisis 1997 kinerja pembangunan negara-negara di Asia lebih baik dibandingkan dengan negara-negara diluar Asia. Perluasan ekspansi usaha perusahaan transnasional tidak terlepas dari berbagai kebijakan dari pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang terlibat dalam pengambilan kebijakan investasi. Beberapa

negara telah memperoleh manfaat dan menjadibagian dari produksi regional atau jaringan global dunia.

2.2.3 Kebijakan Investasi Asing (*FDI Policy*) Di Indonesia

Pemerintah Indonesia melihat peluang yang cukup besar untuk masuknya perusahaan transnasional ke Indonesia. Dengan berbagai potensi daerah, SDM yang mulai terdidik dengan kualitas yang baik dan politik cukup stabil selama era pemerintahan SBY – JK makan beberapa peraturan dan UU investasi lahir dari keseriusan pemerintahan mereka. Ketentuan-ketentuan investasi asing di Indonesia selama ini didasarkan pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1/1967 dengan beberapa penyesuaian UU No. 11/1970 tentang Perubahan Dan Tambahan UU No.1/1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Ketentuan-ketentuan tersebut dirasa tidak cukup kondusif untuk menarik FDI ke Indonesia.

Menurut catatan Hal Hill (1991) undang-undang ini menawarkan perangsang keuangan yang cukup luas bagi negara, dimana modal asing yang diambilalihnya lebih kecil dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya. Perangsang tersebut kebanyakan dalam bentuk pengurangan atau pembebasan pajak (*tax holiday*) selama dua tahun untuk seluruh investasi yang diprioritaskan (yang ditetapkan secara bebas). Pada era pemerintahan SBY, dikeluarkan Paket Kebijakan Iklim Investasi tanggal 31 Agustus 2005, yang secara garis besar berisi ; 1) ditetapkannya mekanisme baru dalam pemberian subsidi bagi Pertamina baik pengadaan BBM, 2) Pemerintah melalui RUPS cq Meneg BUMN mewajibkan BUMN menempatkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) pada bank-bank di Indonesia, 3) Pemerintah akan memperkuat cadangan devisa melalui peningkatan nilai *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) dalam kerangka kerjasama ASEAN dan Cina, Jepang dan Korea. 4) Penyediaan kebutuhan valas untuk BUMN diluar pertamina, seperti PLN, akan dilakukan melalui bank-bank umum dan 5) penerapan secara efektif PBI No. 7/14/PBI/2005 per 14 Juli 2005 tentang pembatasan transaksi rupiah dan kredit valuta asing oleh bank, demi mengurangi kegiatan spekulasi di pasar valas.

Kemudian disusul kembali dengan hadirnya Paket Insentif 1 Oktober 2005 yang merupakan bagian integral dan implementasi serta tindak lanjut dari Paket Kebijakan 31 Agustus 2005 serta paket insentif Januari 2006. Cakupan dari kebijakan ini adalah, Paket Insentif Fiskal, Reformasi regulasi dalam sektor perdagangan, Reformasi regulasi dalam sektor perhubungan, Inpres perberasan tentang harga pemberian beras oleh pemerintah dan Subsidi langsung tunai. Hal substansial yang berkaitan dengan kebijakan investasi adalah berkenaan dengan pembebasan bea masuk untuk beberapa produk, yang meliputi ; 0% untuk bahan baku dan komponen industri alat-alat berat, pembebasan bea masuk atas impor Engine Assy untuk angkutan umum, pembebasan bea masuk untuk converter kit untuk energi, percepatan pembatalan perda mengenai pajak dan retribusi yang menghambat dunia usaha dan investasi.

Kebijakan-kebijakan tersebut, ternyata belum cukup mampu untuk mendorong hadirnya investasi asing di Indonesia. Sehingga yang sangat diperlukan dalam rangka mendorong hadirnya investasi asing di Indonesia adalah adanya kebijakan pendukung yang dikeluarkan oleh departemen terkait hadirnya Kepres No. 87 tahun 2003 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI) yang diketuai langsung oleh presiden, juga dirasakan belum mampu menghadirkan pelayanan birokrasi yang efektif. Timnas PEPI yang memiliki tugas utama untuk merumuskan, mengkaji dan menetapkan kebijakan-kebijakan peningkatan investasi dan ekspor, ternyata belum cukup mampu untuk menghadirkan pelayanan birokrasi pada satu atap, sehingga semakin memperpanjang jarus birokrasi dalam berinvestasi. Pada sisi lain, keberadaan BKPM dalam wilayah teknis sering kali juga dianggap sebagai faktor penghambat investasi, mengingat tidak sinkronnya kebijakan pembangunan atau investasi antar departemen dengan BKPM sendiri. Sebagai sebuah contoh adalah sistem perijinan dan pengaturan. Sistem perijinan dan pengaturan seringkali menggunakan piranti utama yaitu pemerintah, yang dimulai dari pemerintah pusat sampai dengan pada level pemerintahan dibawahnya. Berdasarkan temuan Bank Dunia 2005, lamanya waktu perijinan untuk memulai usaha di Indonesia adalah 115 hari dengan mengharuskan untuk

melewati berbagai palang pintu birokrasi dan instansi.

Lemahnya aspek kelembagaan tersebut tentunya sangat berpotensi menghambat hadirnya investasi asing di Indonesia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua Asosiasi pengusaha Indonesia Sofyan Wanandi (2004), bahwa untuk meningkatkan investasi di Indonesia terutama dari luar negeri diperlukan institusi yang kuat, sehingga akan melahirkan pola kepemimpinan yang mendukung kebijakan-kebijakan investasi. Dengan demikian, yang harus dilakukan adalah membuat kebijakan reformasi birokrasi sebagai prioritas perbaikan iklim investasi, yang antara lain dilakukan dengan penyederhanaan sistem dan perijinan usaha, penurunan berbagai pungutan atau pajak yang tumpang tindih, serta transparansi biaya perijinan.

Keseriusan pemerintahan SBY dan Jusuf Kalla dalam menciptakan iklim investasi dari segi regulasi dan hukum memang sangat serius. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2006 tentang paket insentif khususnya untuk menerapkan kebijakan perijinan satu atap. Karena paket kebijakan ini telah memperpendek berbagai perijinan investasi di Indonesia. Sebagaimana di ketahui, bahwa dalam pedoman tata cara berinvestasi yang dikeluarkan oleh BKPM terdapat jenis izin yang harus diurus, yaitu :

1. Izin yang dikeluarkan oleh BPKM sebanyak tujuh jenis izin, yang terdiri dari izin angka pengenal importir terbatas, izin usaha tetap/izin perluasan, rencana penggunaan tenaga kerja asing, rekomendasi visa bagi penggunaan tenaga kerja asing, perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang bekerja lebih dari satu provinsi, fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk atas pengimporan barang, modal, atau bahan baku/penolong dan fasilitas fiskal lainnya
2. perizinan yang diterbitkan pemerintah provinsi sesuai kewenangannya, berupa perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing untuk tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi
3. Perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah kota/kabupaten, yaitu berupa izin lokasi, sertifikat hak atas tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), izin undang-undang gangguan (HO)

Pada tahun 2007 untuk memperkuat pelayanan satu atap yang ditetapkan oleh Inpres No.3 tahun 2006 maka pemerintah kembali mengeluarkan UU Penanaman Modal yaitu UU PM No.25 tahun 2007 yang dapat dikatakan sudah mencakup semua aspek penting (termasuk soal pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dan kewajiban investor, ketenagakerjaan, dan sektor-sektor yang bisa dimasuki oleh investor) yang terkait erat dengan upaya peningkatan investasi dari sisi pemerintah dan kepastian berinvestasi dari sisi pengusaha/investor. Dua diantara aspek-aspek tersebut yang selama ini merupakan dua masalah serius yang dihadapi pengusaha, dan oleh karena itu akan sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia jika dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuannya di UU PM tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, Bab I Pasal 1 No. 10 mengenai ketentuan umum: *pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat*. Sistem pelayanan satu atap ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah, dan cepat. Memang membangun sistem pelayanan satu atap tidak mudah, karena sangat memerlukan visi yang sama dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah yang berkepentingan dalam penanaman modal. Dapat dipastikan apabila ketentuan ini benar-benar dilakukan, dengan asumsi faktor-faktor lain (seperti kepastian hukum, stabilitas, pasar buruh yang fleksibel, kebijakan ekonomi makro, termasuk rejim perdagangan yang kondusif dan ketersediaan infrastruktur) mendukung, pertumbuhan investasi di dalam negeri akan mengalami akselerasi.

Bagi seorang pengusaha manca negara yang ingin berinvestasi di sebuah wilayah di Indonesia, adanya pelayanan satu atap melegakan karena ia tidak perlu lagi menunggu dengan waktu lama untuk memperoleh izin usahanya di Indonesia. Bahkan ia tidak lagi perlu mengeluarkan biaya pajak maupun pungutan lainnya yang dapat membengkak dari

tarif resmi akibat panjangnya jalur birokrasi yang harus ditempuh untuk memperoleh izin usaha tersebut sebelum adanya pelayanan satu atap. Sebenarnya, hal ini sudah diupayakan sebelumnya lewat Keppres No 29 tahun 2004 mengenai penyelenggaraan penanaman modal, baik asing (FDI) maupun dalam negeri (PMDN) melalui sistem pelayanan satu atap semasa era Presiden Megawati Soekarno Putri. Dalam kepres tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanaman modal khususnya yang berkaitan dengan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dilaksanakan oleh BKPM. Pelayanan satu atap ini meliputi penanaman modal yang dilakukan baik di tingkat propinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada BKPM. Jadi, BKPM bertugas melakukan koordinasi antara seluruh departemen atau instansi pemerintah lainnya, termasuk dengan pemerintah kabupaten, kota, serta propinsi yang membina bidang usaha penanaman modal.

Kedua, Bab III Pasal 4 No.2b mengenai kebijakan dasar penanaman modal: *menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* Kepastian hukum yang tidak ada di Indonesia sejak berlalunya era Orde Baru sering dikatakan sebagai salah satu penghambat investasi, khususnya FDI, di dalam negeri. Hasil studi yang dilakukan oleh LPEM-FEUI (2001) menunjukkan bahwa masalah-masalah yang dihadapi pengusaha dalam melakukan investasi di Indonesia selain persoalan birokrasi, ketidakpastian biaya investasi yang harus dikeluarkan serta perubahan peraturan pemerintah daerah yang tidak jelas atau muncul secara tiba-tiba, juga kondisi keamanan, sosial dan politik di Indonesia.

Bahkan hasil survei tahunan dari *World Economic Forum* (WEF, 2007) yang berpusat di Geneva (Swiss) untuk *The Global Competitiveness Report 2007-2008* menunjukkan bahwa dari 131 negara yang masuk dalam sampel penelitiannya, Indonesia berada pada peringkat ke 93 untuk pertanyaan apakah pengusaha (responden) bisa mengandalkan pelayanan dari polisi untuk melindungi usahanya dari kriminalitas (Tabel

2.2). Ketidakstabilan politik di suatu negara tidak terlalu masalah bagi pengusaha tentu (selama tidak sampai menimbulkan perang saudara), tetapi gangguan kriminalitas dan hukum yang tidak pasti yang melindungi hak-hak dari pelaku bisnis dalam berbagai transaksi termasuk jual beli tanah dan sengketa bisnis tentu sangat mengganggu atau menakutkan bagi seorang calon investor untuk menanam modalnya di negara tersebut.

Tabel 2.2 : Peringkat Indonesia mengenai Perlindungan Bisnis oleh Polisi versi WEF 2007

Peringkat	Negara
1	Finlandia
2	Denmark
3	Jerman
4	Singapura
5	Swiss
6	Islandia
7	Hong Kong SAR
8	Norwegia
9	Austria
10	Emirat Arab Serikat
93	Indonesia
131	Venezuela

Sumber: WEF (2007).

Ada beberapa kendala Perijinan Investasi yang memperpanjang birokrasi dan pengurusan perijinan penanaman modal di Indonesia. Dalam membahas atau mengidentifikasi kendala perijinan penanaman modal di Indonesia, ada tiga hal yang perlu dipahami. Pertama, ijin investasi tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi harus menjadi satu paket dengan ijin-ijin lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha atau menentukan untung ruginya suatu usaha. Besarnya biaya perijinan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh

pemerintah menjadi cost yang sangat merugikan investor (*undertable cost*). Di Tabel 2.3 dijabarkan sejumlah UU dan peraturan menteri yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses mulai dari awal investasi hingga menjadi suatu perusahaan yang siap beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Jika UU yang tertera di Tabel 2.5 tersebut berbenturan dengan UU PM No.25, 2007, sangat kecil harapan bahwa kehadiran UU PM yang baru ini akan memberi hasil optimal.

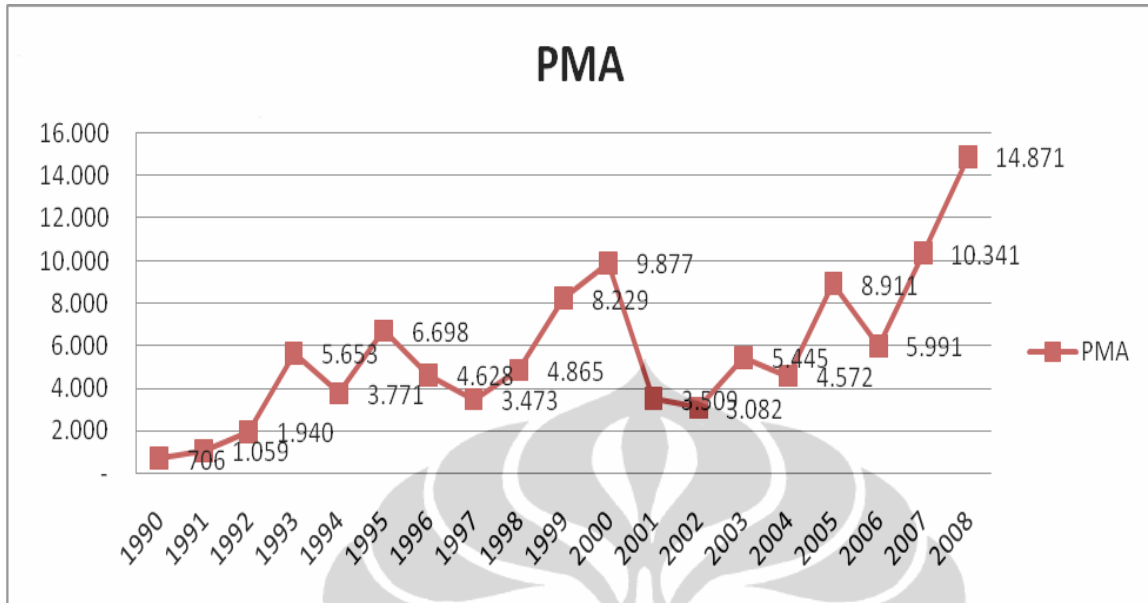
Tabel 2.3 : Beberapa UU/Peraturan yang Berpengaruh terhadap Efektivitas UU PM No.25, 2007

UU/Peraturan	Tahun	Isu
Peraturan Mendaz 37/M-DAG/Per/9	2007	Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
Peraturan Mendag 36/M-DAG/Per/9	2007	Penerbitan SIUP
UU No.40	2007	Perseroan Terbatas
UU No. 39	2007	Cukai
UU No. 17	2006	Kepabeanan
UU No. 2	2005	Penyelesaian hubungan industrial
UU No.13	2003	Ketenaga kerjaan
UU No. 22	2001	Investasi di sektor migas

Sumber : BKPM

Dan hadirnya paket kebijakan investasi satu atap Inpres No.3 tahun 2006 dan UU Penanaman Modal yaitu UU PM No.25 tahun 2007 tersebut jelas akan memperpendek mekanisme birokrasi dalam perijinan investasi sehingga jalur panjang dan birokrasi yang membelit para investor dengan biaya tinggi dan waktu yang tidak efisien dapat di hindari.

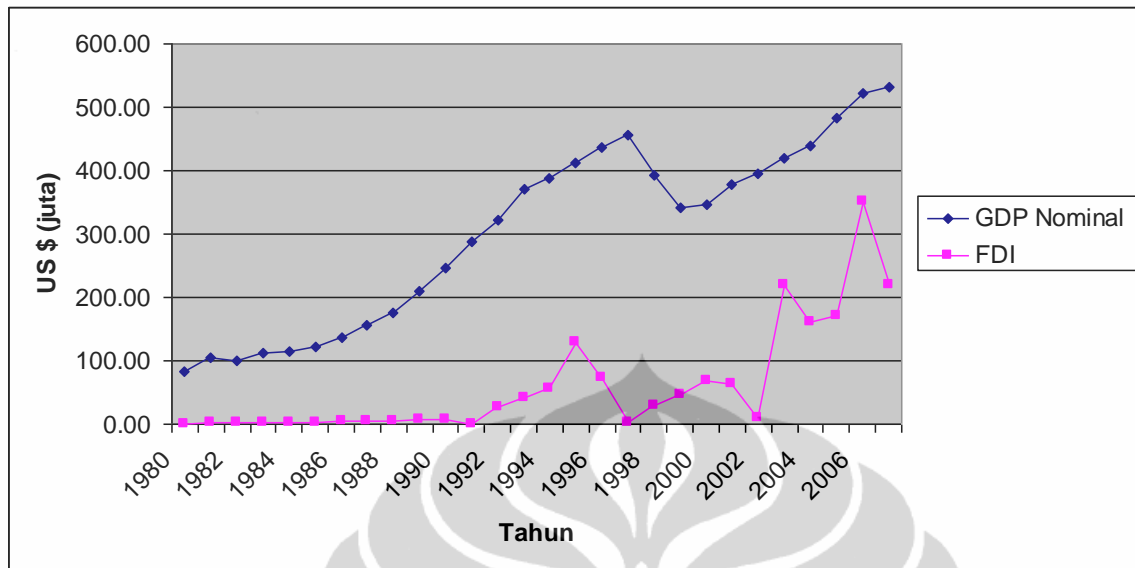
Untuk melihat efektif atau tidaknya paket kebijakan investasi satu atap ini sejak diberlakukannya , bisa digambarkan dari gambar dan tabel berikut :



Sumber : BKPM 2009

Gambar 2.5. Perkembangan Investasi Asing Langsung (FDI) di Indonesia, 1990 – 2008 (dalam juta US \$)

Dari data tersebut di ketahui, bahwa dimana pada tahun 2005 ke tahun 2006, sebelum adanya kebijakan tersebut realisasi investasi FDI mengalami penurunan 33,0 persen. Sementara setelah adanya kebijakan investasi satu atap yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2006, memberikan kontribusi positif yang ditandai dengan kenaikan realisasi investasi FDI pada tahun 2007 sebesar 73,2 persen. Hal ini tentunya amat mengembirakan, karena menandai pergerakan perekonomian nasional ke arah yang lebih baik. Walaupun terlanda krisis pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi hanya turun sedikit dari 6,63 % pada tahun 2007 menjadi 6,1 % pada tahun 2008. Hal ini membuktikan kekuatan domestik mulai menguat dengan adanya FDI dimana produksi domestik dapat terus memicu pertumbuhan PDB paling tidak dapat mempertahankan pertumbuhan PDB..



Sumber: BPS 2009.

Gambar 2.6. GDP Nominal dan Realisasi Investasi Asing Langsung (FDI) Periode 2002 - 2008 (dalam juta US \$)

Dalam perkembangannya, kesemua peraturan perundang-undangan tersebut di atas telah digantikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Sejak diberlakukannya kebijakan investasi terbaru tahun 2007 maka pada tahun 2009 juga di buktikan dengan peran atau kontribusi investasi terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional, yang bisa di simak dari tabel berikut :

Tabel 2.4. Peran Dan Kontribusi Investasi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2005	Tahun 2007	Semester I Tahun 2008
36%	35%	41%

Sumber : Menko Bidang Ekonomi tahun 2008

Kedua Tabel di atas jelas menggambarkan signifikansinya dan efektifnya paket kebijakan ekonomi satu atap dalam konteks mendorong perkembangan realisasi investasi serta kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional yang telah mampu mendorong sektor investasi meningkat. Hal lain yang bisa menggambarkan efektifnya peran paket kebijakan satu atap tersebut adalah hasil survei yang dilakukan oleh IFC tentang peringkat kemudahan berusaha, dimana pada tahun 2006 Indonesia menduduki peringkat 133 dari 178 negara, dan pada tahun 2007 Indonesia menduduki peringkat ke 123 dari 178 negara. Tentunya sebuah perkembangan yang mengembirakan bagi semua kalangan.

2.3 Faktor-Faktor Ekonomi Makro yang Mempengaruhi Investasi Langsung (FDI).

Penanaman modal asing langsung atau yang sering disebut dengan *foreign direct investment* (FDI) adalah investasi yang dibuat untuk mendapatkan suatu kepentingan yang berkelanjutan dalam suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh investor dengan tujuan untuk mengefektifkan kegiatan manajemen perusahaan (Robbock *et al.*, 1989). Sedangkan menurut Krugman dalam Sarwedi (2002) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *foreign direct investment* (FDI) adalah arus modal internasional dimana

perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena FDI itu tidak hanya pemindahan sumberdaya financial saja, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri.

Menurut Ball dan Mc. Culloh (1996), negara akan menanamkan modal dalam hal ini FDI dipengaruhi faktor ekonomi berupa nilai ekspor, pendapatan riil, inflasi, kurs valuta asing, tingkat bunga, ketersediaan kredit, kebiasaan pembayaran nasabah dan *rate of return* (ROR) investasi yang sama dan faktor non ekonomi yaitu politik dan hukum, sosial budaya dan daya saing. Menurut Thee Kian Wie (1996) faktor-faktor pendorong investasi meliputi dua hal, yaitu ; *pertama*, faktor-faktor terdekat meliputi meningkatnya biaya-biaya lahan dan tenaga kerja di negara-negara tersebut, yang menyebabkan banyak operasi mereka menjadi kurang berdaya saing hal ini disebabkan bertambahnya nilai mata uang dan kenaikan tingkat upah yang tajam. *Kedua*, kebijakan pemerintah negara asal investor.

Robbock *et al.* (1989) menyebutkan beberapa pendekatan dalam investasi asing langsung (*foreign direct investment – FDI*), yaitu: pendekatan wawasan global (*the global horizon approach*), pendekatan ketidaksempurnaan pasar (*the market imperfections approach*) dan pendekatan daur hidup produk (*the product life cycle model*) (Robbock *et al.* (1989). Kemudian teori yang dikemukakan oleh Dunning tentang *organization location and internalization* (OLI) framework (Ball dan Mc. Culloh, 1996) dianggap sebagai teori kontemporer mengenai investasi asing langsung (*foreign direct investment – FDI*), dimana Dunning mengembangkan suatu pendekatan *eclectic* dengan memadukan tiga teori utama (*foreign direct investment – FDI*), yaitu teori organisasi industrial, teori internalisasi dan teori lokasi. Teori-teori di atas pada dasarnya hanya menjelaskan mengapa perusahaan multinasional (TNC/MNC) melakukan investasi ke luar negeri, tidak menjelaskan secara eksplisit faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan suatu perusahaan dalam memilih lokasi investasi di luar negeri.

Menurut Thee Kian Wie (1996) faktor-faktor pendorong investasi meliputi dua hal, yaitu ; *pertama*, faktor-faktor terdekat. Faktor ini meliputi meningkatnya biaya-biaya

lahan dan tenaga kerja di negara-negara tersebut, yang menyebabkan banyak operasi mereka menjadi kurang berdaya saing. Faktor terdekat yang menjadi biang keladi industri yang kurang berdaya saing adalah sangat bertambahnya nilai mata uang dan kenaikan tingkat upah yang tajam. *Kedua*, kebijakan pemerintah negara asal investor. Kebijakan pemerintah negara asal juga memainkan peranan penting dalam pemberian kemudahan bagi para penanam modal, yang salah satunya didorong oleh adanya surplus dalam neraca rekening berjalan yang kemudian mendorong penanaman modal di luar negeri.

Sedangkan Hal Hill (1991) melihat bahwa faktor yang akan mempengaruhi fluktuasi investasi asing adalah naik turunnya nisbah utang terhadap modal sendiri (*debt-equity ratio*), selain itu dia juga mengklasifikasi secara lebih sistematis berbagai faktor yang mempengaruhi pola investasi diantara berbagai negara. Salah satu pendekatannya adalah dengan menggunakan analisa intensitas perdagangan terhadap arus investasi. Indeks intensitas perdagangan tersebut merupakan indikator yang berguna untuk, secara relatif mengukur pentingnya dan dominannya arus perdagangan bilateral.

Caves (1982) menjelaskan bahwa beberapa faktor yang penting dalam mempengaruhi keputusan untuk melakukan investasi diluar negeri adalah kebijakan tarif, ikatan sejarah (kolonial), jarak relatif, sumber kekayaan alam, negara-negara tuan rumah, produk daur ulang. Sebelum krisis 1997 pada umumnya negara melakukan investasi langsung kenegara-negara pengimpor modal dalam bentuk eksploitasi bahan mentah, dan industry manufaktur dan perkebunan. Ada beberapa faktor yang mendorong investasi selain faktor politik dan hukum yang perlu dipertimbangkan oleh negara-negara pengimpor modal. Selain itu ada beberapa faktor-faktor fundamental lain yang sifatnya lebih luas dan kompleks yang dapat dilihat dalam indikator-indikator ekonomi antara lain;

1. *Gross Natinal Product (GNP)* yaitu total produksi barang dan jasa yang diproduksi oleh negara tersebut baik bertempat tinggal/berdomisili di dalam negeri maupun di luar negeri dalam suatu periode tertentu.
2. *Gross Domestic Product (GDP)* adalah penjumlahan seluruh barang dan jasa yang

diproduksi oleh suatu negara baik oleh perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing yang beroperasi di dalam negara tersebut dalam suatu waktu/jangka tertentu

3. *Inflasi*, investor akan selalu memperhatikan dengan seksama perkembangan tingkat inflasi dalam suatu negara. Penggunaan tingkat inflasi sebagai salah satu indikator fundamental dalam mencerminkan tingkat GDP dan GNP kedalam nilai yang sebenarnya.
4. *Balance of Payment (BOP)* adalah suatu neraca yang terdiri dari keseluruhan aktivitas transaksi perekonomian internasional suatu negara baik yang bersifat komersial maupun financial dengan negara lain dalam suatu periode tertentu. BOP ini menunjukkan seluruh transaksi antara penduduk, pemerintah, pengusaha dalam maupun luar negeri seperti ekspor, impor, investasi portofolio, transaksi antar bank Sentral, dan lain-lain.
5. *Employment* adalah salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi riil berbagai sektor ekonomi. Indikator ini dapat dijadikan alat untuk menganalisa perekonomian suatu negara.

Sebagian besar FDI ini merupakan kepemilikan penuh atau hampir penuh dari sebuah perusahaan. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki bersama (*joint ventures*) dan aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan lokal. Joint ventures yang melibatkan tiga pihak atau lebih biasanya disebut sindikasi (atau '*syndicates*') dan biasanya dibentuk untuk proyek tertentu seperti konstruksi skala luas atau proyek pekerjaan umum yang melibatkan dan membutuhkan berbagai jenis keahlian dan sumberdaya. Istilah FDI biasanya tidak mencakup investasi asing di bursa saham. Salah satu aspek penting dari FDI adalah bahwa pemodal bisa mengontrol atau setidaknya punya pengaruh penting pada manajemen dan produksi dari perusahaan di luar negeri. Hal ini berbeda dari portofolio atau investasi tak langsung, dimana pemodal asing membeli saham perusahaan lokal tetapi tidak mengendalikannya secara langsung. Biasanya juga FDI adalah komitmen jangka-panjang. Itu sebabnya ia dianggap lebih bernilai bagi sebuah negara dibandingkan investasi jenis lain yang bisa ditarik begitu saja

ketika ada muncul tanda adanya persoalan.

FDI saat ini memainkan peran yang cukup penting dalam proses internasionalisasi bisnis. Perubahan yang sangat besar telah terjadi baik dari segi ukuran, cakupan, dan metode FDI dalam dekade terakhir. Perubahan-perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi, pengurangan pembatasan bagi investasi asing dan akuisisi di banyak negara, serta deregulasi dan privatisasi di berbagai industri. Berkembangnya sistem teknologi informasi serta komunikasi global yang makin murah memungkinkan manajemen investasi asing dilakukan dengan jauh lebih mudah.

Pengaruh terbesar FDI ini ada di negara-negara berkembang, dimana aliran FDI telah meningkat pesat dari rata-rata di bawah \$10 milyar pada tahun 1970an menjadi lebih dari \$200 milyar pada tahun 1999. Jumlah FDI di 'Dunia Ketiga' kini mencapai hampir seperempat FDI global. Di antara negara-negara lainnya, Cina adalah negara tuan rumah terbesar bagi FDI. Perusahaan-perusahaan multinasional besar dan konglomerat-konglomerat masih menjadi bagian terbesar dari FDI (sumber: *UNCTAD*). Negara-negara ASEAN dengan penghasilan menengah seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina kini tengah menghadapi tantangan utama untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik mereka sebagai tuan rumah bagi FDI dalam lingkungan ekonomi yang berubah dengan pesat.

Bantuan Pembangunan Luar Negeri atau ODA (*Overseas Development Assistance*) dulunya adalah sumber utama dana pembangunan di banyak negara berkembang. Namun, pada tahun 2000 total ODA hanya tinggal setengah dari jumlahnya sebelum tahun 1990an. Pembiayaan swasta (privat), melalui FDI, telah menjadi sumber terbesar dari dana 'pembangunan'. Peningkatan luarbiasa FDI ini adalah akibat dari pertumbuhan pesat perusahaan-perusahaan transnasional dalam ekonomi global. Dari hanya sekitar 7.000 perusahaan multinasional di tahun 1960, angka itu melesit melampaui 63.000 dengan sekitar 690.000 afiliasi atau cabang menjelang akhir tahun 1990an. Lebih dari 75% dari perusahaan-perusahaan ini berasal dari negara maju di Eropa Barat dan

Amerika Utara, sementara perusahaan-perusahaan subsider(cabang)nya beroperasi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Inilah gambaran sektor privat yang diperkirakan menguasai lebih dari duapertiga perdagangan internasional. (Tambunan, 2008).

Pemerintah sangat memberi perhatian pada FDI karena aliran investasi masuk dan keluar dari negara mereka bisa mempunyai akibat yang signifikan. Para ekonom menganggap FDI sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi karena memberi kontribusi pada ukuran-ukuran ekonomi nasional seperti Produk Domestik Bruto (PDB/GDP), *Gross Fixed Capital Formation* (GFCF, total investasi dalam ekonomi negara tuan rumah) dan saldo pembayaran. Mereka juga berpendapat bahwa FDI mendorong pembangunan karena-bagi negara tuan rumah atau perusahaan lokal yang menerima investasi itu-FDI menjadi sumber tumbuhnya teknologi, proses, produk sistem organisasi, dan ketrampilan manajemen yang baru. Lebih lanjut, FDI juga membuka pasar dan jalur pemasaran yang baru bagi perusahaan, fasilitas produksi yang lebih murah dan akses pada teknologi, produk, ketrampilan, dan pendanaan yang baru.

Mereka yang menentang mencatat bahwa FDI memberi makna lain pada ungkapan "Berpikir global, bertindak lokal" (*Think globally, act locally*). Mereka berpendapat bahwa FDI lebih menguntungkan negara asal (negara dari mana investasi itu ditanamkan) daripada negara tuan rumah (negara tujuan dimana investasi itu ditanamkan). FDI bisa membuat sebuah pabrik meningkatkan kapasitas produksi totalnya (seringkali juga dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada di negara asalnya); membawa produknya lebih dekat ke pasar-pasar luar negeri; membuka kantor-kantor penjualan lokal di negara tuan rumah; berkelit dari berbagai 'hambatan dagang' (*trade barriers*) dan menghindari tekanan pemerintah luar negeri pada produksi lokal.

Lobi melawan FDI dilakukan para pengkampanye dengan membuat perusahaan-perusahaan tersebut tahu risiko finansial atas investasi mereka dalam produksi yang tidak berkelanjutan secara sosial maupun lingkungan. Sejarah konflik atau catatan buruk

pelanggaran hak asasi manusia di daerah tertentu negara tuan rumah dimana investasi asing hendak ditujukan membuat perusahaan lebih sulit mendapatkan jaminan atas risiko politik. Perusahaan multinasional juga ditekan untuk mengadaptasi standar internasional tertinggi atas hak-hak masyarakat adat, dampak lingkungan, dan syarat-syarat kesehatan dan keselamatan kerja. Inisiatif-inisiatif PBB seperti *Global Compact*, *Equator Principles*, dan prinsip-prinsip tatakelola korporasi dari OECD bisa digunakan untuk membuat bank dan agen pembiayaan lain menghentikan pembiayaan investasi yang secara sosial atau lingkungan merusak. Banyak perusahaan lain kini mempunyai panduan tanggung jawab sosial korporasi-nya masing-masing. Aksi langsung di dalam dan di seputar berlangsungnya RUT (Rapat Umum Tahunan) pemegang saham perusahaan-perusahaan internasional juga terbukti menjadi alat yang efektif untuk menghasilkan publisitas.

Salah satu kemungkinan mempengaruhi investasi asing adalah dengan mendorong investasi etis atau investasi yang bertanggungjawab secara sosial, yang biasa disebut SRI (*Socially Responsible Investment*). Walaupun belum menjadi arus utama, pasar SRI telah meningkat secara berarti. Di Inggris, SRI telah mencapai £ 7,1 milyar. Di AS, skema investasi etis telah mencapai US\$153 milyar menjelang tahun 2000, sebuah peningkatan pesat dari US\$12 milyar pada tahun 1995. Sekitar 12% dari investasi total yang dikelola di AS adalah bagian dari skema SRI.(UNCTAD 2009).

UU Penanaman Modal pertama (UU No. 1/1967) yang dikeluarkan oleh Orde Baru dibawah pemerintahan Suharto sebenarnya mengatakan dengan jelas bahwa beberapa jenis bidang usaha sepenuhnya tertutup bagi perusahaan asing. Pelabuhan, pembangkitan dan transmisi listrik, telekomunikasi, pendidikan, penerbangan, air minum, KA, tenaga nuklir, dan media masa dikategorikan sebagai bidang usaha yang bernilai strategis bagi negara dan kehidupan sehari-hari rakyat banyak, yang seharusnya tidak boleh dipengaruhi pihak asing (Pasal 6 ayat 1).

Setahun kemudian, UU Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No. 6/1968) menyatakan:

"Perusahaan nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% daripada modal dalam negeri yang ditanam didalamnya dimiliki oleh Negara dan/atau, swasta nasional" (Pasal 3 ayat 1). Dengan kata lain, pemodal asing hanya boleh memiliki modal sebanyak-banyaknya 49% dalam sebuah perusahaan. Namun kemudian, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah yang menjamin investor asing bisa memiliki hingga 95% saham perusahaan yang bergerak dalam bidang "... pelabuhan; produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik umum; telekomunikasi; penerbangan, pelayaran, KA; air minum, pembangkit tenaga nuklir; dan media masa" (PP No. 20/1994 Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1).

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah Indonesia mengadakan *International Infrastructure Summit* pada tanggal 17 Januari 2005 dan BUMN summit pada tanggal 25-26 Januari 2005. Infrastructure summit menghasilkan keputusan eksplisit bahwa seluruh proyek infrastruktur dibuka bagi investor asing untuk mendapatkan keuntungan, tanpa perkecualian. Pembatasan hanya akan tercipta dari kompetisi antar perusahaan. Pemerintah juga menyatakan dengan jelas bahwa tidak akan ada perbedaan perlakuan terhadap bisnis Indonesia ataupun bisnis asing yang beroperasi di Indonesia. BUMN summit menyatakan jelas bahwa seluruh BUMN akan dijual pada sektor privat. Dengan kata lain, artinya tak akan ada lagi barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan biaya murah yang disubsidi dari pajak. Di masa depan seluruh barang dan jasa bagi publik akan menjadi barang dan jasa yang bersifat komersial yang penyediaannya murni karena motif untuk mendapatkan laba. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan proses liberalisasi yang saat ini sedang berlangsung di semua sektor di Indonesia dan menunjukkan pentingnya FDI bagi pemerintah Indonesia.

Sebenarnya pertanyaan apakah kehadiran investasi asing, khususnya investasi langsung, umum disebut Penanaman Modal Asing (FDI) atau *Foreign Direct Investment* (FDI) di suatu negara menguntungkan negara tersebut, khususnya dalam hal pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak perlu dipertanyakan lagi. Banyak bukti empiris seperti pengalaman-pengalaman di Korea Selatan, Malaysia, Thailand, China,

dan banyak lagi negara lainnya yang menunjukkan bahwa kehadiran FDI memberi banyak hal positif terhadap perekonomian dari negara tuan rumah. Untuk kasus Indonesia, bukti paling nyata adalah semasa pemerintahan Orde Baru (Lihat Gambar 2.1) Tidak mungkin ekonomi Indonesia bisa bangkit kembali dari kehancuran yang dibuat oleh pemerintahan Orde Lama dan bisa mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun selama periode 1980-1997 tanpa FDI. Faktor lain yang juga berperan sebagai sumber pendorong pertumbuhan tersebut seperti bantuan atau utang luar negeri dan keseriusan pemerintah Orde Baru untuk membangun ekonomi nasional saat itu yang tercerminkan oleh adanya Repelita dan stabilitas politik dan sosial. Literatur teori juga memberi argumen yang kuat bahwa ada suatu korelasi positif antara FDI dan pertumbuhan ekonomi di negara penerima.

Secara teori, pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi pada khususnya di negara tuan rumah lewat beberapa jalur mempengaruhi FDI secara positif terhadap:

Pertama, pembangunan pabrik-pabrik pengolahan yang baru (PP) yang berarti juga adanya penambahan output atau produk domestik bruto (PDB), peningkatan barang produksi total ekspor (X) dan kesempatan kerja meningkat (KK) telah memberikan kontribusi yang positif bagi investasi di berbagai bidang. Ini adalah suatu dampak langsung. Pertumbuhan total export (X) berarti penambahan cadangan devisa yang selanjutnya peningkatan kemampuan dari negara penerima untuk membayar utang luar negeri dan impor. Peningkatan permintaan akan barang telah memicu GDP sehingga para investor tertarik untuk berinvestasi dalam pemenuhan permintaan akan barang dan jasa.

Kedua, masih dari sisi suplai, namun sifatnya tidak langsung, adalah sebagai berikut: adanya pabrik pengolahan (PP) baru berarti ada penambahan permintaan di dalam negeri terhadap barang-barang modal, barang-barang setengah jadi, bahan baku dan input-input lainnya. Jika permintaan antara ini sepenuhnya dipenuhi oleh sektor-sektor lain di dalam negeri (tidak ada yang diimpor), maka dengan sendirinya efek positif dari keberadaan atau kegiatan produksi di pabrik-pabrik baru tersebut sepenuhnya dinikmati oleh sektor-sektor domestik lainnya; jadi output di sector lain tersebut mengalami pertumbuhan. Ini berarti telah terjadi suatu efek penggandaan dari

pertumbuhan GDP dengan keberadaan FDI terhadap output agregat di negara penerima. (Tampubolon, 2008)

Ketiga, peningkatan kesempatan kerja akibat adanya pabrik-pabrik baru tersebut berdampak positif terhadap ekonomi domestik lewat sisi permintaan: peningkatan kesempatan kerja menambah kemampuan belanja masyarakat dan selanjutnya meningkatkan permintaan di pasar dalam negeri. Sama seperti kasus sebelumnya, jika penambahan permintaan konsumsi tersebut tidak serta merta menambah impor, maka efek positifnya terhadap pertumbuhan output di sektor-sektor domestik sepenuhnya terserap. Sebaliknya, jika ekstra permintaan konsumsi tersebut adalah dalam bentuk peningkatan impor, maka efeknya nihil. Bahkan jika pertumbuhan impor lebih pesat daripada pertumbuhan ekspor yang disebabkan oleh adanya FDI, maka terjadi defisit neraca perdagangan. Ini berarti kehadiran FDI memberi lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif terhadap negara tuan rumah.

Keempat, peran FDI sebagai sumber penting peralihan teknologi dan *knowledge* lainnya. Peran ini bisa lewat dua jalur utama. Pertama, lewat pekerja-pekerja lokal yang bekerja di perusahaan-perusahaan FDI. Saat pekerja-pekerja tersebut pindah ke perusahaan-perusahaan domestik, maka mereka membawa pengetahuan atau keahlian baru dari perusahaan FDI ke perusahaan domestik. Kedua, lewat keterkaitan produksi atau *subcontracting* antara FDI dan perusahaan-perusahaan lokal, termasuk usaha kecil dan menengah, seperti kasus PT Astra Internasional dengan banyak subkontraktor skala kecil dan menengah.

2.4. Pertumbuhan Ekonomi (GDP)

Literatur yang membahas tentang perkembangan FDI sangatlah banyak. Salah satunya berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam berbagai hipotesis disebutkan, investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*-FDI) bukan hanya berperan dalam pemindahan teknologi pembentukan modal dan mewujudkan peluang pekerjaan, akan tetapi juga berperan meningkatkan pendapatan negara penerima FDI dan selanjutnya akan membawa pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan

ekonomi terjadi karena adanya dampak pada peningkatan permintaan akan barang dan jasa sehingga dari segi permintaan masyarakat membutuhkan investasi baru dalam memproduksi barang dan jasa tersebut.

Berdasarkan pada teori pertumbuhan ekonomi, salah satu faktor yang mempengaruhi output pertumbuhan ekonomi adalah FDI (Borensztein. et. al., 1988). Ada banyak penelitian yang dilakukan untuk melihat hubungan antara FDI dan pertumbuhan ekonomi yang saling mempengaruhi secara timbal balik. Namun secara garis besar penelitian yang membahas hubungan antara FDI dan pertumbuhan ekonomi dapat kita bedakan menjadi empat kategori.

Pertama, studi tentang faktor yang mempengaruhi peningkatan FDI adalah adanya pertumbuhan ekonomi di negara penerima, Peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata memicu meningkatnya pertumbuhan FDI ke suatu negara. FDI ternyata tidak hanya berperan dalam pemindahan teknologi, pembentukan modal dan mewujudkan peluang pekerjaan, akan tetapi juga berperan meningkatkan pendapatan negara penerima FDI dan selanjutnya akan membawa pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan Borensztein (1995), FDI mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, walaupun besar dampaknya tergantung dari *human capital* yang tersedia di negara penerima FDI tersebut. Regresi antara *cross country* pun mempunyai pengaruh positif terhadap investasi domestik, barangkali disebabkan reaksi dari kompetitor investor domestik. Hal ini adalah pengaruh tidak langsung pertumbuhan ekonomi terhadap FDI.

Kedua, adalah analisa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi FDI dan salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam teori FDI, bahwa salah satu tujuan FDI yaitu mendapatkan sumber-sumber pasar yang baru (*demand*), artinya para investor akan memilih lokasi investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment-FDI*) di negara yang mempunyai daya beli yang cukup untuk produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan investor tersebut. Bagaimana mungkin suatu negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi lambat atau tertinggal mempunyai daya beli yang cukup dan mempunyai market

yang menjanjikan. Maka secara umum para investor selalu menghubungkan pemilihan lokasi investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*-FDI) dengan pertumbuhan ekonomi negara tujuan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Shakrani Saharudin Mohd, Zainol Zairy, Sahlan Rizaudin (2002), salah satu faktor yang mempengaruhi masuknya investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*-FDI) ke suatu negara adalah tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Dalam penelitiannya pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang positif dengan investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment* - FDI). Artinya semakin baik tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka akan semakin baik (tinggi) pula aliran investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*-FDI) ke negara tersebut.

Ketiga, adalah kajian tentang peran perusahaan multinasional pada negara tujuan. Perusahaan multinasional yang menanamkan investasinya diluar negeri akan memberikan dampak positif pada negara tujuan tersebut. Salah satunya adalah meningkatnya pendapatan penduduk negara tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan seterusnya akan menjadi pemicu peningkatan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi akan memicu investasi asing langsung (FDI) sebab dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi berarti adanya permintaan akan barang dan jasa sehingga akan memicu investasi .

Keempat, adalah pengujian kausalitas, atau pengujian sebab-akibat. Dimana terdapat hasil yang positif bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan aliran investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*-FDI) ke suatu negara dan sebaliknya aliran investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*-FDI) ke suatu negara juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dalam pengujian yang dilakukan oleh Chowdhury dan Mavrotas (2002), menyebutkan bahwa terdapat hubungan sebab-akibat antar pertumbuhan ekonomi dan FDI serta sebaliknya.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan /Desain Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan permasalahan dalam penelitian ini digunakan literature review, sebagai analisa deduktif. Analisa ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi investasi asing langsung (*FDI*) di sektor perkebunan di Indonesia, Berdasarkan literature review tersebut maka data-data yang diketahui dapat dicari dan dapat dikumpulkan untuk digunakan dalam ekonometrika dengan teknik analisis regresi *Co-integration* dengan alasan sebab (*FDI*) di Indonesia berlangsung dalam jangka waktu yang lama/jangka panjang maka untuk melihat apakah ada hubungan yang saling mempengaruhi antara variable-variabel independen yang membuat variable variable tersebut selalu menyesuaikan dengan variable dependen dan berada tidak jauh dari rata-ratanya (nilai mean).

3.2. Perumusan Model Persamaan Faktor-Faktor Penentu FDI

$$\text{LFDIF}_t = b_0 + b_1 \text{LEXIF}_t + b_2 \text{LRGDP}_t + b_3 \text{LERUS}_t + b_4 \text{DINR}_t + b_5 \text{FINR}_t + b_6 \text{LCINP}_t + b_7 D_t + \varepsilon_t \quad (3.1)$$

dimana:

LFDIF_t = Investasi asing langsung pada sektor perkebunan (juta US \$) dalam logaritma

LEXIF_t = Nilai ekspor perkebunan Indonesia (juta US \$) dalam logaritma

LRGDP_t = Pendapatan riil dalam bentuk GDP nominal (triliun Rp.) dalam logaritma

LERUS_t = Nilai tukar rupiah terhadap US dollar Amerika dalam logaritma

DINR_t = Tingkat bunga dalam negeri untuk kredit investasi (dalam persen)

FINR_t = Tingkat bunga luar negeri untuk kredit investasi (dalam persen)

LCINP_t = Indeks harga konsumen, 2000 = 100 (dalam ratusan) dalam logaritma

D_t = Peubah dummy untuk iklim investasi Indonesia, skor 1 untuk periode krisis 1997 – 2007, dan skor 0 untuk lainnya.

t = Waktu (tahun)
 ε = Kesalahan pengganggu
 $b_0, b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6$ dan b_7 = Konstanta

3.3. Jenis dan Sumber Data:

Sumber data yang digunakan adalah semua informasi yang dibutuhkan dalam analisis ini berupa data sekunder yang merupakan publikasi yang berkaitan dengan perkembangan investasi langsung di Indonesia yang diperoleh dari BKPM, BPS, World Bank, WEF, Bank Indonesia, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, Departemen perindustrian dan besarnya perubahan indikator makro seperti tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah terhadap US \$, Inflasi yang diterbitkan oleh BPS. Data lain yang terkait dengan berbagai informasi tentang FDI dari UNCTAD, WER.

3.4. Penentuan Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian dependent dalam penelitian ini adalah Investasi Asing Langsung (FDI) dan definisi operational variable adalah besarnya jumlah dana yang dibawa oleh investor asing langsung ke Indonesia untuk investasi dalam sektor perkebunan sedangkan variable independen yang diduga mempengaruhi secara langsung investasi asing langsung (FDI) adalah, nilai ekspor perkebunan, GDP (pertumbuhan ekonomi Indonesia), nilai tukar rupiah terhadap US \$, tingkat suku bunga domestik untuk investasi dalam negeri, tingkat suku bunga luar negeri untuk investasi luar negeri, dan indeks harga konsumen. Sedangkan untuk keadaan diluar faktor ekonomi maka peneliti menggunakan variable dummy yaitu Krisis (tahun 1998 - 2007) dan Non krisis (tahun 1980 - 1997)

3.5. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.

Jenis informasi dan sumber data yang diperlukan dalam analisis ini adalah beberapa data sekunder yang dipublikasikan oleh BKPM, BPS, dan BI, dan dikelompokkan dalam data time series tahunan yang berkaitan dengan perkembangan investasi langsung pada sektor perkebunan. Data FDI yang diperoleh dari BKPM yaitu berdasarkan data persetujuan investasi asing langsung pada sektor perkebunan. Data

jumlah besaran-besaran berubah dalam makro ekonomi seperti tingkat suku bunga dalam dan luar negeri, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap US \$ dan Indeks harga konsumen yang juga dikelompokkan dalam data time series tahunan. Pengolahan selanjutnya dilakukan pengujian kointegrasi variabel dengan menggunakan program Eviews.

3.6. Metode Analisis Data

Berdasarkan literature review dan data time series yang dikumpulkan maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis regresi *Co-integration* dengan alasan bahwa investasi asing langsung (FDI) di Indonesia berlangsung dalam jangka waktu yang lama/jangka panjang sehingga menjadi penting untuk mengetahui keterkaitan antar beberapa variabel yang dapat mempengaruhi investasi tersebut dalam jangka panjang. Variabel yang berkointegrasi adalah sejumlah data time series yang dapat menyimpang dari rata-ratanya dalam jangka pendek (*short run*), akan bergerak bersama-sama dan saling menyesuaikan menuju kondisi keseimbangan (mendekati mean) dalam jangka panjang (*long run*).

3.6.1. Metode estimasi - Analisis time series model

Secara umum dalam tesis ini akan menggunakan time series model yaitu kointegrasi dengan Augmented Dickey-Fuller (ADF) dari Engle and Granger (1987). Pada umumnya data time series untuk variable makro bersifat unit root sehingga sebelum melihat kointegrasi perlu melakukan uji stasioneritas data untuk menghindari *spurious regression*.

3.6.1.1. Uji Stasioneris Data (Uji Unit Root)

Sebelum melakukan regresi terhadap persamaan yang digunakan maka sebaiknya diuji dahulu apakah variable yang digunakan stasioneris atau tidak. Manfaatnya agar regresi yang diteliti dapat bermanfaat, karena jika data tidak stasioneris maka regresi yang dihasilkan tidak bermanfaat (*spurious result*). Pengujian stasioneris data dimaksudkan untuk mengetahui sifat dan kecenderungan data yang dipergunakan, apakah mempunyai pola yang stabil/normal/stasioner atau tidak, karena data-data time series dalam bidang ekonomi pada umumnya bersifat non stasioner sehingga ketika

dipergunakan sebagai suatu variabel dalam regresi akan menghasilkan regresi yang palsu (*spurious regression*).

Untuk model regresi yang mengandung *higher order autoregressive processes*, pengujian *stationary* dapat dilakukan dengan pengujian Dickey-Fuller yang diperluas (*Augmented Dickey-Fuller Test*) dan *Philip-Perron Test*. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai ADF t-statistik dengan nilai kritis dari MacKinnon. Jika ADF t-statistik lebih besar dari nilai kritisnya maka peubah tersebut adalah stasioner (Gujarati, 1995; Banerjee, 1997).

Kestabilan suatu model time-series bermakna terkandungnya sifat *stationary* dalam model ini. Misalnya, dalam model time-series yang berikut:

$$Y_t = \beta Y_{t-1} + \mu_t; u_t \approx NID(0, \sigma^2) \dots\dots\dots (3.2)$$

NID(0, σ^2) menunjukkan adanya normal distribution dengan rata-rata = 0, varian yang tetap = σ^2 dan kovarian = 0. Kondisi *stationary* dalam model persamaan (1) ini mengandung pengertian bahwa $|\beta| < 1$. Dalam hal ini perlu dilakukan pengujian *null-hypothesis* $\beta = 1$ terhadap *alternative hypothesis* mengenai adanya *unit root*. Fuller (1976) dan Dickey dan Fuller (1979) telah mengembangkan prosedur pengujian *unit root* ini. Prosedur pengujian ini dapat diterangkan sebagai berikut:

$$Y_t = b_1 Y_{t-1} + e_{1t} \dots\dots\dots (3.3)$$

$$Y_t = a_2 + b_2 Y_{t-1} + e_{2t} \dots\dots\dots (3.4)$$

$$Y_t = a_3 + b_3 Y_{t-1} + e_{3t} \dots\dots\dots (3.5)$$

Apabila nilai absolut $\beta < 1$ dalam model persamaan (3.2), maka nilai-nilai b_i dari setiap model regresi persamaan (3.3) sampai (3.5) diperkirakan bersifat normal dan distribusi t-statistik menjadi $t_i = (b_i - \beta) / se(b_i)$ yang akan mendekati t_{n-k} di mana k bernilai 1, 2 atau 3 tergantung model regresi yang digunakan. Apabila $\beta = 1$ dan model persamaan (3.2) merupakan model yang sebenarnya, maka distribusi empirik t-statistik adalah t_i dan bukan t_{n-k} .

Misalnya, hasil-hasil regresi model persamaan (3.3) telah diperoleh dan besar sampel ialah 25 dan 100 observasi. Dengan membandingkan t-statistik yang tertera dalam tabel Dickey-Fuller dan yang dihitung melalui regresi masing-masing, dapat diambil kesimpulan mengenai keberadaan unit root. Untuk ini terdapat tiga jejeran

distribusi t-statistik dalam tabel Dickey-Fuller yaitu masing-masing untuk model regresi dengan *intercept* dan trend waktu. Masing-masing t-statistik ini dinyatakan dengan simbol-simbol $\hat{\tau}$, $\hat{\tau}_\mu$ dan $\hat{\tau}_\tau$ dalam tabel Dickey-Fuller. Kita akan menolak *null hypothesis* yang menyatakan adanya sifat *stationary* dalam model (3. 4) apabila nilai t-statistik yang diperoleh berkaitan dengan koefisien regresi model ini lebih kecil daripada $-3,00$ pada taraf nyata pada $\alpha = 0,05$.

Adakalanya dua peubah mengikuti pola tertentu disebut *random walk*, tetapi kombinasi linier antara kedua peubah ini bersifat *stationary*. Misalnya, X_t dan Y_t merupakan peubah-peubah yang bersifat *random walk*, tetapi $Z_t = X_t - \lambda Y_t$ bersifat *stationary*. Jika demikian halnya, maka dapat dikatakan bahwa X_t dan Y_t berada dalam posisi yang *co-integrated* atau saling berintegrasi. Parameter λ disebut sebagai parameter kointegrasi (*co-integrating parameter*). Parameter ini dapat ditaksir dengan regresi biasa.

Perbedaan data yang stasioner dan tidak stasioner yaitu, pada data series yang stasioner dampak shock yang terjadi pada data tersebut bersifat sementara, dan sejalan dengan waktu (dalam jangka panjang) dampak shock akan berkurang dan data series tersebut akan kembali ke *long run mean level*-nya dan berfluktuasi disekitar mean tersebut. Secara umum perilaku data series yang stasioner adalah sebagai berikut (Enders, 1995):

- a. Mean dari data series menunjukkan perilaku yang konstan
- b. Data stasioner menunjukkan *variance* yang konstan
- c. Data stasioner menunjukkan *correlogram* yang menyempit (*diminishing*) seiring dengan penambahan waktu.

Sebaliknya data yang non stasioner adalah time independent, atau cenderung mengalami perubahan yang mendasar seiring dengan jalannya waktu. Secara umum perilaku dari data yang tidak stasioner adalah sebagai berikut (Enders, 1995):

- a. data yang non stasioner tidak memiliki *long run mean*
- b. memiliki ketergantungan terhadap waktu, *variance* dari data series tersebut akan membesar tanpa batasan seiring dengan perubahan waktu
- c. *Corellogram* dari data series tersebut cenderung melebar

3.6.1.2. Uji Co-integration Data

Analisa regresi Co-Integration merupakan estimasi model ekonometrik. Dalam model ekonometrik spesifikasi model yang mengasumsikan adanya pemisahan antara variable endogen dan eksogen serta penggunaan data yang tidak stasioner masih menjadi pertanyaan. Hasil estimasi menjadi *spurious* dan inferensi statistik menjadi tidak valid karena asumsi tidak adanya variable eksogen sebagai variable penjelas dan tidak terdapat hubungan kointegrasi. Interpretasi ekonomi dari kointegrasi dapat diartikan jika dua atau lebih *series* berhubungan dalam membentuk keterkaitan jangka panjang, meskipun tidak stasioner namun dapat bergerak bersama-sama dan perbedaan diantara series tersebut akan menjadi stasioner (Harris, 1995:22).

Uji kointegrasi digunakan untuk memecahkan masalah data time series yang nonstasioner. Sebagai dasar pendekatan kointegrasi adalah bahwa sejumlah data time series yang dapat menyimpang dari rata-ratanya dalam jangka pendek, akan bergerak bersama-sama menuju kondisi keseimbangan dalam jangka panjang. Jika sejumlah variabel memiliki keseimbangan dalam jangka panjang dan saling berintegrasi pada order yang sama, dapat dikatakan bahwa variabel-variabel dalam model tersebut saling berkointegrasi.

Granger (1987) mencatat bahwa kombinasi linier dari dua atau lebih series yang tidak stasioner mungkin stasioner. Jika kombinasi linier seperti itu ada, diantara series yang tidak stasioner tersebut dikatakan berkointegrasi. Kombinasi linier yang stasioner tersebut dinamakan persamaan kointegrasi dan dapat diinterpretasikan sebagai hubungan jangka panjang diantara series, dimana deviasi dari kondisi equilibrium adalah stasioner meskipun series tersebut bersifat nonstasioner.

Interpretasi ekonomi dari kointegrasi adalah bahwa jika dua series (atau lebih) berkaitan untuk membentuk hubungan keseimbangan jangka panjang, maka walaupun masing-masing series tersebut tidak stasioner mereka akan senantiasa bergerak bersama-sama sepanjang waktu dan perbedaan diantara mereka akan senantiasa stabil (Harris : 1999:22). Dengan demikian konsep kointegrasi berkaitan dengan keberadaan keseimbangan jangka panjang dimana sistem ekonomi konvergen sepanjang waktu

seperti yang dikehendaki dalam teori dan merupakan cara untuk melakukan uji terhadap teori.

Dengan demikian apabila terjadi shock dalam suatu sistem perekonomian, maka dalam jangka panjang terdapat kekuatan yang mendorong ekonomi untuk pulih kembali ke kondisi equilibriumnya. Dengan kata lain, apabila terjadi disequilibrium dalam jangka pendek, maka akan ada kekuatan yang mendorong perekonomian menuju kondisi keseimbangannya. Penerapan teknik kointegrasi ini didasarkan atas kenyataan bahwa sebagian besar data makroekonomi mempunyai trend yang tidak stasioner (tidak stabil).

Pengujian kointegrasi data diperlukan untuk mengetahui apakah dua variable atau lebih berintegrasi bersama. Pengujian kointegrasi dapat dipandang sebagai pengujian pendahuluan untuk menghindari hasil regresi yang tidak bermanfaat (*spurious regression*) dan dianggap sebagai pengujian keseimbangan atau hubungan jangka panjang dari variable ekonomi sebagaimana didapatkan oleh teori.

Seperti dijelaskan dalam bab metodologi, bahwa pada umumnya data time series untuk variable makro bersifat unit root sehingga sebelum melihat kointegrasi perlu melakukan uji stasioneritas data. Dalam hal ini, dilakukan pengujian apakah μ_t bersifat *non-stationary* atau dengan perkataan lain dilakukan pengujian hipotesis tidak adanya *co-integration* antara X_t dan Y_t . Pengujian ini dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama dengan menggunakan sistem pengujian Dickey-Fuller dan cara kedua dengan menggunakan *Durbin-Watson statistics* yang diperoleh.

Dalam pengujian kointegrasi biasa digunakan uji Dickey-Fuller (ADF) dari Engle and Granger (1987). Dari persamaan regresi kointegrasi (persamaan 1) dapat diperoleh kesalahan pengganggu (ϵ) Uji akar unit (ADF-Augmented Dickey-Fuller (ADF)

$$\Delta Y_t = b_0 + c Y_{t-1} + d \sum_{i=1}^k \Delta Y_{t-i} + \mu_t \dots\dots\dots (3.6)$$

Dimana :

$$\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$$

Y_t = variable yang diamati tahun t

t = variable trend waktu

k = jumlah time lag

Persamaan ini adalah uji ADF dengan hanya mempertimbangkan konstanta saja . Teori *co-integration* telah dikembangkan oleh Engle dan Granger (1987), Stock (1987) dan Philips dan Durlauf (1986). Adapun pengujian kointegrasi menyangkut elemen residual dari suatu model regresi. Misalnya, dalam model regresi yang berikut:

$$X_t = \alpha + \beta Y_t + \mu_t \dots\dots\dots (3.7)$$

Melalui pengujian Dickey-Fuller, dapat ditemukan bahwa X_t dan Y_t adalah merupakan peubah-peubah *random walk*, tetapi ΔX_t dan ΔY_t bersifat *stationary*. Dengan ini maka model persamaan (2) yang disebut model regresi kointegrasi dapat ditaksir dengan prosedur μ_t bersifat *stationary*. Elemen residual ini (μ_t) tidak akan bersifat *stationary* apabila X_t dan Y_t tidak saling *co-integrated* dan sementara itu kombinasi *linear* antara keduanya pun tidak menunjukkan sifat yang *stationary*.

Cara pengujian Dickey-Fuller telah diterangkan sebelumnya. Dengan cara *Durbin-Watson statistics*, μ_t dianggap mengandung sifat *random walk* apabila *expected value* ($e_t - e_{t-1}$) sama dengan nol sehingga *Durbin-Watson statistics* akan mendekati nilai nol. Oleh sebab itu, pengujian dilakukan atas hipotesis bahwa nilai *Durbin-Watson statistics* = 0. Jika ternyata nilai *Durbin Watson statistics* lebih besar daripada nol, maka hipotesis bahwa tidak terdapat *co-integration* antara X_t dan Y_t dapat ditolak (Gujarati, 1995). Dengan lolosnya suatu persamaan dari uji kointegrasi berarti hasil dari regresi bermanfaat artinya Variabel Independent dan dependent dalam persamaan regresi *Co-integrasi* tersebut berhubungan dalam jangka panjang yaitu bahwa sejumlah data *time series* yang dapat menyimpang dari rata-ratanya dalam jangka pendek (*short run*), akan bergerak bersama-sama dan saling menyesuaikan menuju kondisi keseimbangan (mendekati mean) dalam jangka panjang (*long run*).

BAB 4

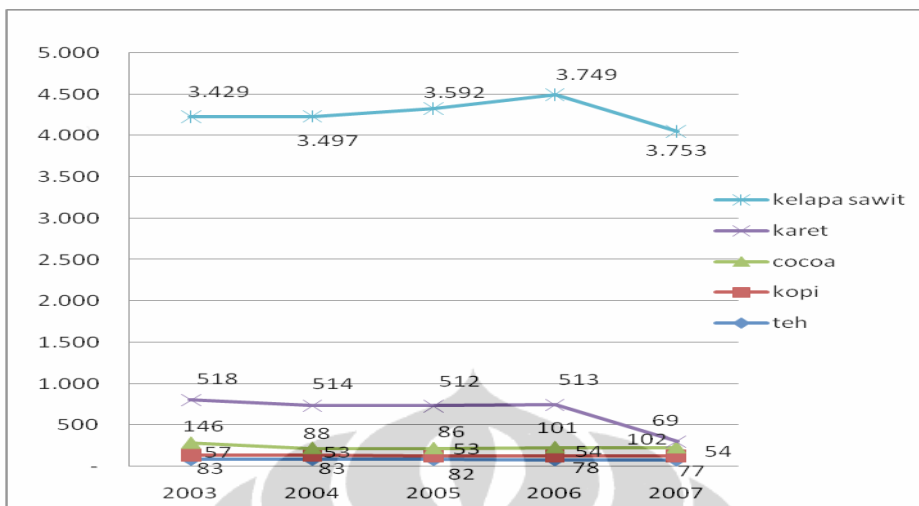
PEMBANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN DI INDONESIA

4.1. Rencana Pembangunan jangka Pendek Pemerintah Indonesia di Sektor Perkebunan.

Indonesia paling tidak membutuhkan investasi untuk pembangunan perkebunan sekitar Rp 45,180 triliun pada 2010. Dari total kebutuhan itu, Rp 1,454 triliun atau 3,22 persen disediakan APBN. "Sedangkan Rp 43,726 triliun atau 96,78 persen kami harapkan berasal dari sumber pendanaan lain," kata Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian (Deptan) Achmad Mangga Barani di Jakarta. Mangga Barani menjelaskan, sumber pendanaan lain itu bisa dari APBD, perbankan atau dari swadaya masyarakat. Dana ABPN hanya Rp 1,454 triliun. Dana itu hanya untuk kegiatan pengungkit antara lain penyediaan benih, pembinaan, pengawalan, serta monitoring dan evaluasi (monev).

Dengan dana sebesar itu, diharapkan bisa membuka kesempatan kerja baru bagi 226.000 tenaga kerja dan bisa melibatkan petani 19,78 juta keluarga. Lalu, bisa mengentaskan kemiskinan sekitar 200.000 keluarga. Sasaran lainnya adalah untuk meningkatkan pendapatan perkebunan menjadi US\$ 1.600 per keluarga per tahun per dua hektar (ha) dan penerimaan ekspor US \$ 23,48 miliar. Rencana jangka panjang pemerintah untuk merestructurisasi dan merevitalisasi sektor perkebunan adalah langkah positif yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi bertumbuh secara signifikan sesuai dengan rencana pemerintah.

Seperti telah diuraikan dalam perumusan masalah terdapat tiga komoditas perkebunan yang masuk dalam program revitalisasi Pemerintah : kelapa sawit, kakao, dan karet sejak pertengahan 2006. Ketentuan program revitalisasi sektor perkebunan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perkebunan No. 33/Permentan/OT.140/7/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 117/PMK.06/2006.



Sumber : BPS 2008.

Gambar 4.1 . Jumlah Luas Tanaman Perkebunan 5 Besar tahun 2003-2007 (dalam 000 hektar)

Setelah berjalan 3 tahun, pemerintah perlu melihat kembali sejauh mana implementasi atas program ini. Ketiga komoditas di atas merupakan primadona sektor perkebunan kita dan menduduki peringkat teratas dalam peta perkebunan dunia. Namun sayang, dalam perkembangannya, produksi ketiga komoditas perkebunan ini menunjukkan gejala penurunan. Penyebabnya adalah rendahnya produktivitas. Oleh karena itu, memang tepat apabila pemerintah mengadakan program revitalisasi untuk mengembalikan produktivitas ketiga komoditas perkebunan ini.

Indonesia adalah negara yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit terluas di dunia yaitu sekitar 6,2 juta hectare pada tahun 2008. Urutan kedua adalah Malaysia dengan 4,5 juta hektare. Pada 2008, total revitalisasi perkebunan membutuhkan pembiayaan investasi sebesar 12 triliun rupiah dengan sasaran luas areal 539.000 hektare. Sementara itu, total pembiayaan yang dibutuhkan sekitar Rp 40 triliun untuk masa hingga 2010 dengan perluasan lahan sekitar 2 juta hektare. Pasalnya, sasaran dari program revitalisasi ini, tidak hanya sekadar peningkatan produksi komoditas, tetapi juga untuk peningkatan ekonomi daerah tertentu yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Negara. Terkait dengan program revitalisasi ini, sejumlah

bank telah menyatakan komitmennya untuk terlibat. Saat ini terdapat sekitar 14 bank yang terlibat dalam program revitalisasi dengan total komitmen sekitar Rp. 34,3 triliun, di mana Bank BRI sebagai kontributor terbesar yakni sebesar Rp.12 triliun dan disusul Bank Mandiri Rp.11 triliun. Dengan demikian, masih ada kekurangan dana investasi sebesar Rp.7 triliun untuk dapat menutupi seluruh kebutuhan pembiayaan revitalisasi sektor perkebunan ini. (Bisnis Indonesia, 2008).

4.2. Peluang Investasi dan Isu Kebijakan Pemerintah di Bidang Investasi Menghadapi Krisis Global

Industri hulu perkebunan atau subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang tumbuh secara konsisten, baik ketika ekonomi nasional dalam keadaan tumbuh normal maupun ketika mengalami krisis. Pada saat kondisi ekonomi secara nasional normal, PDB subsektor perkebunan tumbuh diatas 5% per tahun. Pada saat ekonomi mengalami krisis seperti tahun 1988 dimana ekonomi nasional mengalami kontraksi sebesar 13%, subsektor perkebunan masih tumbuh 4%. Sampai tahun 2005, dengan luas areal sekitar 16.5 juta ha, subsektor perkebunan menyediakan lapangan kerja sekitar 12 juta jiwa dan nilai ekspor antara US\$ 4 - 5 juta per tahun.

Dibalik perkembangan pesat industri hulunya, industri hilir perkebunan tidak berkembang seperti yang diharapkan, baik dari sisi volume maupun diversifikasi produk. Hal ini tercermin dari penggunaan bahan baku perkebunan untuk industri hilir relatif kecil, berkisar antara 10% -30% dari total produksi. Beberapa industri hilir perkebunan yang berbasis karet bahkan mengalami kemunduran seperti diindikasikan oleh penutupan beberapa pabrik industri hilir karet. Diversifikasi produk juga masih sangat sempit dibandingkan dengan potensi kemungkinan industri hilir yang dapat dikembangkan. Sebagai contoh, lebih dari 76% penggunaan CPO oleh industri digunakan hanya untuk industri minyak goreng. Untuk karet, industri hanya terfokus pada industri ban, sedangkan kakao terfokus hanya pada *cocoa butter*.

Jika kondisi industri hilir tidak dapat berkembang, paling tidak ada tiga dampak negatif atau *economic loss* sebagai akibat dari kelambatan pengembangan industri hilir CPO. Dampak negatif pertama adalah bahwa nilai tambah yang bersumber dari industri hilir perkebunan sebagian besar dinikmati oleh negara lain yang mengembangkan industri hilirnya. Dampak negatif kedua adalah negara kehilangan peluang untuk memperoleh tambahan penerimaan dalam bentuk pajak dan kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas. Ketiga, ekspor dalam bentuk bahan baku akan sangat rentan terhadap fluktuasi harga (risiko harga) karena harganya sangat fluktuatif dengan koefisien keragaman harga tahunan diatas 30%.

Menyadari dampak negatif tersebut dan perubahan yang terjadi di pasar internasional seperti kenaikan harga minyak bumi, pemerintah berusaha mendorong perkembangan industri hilir berbasis perkebunan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Salah satu kebijakan yang menjadi isu/wacana adalah untuk menaikkan pajak ekspor (PE) produk primer perkebunan dengan harapan ketersediaan bahan baku lebih terjamin dengan harga yang lebih murah. Isu kebijakan yang muncul adalah apakah kebijakan ini efektif untuk mempercepat pengembangan industri hilir perkebunan.

Kondisi perekonomian Indonesia dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, misalnya pendapatan nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB). pendapatan nasional dan PDB yang tinggi menandakan kondisi perekonomian suatu negara sedang bergairah. Pemerintah mempunyai berbagai kebijakan untuk menjaga atau memperbaiki kualitas perekonomian Indonesia.

Yang pertama adalah kebijakan fiskal yaitu kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kebijakan fiskal mempunyai berbagai bentuk. salah satu bentuk kebijakan fiskal yang sedang marak adalah BLT. BLT diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat juga

meningkat. dengan demikian permintaan dari masyarakat juga meningkat. meningkatnya permintaan dari masyarakat akan mendorong produksi yang pada akhirnya akan memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.

Kebijakan yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan dengan sasaran mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar dapat dipengaruhi oleh Bank Indonesia. selain dengan langsung menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar, mengatur jumlah uang yang beredar juga bisa menggunakan BI Rate. BI rate adalah instrumen dari pemerintah untuk acuan seberapa besar bunga simpanan jangka pendek, misalnya Surat Berharga Indonesia. biasanya bank-bank umum akan menaikkan atau menurunkan suku bunganya seiring dengan naik atau turunnya BI Rate. maka dari itu, saat BI Rate diturunkan, suku bunga kredit juga turun, sehingga biaya investasi ikut turun. dari sini, diharapkan investasi meningkat.

Satu lagi kebijakan yang dimiliki pemerintah Indonesia adalah kebijakan sektoral. Kebijakan ini menitikberatkan pada satu dari sembilan sektor perekonomian di Indonesia. misalnya, di sektor pertanian pemerintah memberikan subsidi pupuk. Subsidi ini diberikan agar harga pupuk murah, dengan demikian pupuk akan terdorong untuk dipakai. Contoh lainnya adalah kebijakan di sektor industry dimana pemerintah membuat kebijakan kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus adalah kawasan yang khusus digunakan untuk pendirian industri. misalnya, kawasan industri Cilacap. kawasan ini mempunyai hak khusus, misalnya di Batam impor bahan mentah tidak terkena pajak, sehingga hal ini akan mendorong produksi di sana.

4.2.1. Dampak Kenaikan Pajak Ekspor Perkebunan.

Sebelum isu kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan, potensi dampak positif dan negatif serta efektivitas kebijakan tersebut terlebih dahulu perlu dianalisis sehingga kebijakan tersebut memiliki landasan pemikiran yang logis dan langkah antisipatif dapat dipersiapkan secara lebih baik. Tabel 1 berikut dapat memberi gambaran umum dari dampak penerapan tiga skenario pajak ekspor yaitu 3%, 5%, dan 7%. Dengan menggunakan kasus empat produk ekspor perkebunan utama (karet, CPO, kakao, dan kopi), kenaikan pajak ekspor akan berdampak negatif pada industri hulunya yang dicerminkan oleh penurunan harga tingkat produsen/petani, areal, produksi, dan pendapatan petani. Sebaliknya, industri hilir memperoleh beberapa manfaat seperti ketersediaan bahan baku yang lebih banyak dengan harga yang lebih rendah.

Tabel 4.1. Dampak Kenaikan Pajak Ekspor Perkebunan terhadap Beberapa Aspek Industri Perkebunan

Aspek	Dampak Pajak Ekspor (%)		
	PE = 3%	PE = 5%	PE = 7%
Areal	-1.08	-1.80	-2.52
Produksi	-1.25	-2.08	-2.91
Ekspor	-1.08	-1.81	-2.53
Harga Domestik	-1.92	-3.20	-4.48
Gross margin	-3.31	-5.27	-7.38

Sumber: Kadin 2008 (berbagai sumber data yang diolah)

Dengan menetapkan PE menjadi 5% sebagai skenario yang moderat, harga primer produk perkebunan di pasar domestik rata-rata menjadi 3.20% lebih rendah bila dibandingkan dengan tidak ada pajak ekspor. Penurunan terendah terjadi untuk karet dengan penurunan sekitar 2.60%, sedangkan tertinggi dialami oleh kopi dengan penurunan harga sekitar 3.60%.

Sebagai akibat penurunan harga produk primer perkebunan di pasar domestik, maka harga tingkat petani juga akan mengalami penurunan. Untuk CPO yang mengalami penurunan sekitar 3.20%, hal ini berarti penurunan harga TBS antara Rp 20-35 per kg, bergantung pada harga CPO. Jika harga CPO diambil rata-rata sekitar US\$ 400/ton, harga TBS akan menurun sekitar Rp 25/kg. Untuk produk lain, penurunan harga berkisar antara 3.4%-3.6%. Harga karet (100% karet kering) menurun sekitar Rp 520/kg, sedangkan kopi dan kakao menurun masing-masing Rp 378 dan Rp 476 per kg.

Penurunan harga di tingkat produsen sebagai akibat kenaikan PE selanjutnya akan memberikan disinsentif pada investasi (perluasan areal) di industri hulu, penurunan produktivitas, dan produksi. Dengan PE 5%, areal perkebunan akan menjadi rata-rata 1.80% lebih rendah. Dampak paling kecil terjadi pada kelapa sawit dengan penurunan sekitar 0.95%, sedangkan tertinggi diderita oleh areal kopi dengan penurunan sekitar 3.25%.

Penurunan areal sebagai akibat kenaikan PE tersebut selanjutnya menjadikan produksi menurun sebagai akibat penurunan areal dan produktivitas. Dengan PE 5%, produksi perkebunan akan menurun rata-rata dengan 2.08%. Penurunan terendah terjadi untuk tanaman karet dengan penurunan 0.65% dan kopi mengalami penurunan tertinggi yaitu sekitar 3.65%. Resultan dampak negatif dari kenaikan PE adalah pada pendapatan petani dalam bentuk penurunan *gross margin* (penerimaan kotor) sebagai akibat penurunan harga dan produktivitas. Kenaikan PE menjadi 5% akan membuat *gross margin* pekebun menurun antara 3.25% - 7.25%. Secara nominal, penurunan *gross margin* berkisar antara Rp 400 ribu – Rp 890 ribu per ha per tahun, bergantung komoditi, atau dengan penurunan *gross margin* rata-rata Rp 640 ribu per ha per tahun.

Dampak positif dari kebijakan dalam bentuk penurunan harga produk perkebunan di pasar domestik, membuat harga produk hilirnya menjadi menurun. Sebagai contoh, penerapan PE sebesar 5% akan menyebabkan penurunan harga

minyak goreng sebesar 2.03%. Penurunan harga minyak goreng sebagai salah satu kebutuhan pokok tentu akan mempunyai nilai strategis baik secara ekonomi, sosial, dan politik.

4.2.2. Efektivitas Mendorong Pertumbuhan Industri Hilir

Kebijakan menaikkan PE (Pajak Ekspor) untuk mendorong pertumbuhan industri hilir dilandasi pemikiran bahwa kenaikan PE akan lebih menjamin ketersediaan bahan baku dengan harga yang lebih rendah. Kenaikan PE akan menghambat ekspor sehingga ketersediaan bahan baku di dalam negeri akan meningkat dengan harga yang lebih murah. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan PE antara 3%-7%, ekspor hanya menurun antara 0.3% -4.62%. Dengan perkataan lain, ekspor tidak elastis terhadap perubahan PE karena kenaikan rata-rata 1% PE hanya menurunkan ekspor rata-rata sekitar 0.36%. Dengan ilustrasi PE = 5%, ekspor kopi hanya menurun sekitar 0.50%. Penurunan ekspor terbesar dialami oleh kakao yaitu 3.30%. Dengan demikian, usaha membendung ekspor produk primer perkebunan dengan menaikkan PE tidak akan efektif, terlebih lagi ketika harga produk primer perkebunan relatif tinggi sejak tahun 2005. Di samping itu, dengan elastisitas ekspor terhadap perubahan harga ekspor umumnya *inelastic* (elastisitas antara 0.10-0.66), maka beban akibat kenaikan PE akan sebagian besar akan menjadi beban eksportir yang selanjutnya akan ditransfer ke produsen.

Di sisi lain, beberapa hasil studi, pertemuan pelaku dan tenaga ahli, dan diskusi mengenai upaya pengembangan industri hilir perkebunan pada periode 2002-2004, tidak menempatkan pajak ekspor sebagai instrumen utama untuk memacu pertumbuhan industri hilir. Dari studi dan pertemuan tersebut, dapat disintesa ada lima faktor utama yang dinilai menghambat perkembangan industri hilir. Hambatan tersebut adalah (1) lemahnya penguasaan/akses pasar, (2) tarif impor bahan baku dan penolong yang tinggi; (3) disharmoni tarif impor; dan (4) kurangnya insentif investasi. Masalah lain adalah masalah mental yaitu kebanyakan pengusaha dinilai bermental *rent seeker*, bukan bermental industrialis yang bangga akan pengembangan

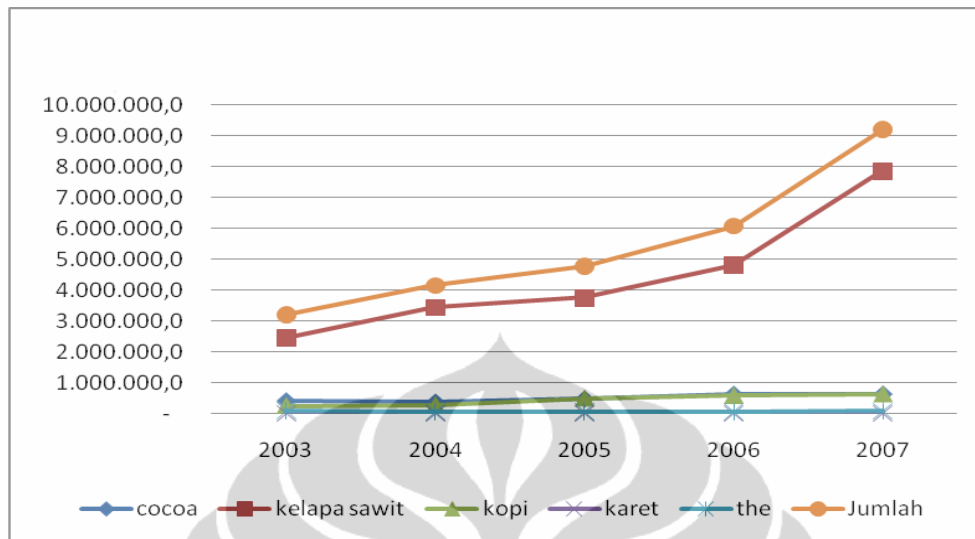
produk. Pasar industri hilir perkebunan umumnya dikuasai oleh beberapa perusahaan multinasional di negara maju seperti Amerika, Eropa Barat (Jerman, Belanda, Swiss dan Perancis), Jepang, dan Korea. Produsen industri hilir perkebunan Indonesia menghadapi kesulitan untuk menembus pasar dunia karena perusahaan multinasional tersebut sudah demikian kuat menguasai pasar industri perkebunan seperti oleo kimia, industri ban, dan berbagai produk coklat.

Tarif impor untuk peralatan/mesin dan bahan penolong relatif tinggi yang diindikasikan oleh koefisien proteksi input nominal (*nominal protection coefficient on tradable inputs*) yang lebih besar dari 1 yaitu 1.14. Masalah ini menjadi semakin signifikan ketika tarif berbagai produk yang berbasis perkebunan cenderung tidak dilandasi oleh pendekatan *tariff escalation* yang umumnya diterapkan oleh negara pesaing. Hal ini membuat industri hilir CPO Indonesia tidak kompetitif. Akhirnya, disinsentif dalam bentuk perpajakan dan infrastruktur yang belum memadai serta ekonomi biaya tinggi untuk mengembangkan industri hilir dinilai para investor masih cukup signifikan menghambat minat investor.

4.3. Sasaran Pembangunan di Sektor Perkebunan tahun 2010

Departemen Pertanian tahun 2010 menargetkan, ada revitalisasi perkebunan 364.000 ha, pengembangan kapas 19,430 ha dengan produksi 26.990 ton. Juga gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao 145.000 ha, dan pengembangan kopi specialty seluas 5.323 ha. Selain itu, diharapkan akan terjadi peningkatan produksi gula 2,96 juta ton atau naik sekitar 4,1 persen jika dibandingkan total produksi tahun ini mencapai 2,85 juta ton.

Peningkatan produksi diharapkan akan terjadi pada komoditas minyak sawit mentah (*crude palm OJ//CPO*) 20,51 juta ton atau naik sekitar 5,5 persen jika dibandingkan produksi tahun ini 19,44 juta ton. Tahun 2010 diproyeksikan terjadi perluasan area perkebunan 6,3 persen atau menjadi 20.791,78 juta ha tahun ini, total perkebunan 13 komoditas perkebunan 19.556,69 juta ha. Potensi penambahan luas lahan perkebunan ini, ucap Mangga Barani, sangat besar. Sebab, untuk tiga komoditas unggulan nasional (sawit, karet, dan kakao) masih ada potensi 11 juta ha.



Sumber BPS, 2008.

Gambar 4.2. Eksport 5 hasil Perkebunan di Indonesia (dalam nilai FOB 000 \$ US) 2003 - 2007

Melihat perkembangan 5 hasil perkebunan yang cukup potensial yaitu coklat, kelapa sawit, kopi, karet, dan teh maka pemerintah bertekad untuk melakukan berbagai kebijakan yang dapat memicu pertumbuhan sektor perkebunan. Oleh karena itu disusunlah Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan Tahun 2010. Saat ini Indonesia paling tidak membutuhkan investasi untuk pembangunan di sektor perkebunan sekitar Rp. 45,180 triliun pada 2010. Dari total kebutuhan itu, Rp 1,454 triliun atau 3,22 persen disediakan APBN. "Sedangkan Rp 43,726 triliun atau 96,78 persen kami harapkan berasal dari sumber pendanaan lain," kata Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian (Deptan) Achmad Mangga Barani di Jakarta. Mangga Barani menjelaskan, sumber pendanaan lain itu bisa dari APBD, perbankan atau dari swadaya masyarakat. Dana ABPN hanya Rp 1,454 triliun. Dana itu hanya untuk kegiatan pengungkit antara lain penyediaan benih, pembinaan, pengawalan, serta monitoring dan evaluasi (monev).

Dengan dana sebesar itu, pemerintah mengharapkan bisa membuka kesempatan kerja baru bagi 226.000 tenaga kerja dan bisa melibatkan petani 19,78 juta keluarga. Serta mampu mengentaskan kemiskinan sekitar 200.000 keluarga.

Sasaran lainnya adalah untuk meningkatkan pendapatan perkebunan menjadi US\$ 1.600 per keluarga per tahun per dua hektar (ha) dan penerimaan ekspor US \$ 23,48 miliar. Departemen Pertanian tahun 2010 menargetkan, ada revitalisasi perkebunan 364.000 ha, pengembangan kapas 19.430 ha dengan produksi 26.990 ton. Juga gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao 145.000 ha, dan pengembangan kopi specialty seluas 5.323 ha.

Selain itu, diharapkan akan terjadi peningkatan produksi gula 2,96 juta ton atau naik sekitar 4,1 persen jika dibandingkan total produksi tahun ini mencapai 2,85 juta ton. Peningkatan produksi diharapkan akan terjadi pada komoditas minyak sawit mentah (crude palm OJ//CPO) 20,51 juta ton atau naik sekitar 5,5 persen jika dibandingkan produksi tahun ini 19,44 juta ton. Dari pengembangan eksport maka minyak sawit menjadi prioritas yang utama mengingat harga CPO sangat membantu peningkatan hasil perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia . Tahun depan diproyeksi terjadi perluasan area perkebunan kelapa sawit dari 6,3 persen atau menjadi 20.791,78 juta ha tahun ini, total perkebunan 13 komoditas perkebunan 19.556,69 juta ha. Potensi penambahan luas lahan perkebunan ini, ucap Mangga Barani, sangat besar. Sebab, untuk tiga komoditas unggulan nasional (sawit, karet, dan kakao) masih ada potensi 11 juta ha. Dari data Departemen Pertanian tersebut maka Sasaran Pembangunan Perkebunan tahun 2010 adalah:

1. Pertumbuhan pertanian, perikanan dan kehutanan 4,6%, Perkebunan 10,84 % (berdasarkan harga berlaku) dan harga konstan 2,97%
2. Kesempatan Kerja baru 226 ribu TK, dengan melibatkan petani 19,78 juta KK
3. Peningkatan Pendapatan Pekebun menjadi US \$ 1.600/KK/Thn/2 ha
4. Pengentasan Kemiskinan 200.000 KK
5. Penerimaan Ekspor US \$ 23,48 milyar
6. Revitalisasi Perkebunan 364.000 ha
7. Akselerasi peningkatan produksi gula 2,96 juta ton
8. Produksi Kelapa Sawit (CPO) 20,51 juta ton
9. Pengembangan kapas 19.430 ha dengan produksi 26.990 ton

10. Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional 145.000 ha

11. Pengembangan kopi specialty seluas 5.323 ha

Langkah-langkah penyelamatan sektor perkebunan dalam menghadapi krisis Global sebaiknya dipersiapkan dengan mendesain strategi-strategi pembangunan jangka panjang dan menengah dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Indonesia. Peningkatan daya saing baik dari iklim investasi serta hasil produksi perkebunan yang semakin bervariasi dan berkualitas diharapkan dapat ditingkatkan melalui program revitalisasi dan restrukturisasi sektor perkebunan. Rehabilitasi perkebunan yang sudah tidak produktif atau rusak merupakan langkah yang bijak dalam mempersiapkan produksi yang akan datang . Pembangunan sarana dan prasarana pendukung (infrastruktur) yang memadai dan mencapai pelosok-pelosok daerah yang mempunyai potensi di sektor perkebunan harus menjadi prioritas utama pembangunan jangka pendek dan menengah pemerintah SBY-Boediono.

Pembangunan kluster industri hilir kelapa sawit di Dumai, Riau akan membutuhkan dana sebesar Rp20 triliun (\$3 milyar). Herliyan Saleh, Kepala Kantor Perdagangan dan Industri Propinsi Riau yang dikutip oleh Asia Pulse mengatakan, dana tersebut dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur jalan raya, pelabuhan, fasilitas pengolahan air bersih dan pabrik pengolahan baru. Herliyan mengatakan, beberapa pengusaha kelapa sawit skala besar telah menunjukkan minatnya untuk melakukan investasi di proyek tersebut. PT Wilmar, misalnya, telah menanamkan investasinya sebesar Rp7 triliun untuk pembangunan fasilitas pelabuhan dan meningkatkan kapasitas produksi. Tingginya minat investor telah mendorong pihak perbankan untuk ikut serta dalam pendanaan proyek tersebut. Dukungan dari pemerintah yang menetapkan Dumai sebagai pusat dari perluasan industri hilir kelapa sawit sangat dibutuhkan.

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Perkembangan Investasi Asing Langsung (FDI) di Indonesia di sektor perkebunan.

Sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2007 perkembangan Investasi Asing langsung (FDI) mengalami pasang surut. Perkembangan ini dapat dilihat pada **Table 5.1**.

Tabel 5.1. Perkembangan Investasi Asing Langsung (FDI) sector perkebunan di Indonesia. (juta US \$)

No.	Thn Obs	realisasi (juta US\$) FDI
1	1980	1,199.6
2	1981	1,455.7
3	1982	1,766.6
4	1983	2,143.8
5	1984	2,601.5
6	1985	3,157.0
7	1986	3,831.2
8	1987	4,649.2
9	1988	5,641.9
10	1989	6,846.6
11	1990	6,806.28
12	1991	1,097.59
13	1992	27,795.53
14	1993	41,989.63
15	1994	56,183.73
16	1995	129,673.10
17	1996	72,094.39
18	1997	2,365.19
19	1998	28,603.77
20	1999	45,271.67
21	2000	68,591.86
22	2001	64,070.95
23	2002	8,955.98
24	2003	219,177.47
25	2004	160,964.05
26	2005	171,557.75
27	2006	351,917.75
28	2007	219,080.07



Sumber : BPS.

Gambar 5.1. FDI di Sektor Perkebunan di Indonesia (juta US \$)

Dari table 5.1 dan grafik 5.1 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1980 sampai dengan 1991, FDI di sektor perkebunan tidak mengalami perkembangan yang berarti. Ketentuan-ketentuan investasi asing di Indonesia dalam kurun waktu tersebut didasarkan pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1/1967 dengan beberapa penyesuaian UU No. 11/1970 tentang Perubahan Dan Tambahan UU No.1/1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Ketentuan-ketentuan tersebut dirasa tidak cukup kondusif untuk menarik FDI ke Indonesia

Namun kemudian, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah yang menjamin investor asing bisa memiliki hingga 95% saham perusahaan yang bergerak dalam bidang "... *pelabuhan; produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik umum; telekomunikasi; penerbangan, pelayaran, KA; air minum, pembangkit tenaga nuklir; dan media masa*" (PP No. 20/1994 Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1). Hal ini mulai mengerakkan FDI ke Indonesia terutama di sektor perkebunan. Pada tahun 1992 sampai dengan puncaknya tahun 1995 FDI mencapai angka **129,673.10 juta US \$**.

Pada periode 1996 sampai dengan 1997 dimana terjadi krisis politik yang diakhiri dengan runtuhnya orde baru terlihat kecenderungan FDI menurun sampai hanya sekitar 2,365.19 juta US \$.

Pada pemerintahan Presiden Gus Dur (1999) dan dilanjutkan dengan Presiden Megawati 2003 perkembangan FDI di sektor perkebunan mulai mengalami perkembangan yang berarti sehingga bisa ditingkatkan mencapai nilai sampai 219,177.47 Juta US \$. Pada pemerintahan SBY yang dimulai sejak 2004 program revitalisasi sektor perkebunan mulai dilakukan dan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perkebunan No. 33/Permentan/OT.140/7/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 117/PMK.06/2006.

5.2. Hasil Estimasi Model Ekonometrika

Faktor-faktor Ekonomi yang mempengaruhi investasi asing langsung (*foreign direct investment FDI*) di sektor perkebunan di Indonesia

Bagian ini akan memberikan penjelasan mengenai penggunaan model regresi *Co-Integration* sehingga didapatkan arah dan besaran dari pengaruh nilai ekspor, pendapatan nasional riil, kurs valuta asing, tingkat bunga kredit dan tingkat harga terhadap investasi asing langsung/FDI di sektor perkebunan di Indonesia. Dalam mengetahui pola, bagaimana dan sejauh mana faktor ekonomi (*variable independen*) mempengaruhi FDI pada sektor perkebunan, berdasarkan pada analisa regresi *Co-Integration* serta sekaligus melakukan analisa diskriptif atas faktor-faktor tersebut serta analisa perkembangan investasi asing langsung pada sektor perkebunan di Indonesia.

Dalam menjelaskan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi investasi asing langsung/FDI di sektor perkebunan di Indonesia akan difokuskan pada faktor nilai ekspor, pendapatan nasional riil, kurs valuta asing, tingkat bunga kredit dan tingkat harga. Dalam mengetahui pola, bagaimana dan sejauh mana faktor ekonomi

(variable independen) mempengaruhi FDI pada sektor perkebunan, berdasarkan pada analisa regresi Co-Integration.

1. Analisa Regresi Co-Integration

Analisa regresi *Co-Integration* merupakan estimasi model ekonometrik. Dalam model ekonometrik spesifikasi model yang mengasumsikan adanya pemisahan antara variable endogen dan eksogen serta penggunaan data yang tidak stasioner masih menjadi pertanyaan. Hasil estimasi menjadi *spurious* dan inferensi statistik menjadi tidak valid karena asumsi tidak adanya variable eksogen sebagai variable penjelas dan tidak terdapat hubungan kointegrasi. Interpretasi ekonomi dari kointegrasi dapat diartikan jika dua atau lebih *series* berhubungan dalam membentuk keterkaitan jangka panjang, meskipun tidak stasioner namun dapat bergerak bersama-sama mendekati *mean* nya dan perbedaan diantara series tersebut akan menjadi stasioner (Harris, 1995:22). Uji kointegrasi digunakan untuk memecahkan masalah data time series yang nonstasioner. Sebagai dasar pendekatan kointegrasi adalah bahwa sejumlah data time series yang dapat menyimpang dari rata-ratanya dalam jangka pendek, akan bergerak bersama-sama menuju kondisi keseimbangan (*equilibrium*) dalam jangka panjang. Jika sejumlah variabel memiliki keseimbangan dalam jangka panjang dan saling berintegrasi pada order yang sama, dapat dikatakan bahwa variabel-variabel dalam model tersebut saling berkointegrasi.

Granger (1987) mencatat bahwa kombinasi linier dari dua atau lebih series yang tidak stasioner mungkin stasioner. Jika kombinasi linier seperti itu ada, diantara series yang tidak stasioner tersebut dikatakan berkointegrasi. Kombinasi linier yang stasioner tersebut dinamakan persamaan kointegrasi dan dapat diinterpretasikan sebagai hubungan jangka panjang diantara series, dimana deviasi dari kondisi equilibrium adalah stasioner meskipun series tersebut bersifat nonstasioner.

Interpretasi ekonomi dari kointegrasi adalah bahwa jika dua series (atau lebih) berkaitan untuk membentuk hubungan keseimbangan jangka panjang, maka walaupun masing-masing series tersebut tidak stasioner mereka akan senantiasa bergerak bersama-sama sepanjang waktu dan perbedaan diantara mereka akan

senantiasa stabil (Harris : 1999:22). Dengan demikian konsep kointegrasi berkaitan dengan keberadaan keseimbangan jangka panjang dimana sistem ekonomi konvergen sepanjang waktu seperti yang dikehendaki dalam teori dan merupakan cara untuk melakukan uji terhadap teori.

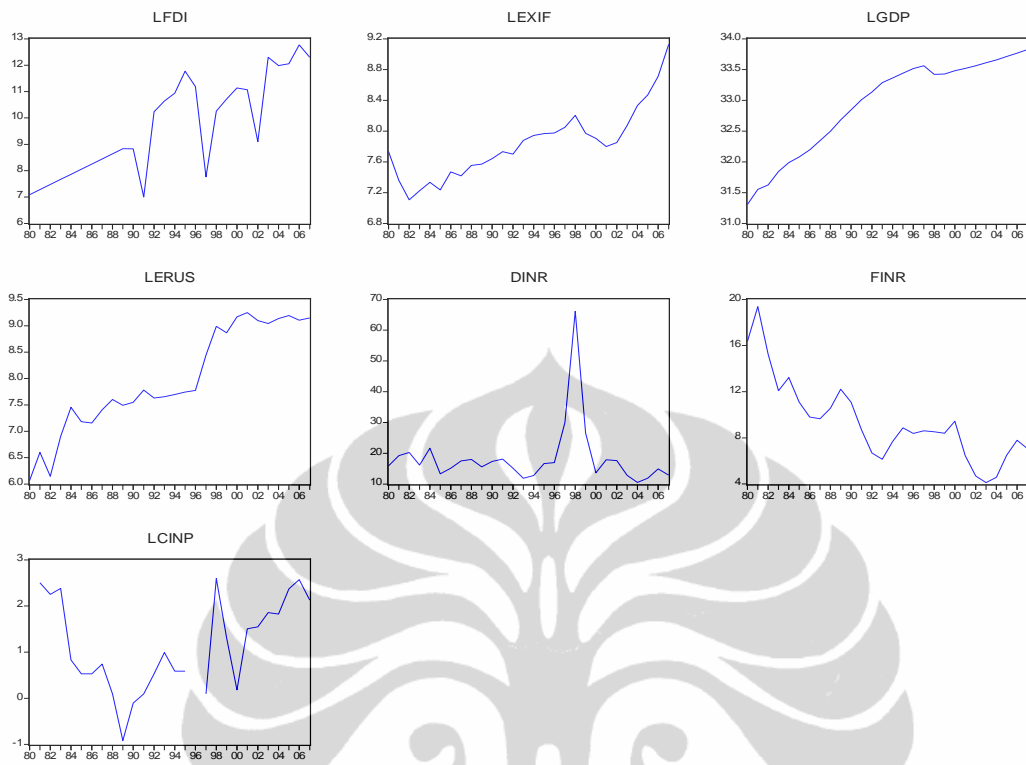
Dengan demikian apabila terjadi shock dalam suatu sistem perekonomian, maka dalam jangka panjang terdapat kekuatan yang mendorong ekonomi untuk pulih kembali ke kondisi equilibriumnya. Dengan kata lain, apabila terjadi disequilibrium dalam jangka pendek, maka akan ada kekuatan yang mendorong perekonomian menuju kondisi keseimbangannya. Penerapan teknik kointegrasi ini didasarkan atas kenyataan bahwa sebagian besar data makroekonomi mempunyai trend yang tidak stasioner (tidak stabil).

Seperti dijelaskan dalam bab metodologi, bahwa pada umumnya data time series untuk variable makro bersifat unit root sehingga sebelum melihat kointegrasi perlu melakukan uji stasioneritas data.

2. Pengujian Stasioneritas (*Unit Root*)

Ada dua jenis pengujian akar unit yaitu menggunakan ADF dan PP. Hasil pengujian akar unit data dapat dilihat pada **Tabel 5.2**.

Uji akar-akar unit merupakan uji stasioneritas data yang dimaksudkan untuk mengamati apakah koefisien tertentu dari model otoregresif yang ditaksir memiliki nilai satu atau tidak. Perilaku data dari masing-masing variabel dapat dilihat pada **Gambar 5.2** yang menunjukkan bahwa semua data bergerak menjauhi rata-ratanya. Hal ini mengindikasikan bahwa semua variabel belum stasioner pada *level*.



Sumber : Hasil Estimasi Model

Gambar 5.2 Perilaku Data Pada Level

Sedangkan hasil uji akar-akar unit pada masing-masing variabel ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5.2. Hasil Uji Stasioneritas Data

No.	Nama Variabel	Hasil Tes ADF	Hasil Tes PP
1	LFDI	Stasioner pada <i>first difference</i> *	Stasioner pada <i>first difference</i> *
2	LEXIF	Stasioner pada <i>first difference</i> *	Stasioner pada <i>first difference</i> *
3	LGDP	Stasioner pada <i>first difference</i> *	Stasioner pada <i>first difference</i> *
4	LERUS	Stasioner pada <i>first difference</i> *	Stasioner pada <i>first difference</i> *
5	DINR	Stasioner pada <i>first difference</i> *	Stasioner pada <i>first difference</i> *
6	FINR	Stasioner pada <i>first difference</i> *	Stasioner pada <i>first difference</i> *
7	LCINP	Stasioner pada <i>first difference</i> *	Stasioner pada <i>first difference</i> *

Keterangan : * stasioner pada α (1%), ** stasioner pada α (5%), *** stasioner pada α (10%)

Berdasarkan hasil pengujian *unit root* (perhatikan **Tabel 5.2**) terlihat bahwa semua data tidak stasioner pada nilai *level* dan data stasioner pada *first difference*-nya. Dengan hasil tersebut dan guna menghindari fenomena regresi palsu maka sebaiknya spesifikasi model mengalami perubahan dengan menerapkan bentuk *first difference*-nya ketika datanya tidak stasioner dalam *level*.

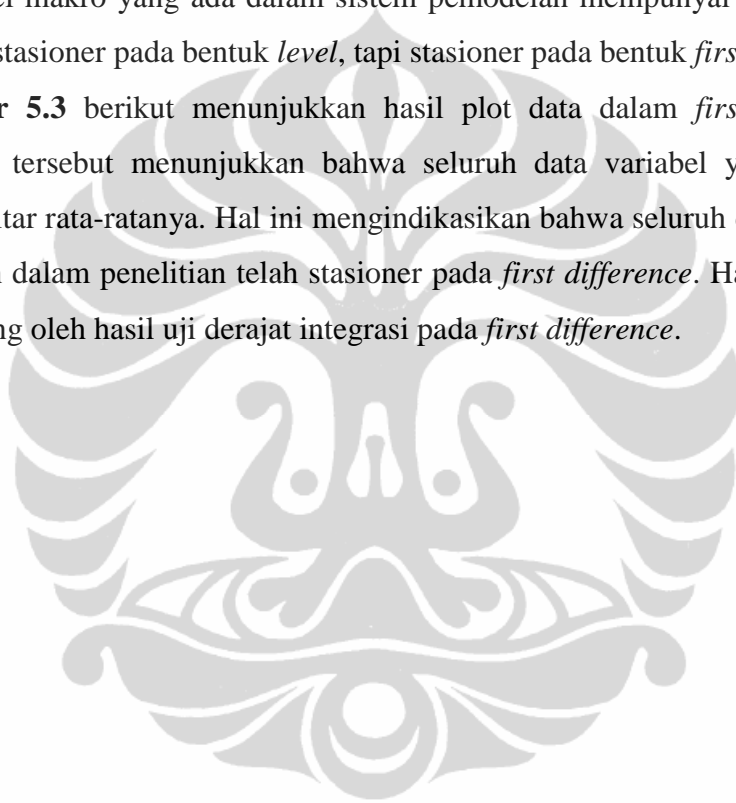
Namun demikian spesifikasi model dapat tetap dipertahankan tanpa menerapkan bentuk *first difference*-nya apabila dalam persamaan tersebut terkointegrasi.

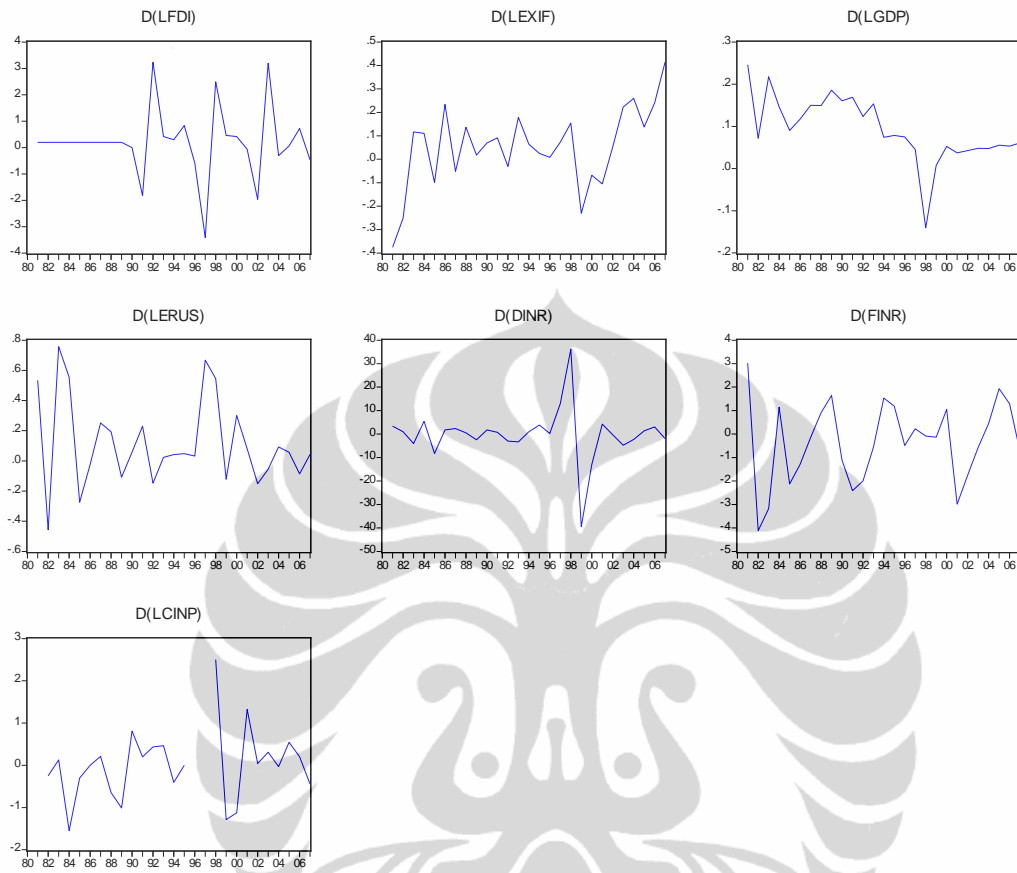
Pengamatan karakteristik perkembangan suatu variabel merupakan tahap awal yang sangat penting. Untuk itu, sebagai perbandingan, uji stasioneritas juga dilakukan dengan menggunakan beberapa metode lain, yaitu metode non-parametrik *Phillips-Perron* (PP) *test*. Dengan adanya kemungkinan terjadinya perubahan perilaku data, metode tersebut dapat diterapkan dengan kemampuan untuk mengontrol terjadinya serial korelasi derajat tinggi dari perilaku *error terms*.

PP-test didasarkan pada regresi persamaan dengan AR(1) seperti halnya pada *non-augmented Dickey-Fuller test*, sementara koreksi non-parametrik dilakukan pada statistik-t dari koefisien regresi dengan menggunakan taksiran dari spektrum pada frekuensi nol, yang handal terhadap permasalahan heteroskedastisitas dan otokorelasi (dengan pola yang tidak diketahui).

Dalam penelitian ini, hasil pengujian ADF-test dan PP test, yaitu bahwa variabel-variabel makro yang ada dalam sistem pemodelan mempunyai katakteristik I(1), yaitu non-stasioner pada bentuk *level*, tapi stasioner pada bentuk *first difference*.

Gambar 5.3 berikut menunjukkan hasil plot data dalam *first difference*. Dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa seluruh data variabel yang diamati bergerak di sekitar rata-ratanya. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh data variabel yang digunakan dalam penelitian telah stasioner pada *first difference*. Hasil plot data ini juga didukung oleh hasil uji derajat integrasi pada *first difference*.





Sumber : Hasil Estimasi Model

Gambar 5.3 Perilaku Data Pada *Firt Difference*

3. Model Regresi *Co-Integration*

Pengujian Melalui Dickey-Fuller terhadap kointegrasi dilakukan terhadap residual model bersifat *stationary*. Dengan ini maka model terkointegrasi dalam model regresi kointegrasi dapat ditaksir dengan prosedur μ_t bersifat *stationary*. Elemen residual ini (μ_t) tidak akan bersifat *stationary* apabila variabel independen dan variabel dependen tidak saling *co-integrated* dan sementara itu kombinasi *linear* antara keduanya pun tidak menunjukkan sifat yang *stationary*. Dalam hal ini, dilakukan pengujian apakah μ_t bersifat *non-stationary* atau dengan perkataan lain dilakukan pengujian hipotesis tidak adanya *co-integration* antara variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 5.3. Hasil Uji Stasioneritas residual

No.	Nama Variabel	Hasil Tes ADF	Hasil Tes PP
1	Residual	Stasioner pada <i>level</i> *	Stasioner pada <i>level</i> *

Keterangan : *stasioner pada α (1%), **stasioner pada α (5%), ***stasioner pada α (10%)

Berdasarkan hasil pengujian *unit root* (perhatikan **Tabel 5.3**) terlihat bahwa residual stasioner pada nilai *level* dengan perkataan lain adanya *co-integration* antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan lolosnya suatu persamaan dari uji kointegrasi berarti hasil dari regresi bermanfaat. Peubah bebas dan peubah tidak bebas dalam persamaan regresi kointegrasi memiliki hubungan jangka panjang (*long-run relationship*). Berdasarkan hasil pengujian diatas, yaitu ADF & PP test menguji stasioneritas residual persamaan model faktor-faktor penentu FDI dan pengujian *Co-integration* dengan kesimpulan terdapat kointegrasi dalam persamaan model faktor-faktor penentu FDI dapat diestimasi tanpa menerapkan bentuk *first difference*-nya pada variabel yang datanya tidak stasioner.

4. Hasil Model Regresi *Co-Integration* Terpilih

Setelah data diuji stasioneritasnya yang menyimpulkan bahwa data stasioner pada *first difference* dan pengujian kointegrasi data-data yang terdapat pada model faktor-faktor penentu FDI dihasilkan bahwa persamaan terkointegrasi, maka fenomena regresi palsu dapat dihindari dan penerapan bentuk model faktor-faktor penentu FDI sektor perkebunan di Indonesia tanpa harus menerapkan bentuk *first difference*-nya pada variabel yang datanya tidak stasioner.

Tabel 5.4. Hasil Persamaan Model Faktor-Faktor Penentu FDI¹

Variabel	Tanda koefisien ekonomi	Persamaan LFDI			
		Koef.Regresi	Prob. t-stat	t-stat	Uji Hipotesis
LGDP	+	1,946	0,091	1,789	Signifikan 10%
DINR	-	-0,039	0,067	-1,948	Signifikan 10%
LCINP	+	0,747	0,021	2,517	Signifikan 5%
DKRISIS	-	-2,070	0,043	-1,841	Signifikan 5%
<i>R-squared</i>		0,805442	<i>Durbin-Watson stat</i>		2.167292
<i>Adjusted R-squared</i>		0,729780	<i>Prob(F-statistic)</i>		0,000028

Sumber: Hasil Estimasi Model

Tabel 5.5. Matriks Korelasi Persamaan Model Faktor-Faktor Penentu FDI

	LEXIF	LGDP	LERUS	DINR	FINR	LCINP
LEXIF	1	-0.497	0.800	-0.272	-0.637	0.302
LGDP	-0.497	1	-0.702	-0.230	0.522	-0.247
LERUS	0.800	-0.702	1	-0.154	-0.768	0.190
DINR	-0.272	-0.230	-0.154	1	0.347	-0.166
FINR	-0.637	0.522	-0.768	0.347	1	-0.025
LCINP	0.302	-0.247	0.190	-0.166	-0.025	1

Sumber: Hasil Estimasi Model

¹ Persamaan ini merupakan hasil terbaik yang didapatkan dari estimasi co-integrasi dengan memenuhi kriteria terbebas fenomena regresi palsu, evaluasi statistik, evaluasi ekonomi, dan evaluasi ekonometrik.

Beberapa hasil temuan untuk persamaan model faktor-faktor penentu FDI adalah sebagai berikut.

Pertama, persamaan model faktor-faktor penentu FDI yang didapatkan dari co-integration telah melalui uji stasioneritas data dan kointegrasi. Dengan lolosnya suatu persamaan dari uji kointegrasi berarti hasil dari regresi bermanfaat, bahwa sejumlah data variable independent time series yang dapat menyimpang dari rata-ratanya dalam jangka pendek (*short run*), akan bergerak bersama-sama dan saling menyesuaikan menuju kondisi keseimbangan (mendekati mean) dalam jangka panjang (*long run*).

Kedua, bahwa hasil evaluasi statistik menunjukkan bahwa persamaan FDI yang digunakan memiliki nilai *R-squared*, *F-statistic* dan *t-statistic* yang baik. Nilai *R-squared* sebesar 0,81 menunjukkan bahwa 81 persen keragaman variabel FDI mampu dijelaskan oleh variabel bebas dalam model, sementara 19 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai *Prob(F-statistic)* sebesar 0,000028 menunjukkan bahwa secara bersama-sama semua variabel bebas dalam model signifikan mempengaruhi variabel FDI. Sementara itu, nilai *t-statistic* pada semua variabel bebas menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas mempengaruhi variabel FDI pada taraf nyata 10 persen. kecuali variabel Konstanta, Nilai Ekpor perkebunan, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, dan tingkat suku bunga luar negeri tidak signifikan.

Ketiga, hasil evaluasi ekonomi menunjukkan bahwa tanda koefisien sebagian besar variabel bebasnya sesuai dengan teori ekonomi. Tanda koefisien yang positif pada sebagian besar variabel bebas mengartikan bahwa jika variabel-variabel tersebut mengalami peningkatan maka FDI juga akan mengalami peningkatan. Dan sebaliknya jika variabel-variabel tersebut mengalami penurunan maka FDI juga akan menurun. Sedangkan tanda koefisien yang negatif pada variabel bebas mengartikan bahwa jika variabel-variabel tersebut mengalami peningkatan maka FDI akan mengalami penurunan dan sebaliknya jika variabel-variabel tersebut mengalami penurunan maka FDI juga akan mengalami peningkatan. Sementara itu, tanda negatif pada variabel *dummy* krisis (Dkrisis) mengartikan bahwa untuk semua variabel bebas

(kecuali variabel *dummy* itu sendiri) yang sama, secara rata-rata nilai FDI pada periode setelah krisis akan lebih rendah apabila dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis.

Keempat, evaluasi ekonometrika menunjukkan bahwa model tidak memiliki masalah autokorelasi² dan heteroskedastisitas³. Sementara itu, nilai koefisien korelasi antara variabel LERUS dan LEXIF mengindikasikan kemungkinan adanya masalah multikolinieritas, namun hal ini dapat diabaikan karena nilai *R-squared* masih jauh lebih besar daripada koefisien korelasinya⁴.

Kelima, arti besaran parameter dan signifikansi variabel bebas didapatkan:

1. Variable LGDP secara statistik signifikan mempengaruhi besarnya FDI. Nilai koefisien sebesar 1,946, mengartikan bahwa jika LGDP meningkat sebesar 1 persen maka akan meningkatkan nilai FDI sebesar 1. 946 persen.
2. Variable DINR secara statistik signifikan mempengaruhi besarnya FDI. Nilai koefisien sebesar -0,039, mengartikan bahwa jika DINR meningkat sebesar 1 persen maka akan menurunkan FDI sebesar 0.039 persen.
3. Variable LCINP secara statistik signifikan mempengaruhi besarnya FDI. Nilai koefisien sebesar 0,747, mengartikan bahwa jika LCNP_2000 meningkat sebesar 1 persen maka akan meningkatkan FDI sebesar 0.747 persen.
4. Variabel DKRISIS secara statistik mempengaruhi besarnya FDI . Nilai koefisien sebesar -2.070 mengartikan bahwa jika terjadi Krisis maka FDI akan turun sebesar -2.070 persen

Nilai *Durbin-Watson statistic* yang didapat adalah 2.167292 atau lebih besar dari nol maka hipotesis bahwa tidak terdapat *co-integration* antara FDI dan

² Hasil uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM* memperlihatkan bahwa nilai *probability Obs*R-square* (0,121588) lebih besar dari 0,01

³ Hasil uji *White Heteroskedasticity* didapatkan memperlihatkan bahwa nilai *probability Obs*R-square* (0,920516) lebih besar dari 0,01

⁴ Lihat Ramanathan, Ramu 1989, *Introductory Econometrics : With Applications*. Fourth Edition. The Dryden Press. United States

variabel nilai ekspor, pertumbuhan ekonomi (GDP), nilai tukar rupiah terhadap US \$, nilai suku bunga domestik, dapat ditolak. Karena H_0 ditolak maka H_a di terima yaitu bahwa adanya co-integrasi antara variabel independen dan dependen.

5. Pembahasan Hasil Model Regresi *Co-Integration* Terpilih

Atas dasar analisa data sekunder yang dikumpulkan selanjutnya dapat ditunjukkan bagaimana proses pembentukan Investasi Asing langsung (FDI) di Indonesia khususnya di sector perkebunan pada periode kurun waktu 1980 sampai dengan 2007. Pada prinsipnya beberapa factor memberikan pengaruh pada FDI di Indonesia baik ekonomi maupun non ekonomi.

Penelitian ini hanya difokuskan pada faktor ekonomi saja yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan FDI di Indonesia. Hasilnya adalah bahwa Melalui hasil estimasi data dengan uji stasioneritas dan uji kointegrasi didapatkan ada 4 faktor yang secara signifikan memberikan pengaruh pada FDI. Ternyata 5 faktor tersebut yaitu Nilai ekspor, Nilai Tukar rupiah terhadap US \$, GDP , Tingkat suku bunga dalam negeri dan Krisis yang bersama-sama secara signifikan mempengaruhi perkembangan FDI di sector perkebunan di Indonesia.

Kondisi Investasi asing langsung di sector perkebunan dan factor-faktor penyebabnya dapat kita lihat pada Tabel 5. 6. tersebut di bawah ini.

Tabel 5.6. Rangkuman Hasil estimasi

No	Parameter Hasil Estimasi	
1.	LGDP	1. 946***
2.	DINR	- 0.039***
3.	LCINP	0.747*
4.	DKRISIS	-2.070*

• Signifikan 5% ** Signifikan 1% ***Signifikan 10%

Sumber: Hasil Estimasi Model

5.2.1. Produk Domestik Bruto (GDP) .

Produk Domestik Bruto menunjukkan besarnya output yang yang bisa dihasilkan dalam sebuah perekonomian. Besarnya produk domestik bruto ini dapat dijadikan indikator juga akan perkembangan FDI di sektor perkebunan. Dari hasil regresi diatas maka didapatkan jika ada kenaikan produk domestik bruto di Indonesia sebesar 1 % maka menaikkan jumlah FDI sebesar 1.946 %.

5.2.1.1.1. Tingkat Suku bunga dalam negeri

Suku bunga pinjaman untuk investasi sangat menentukan iklim investasi di Indonesia. Fluktuasi suku bunga domestik yang sangat dipengaruhi gejolak ekonomi dan non ekonomi domestik memang membawa dampak pada laju investasi domestik sehingga dengan kestabilan suku bunga luar negeri, suku bunga domestik secara signifikan berpengaruh terhadap investasi Asing. Investasi Asing langsung (FDI) juga tergantung pada investor dalam negeri (joint venture) sehingga ketika suku bunga domestik naik walaupun suku bunga luar negeri menurun maka akan menurunkan nilai investasi.

Dari hasil regresi tersebut diatas didapatkan jika terjadi kenaikan suku bunga domestik sebesar 1 % maka FDI akan terpengaruh menurun sebesar 0.039 % mengingat kecenderungan suku bunga domestik yang tinggi mengakibatkan investor memilih menabung (saving).

5.2.1.1.2. Tingkat Harga Dalam Negeri

Dari hasil regresi tersebut diatas didapatkan jika terjadi kenaikan harga sebesar 1 % maka FDI akan terpengaruh naik sebesar 0,747 %. Tingkat harga dalam negeri membawa dampak pada laju investasi domestik sehingga dengan adanya peningkatan harga dalam negeri secara signifikan berpengaruh terhadap investasi Asing. Keadaan ini disebabkan investor melihat bahwa harga yang naik berarti konsumsi hasil sektor perkebunan mengalami peningkatan permintaan akan hasil perkebunan.

5.2.1.1.3. Krisis

Pada saat Krisis melanda Indonesia membuat FDI menurun. Dari hasil regresi ditemukan bahwa jika terjadi krisis maka FDI akan menurun sebesar 2.070 % dimana merupakan pengaruh yang cukup besar dibandingkan dengan faktor ekonomi lainnya. Krisis membuat investor khawatir terhadap jaminan stabilitas ekonomi untuk melakukan investasi di Indonesia.

5.2.1.1.4. Evaluasi Statistik

Evaluasi statistik menunjukkan bahwa persamaan FDI yang digunakan memiliki nilai *R-squared*, *F-statistic* dan *t-statistic* yang baik. Nilai *R-squared* sebesar 0,81 menunjukkan bahwa 81 persen keragaman variabel FDI mampu dijelaskan oleh variabel bebas dalam model yaitu PDB, suku bunga dalam negeri, indeks harga konsumen dan krisis, sementara 19 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai *Prob(F-statistic)* sebesar 0,000028 menunjukkan bahwa secara bersama-sama semua variabel bebas dalam model signifikan mempengaruhi variabel FDI. Angka *Durbin-Watson-stat* sebesar 2.167292 menandakan bahwa model terbebas dari masalah outokorelasi mengingat data bersifat series. Artinya bahwa data yang ada setiap tahun independen, tidak dipengaruhi oleh keberadaan error tahun sebelumnya.

BAB 6.

KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Dari uraian tersebut dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama : Berdasarkan hasil literature review maka ada beberapa factor ekonomi yang mempegaruhi FDI di Indonesia yaitu : Nilai eksport, nilai tukar mata uang terhadap dollar amerika, Produk Domestik Bruto, Tingkat suku bunga domestic, tingkat suku bunga asing, dan Indeks harga konsumen. Selain keenam factor ekonomi maka ada factor non ekonomi yang juga mempengaruhi FDI yaitu , situasi politik, birokrasi pemerintah, iklim investasi, kebijakan investasi asing pemerintah.

Kedua: dari hasil pengolahan data, analisis penelitian berdasarkan atas data-data yang diperoleh dan analisa terhadap model yang dikembangkan mengenai faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi terhadap FDI pada sektor perkebunan di Indonesia maka disimpulkan:

1. Dari penelitan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada 4 faktor utama yang mempengaruhi FDI di sektor perkebunan di Indonesia yaitu : Gross Domestik Product (GDP) , Tingkat Suku Bunga Domestik (DINR) , tingkat harga konsumen (CINP) dan Krisis yang terjadi di Indonesia. Keempat faktor tersebut telah mempengaruhi jumlah investasi asing yang langsung (FDI) ke Indonesia di sektor perkebunan periode tahun 1980 smapai dengan tahun 2007.
2. Faktor Ekonomi Makro yang paling besar pengaruhnya terhadap FDI di sektor perkebunan di Indonesia periode tahun 1980 s/d 2007 adalah produk domestik bruto sedangkan faktor ekonomi makro yang paling kecil pengaruhnya terhadap FDI di sektor perkebunan di Indonesia periode tahun 1980 s/d 2007 adalah Suku bunga dalam negeri .
3. Pada saat Krisis maka jumlah FDI menurun.

6.2. Saran dan Rekomendasi

Kondisi besarnya investasi asing langsung di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa indikator, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), suku bunga domestik, harga konsumen dan krisis. PDB yang tinggi menandakan kondisi perekonomian suatu negara sedang bergairah. Pemerintah diharapkan membuat kebijakan moneter seperti mempertahankan suku bunga yang stabil dan rendah untuk menjaga atau memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia terutama kondisi di bidang perkebunan di Indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah di bidang moneter sebaiknya dibuat agar dapat mendorong serta memperbaiki kondisi makro di Indonesia terutama komponen GDP, nilai ekspor dan suku bunga dalam negeri agar dapat terjadi peningkatan investasi asing di sektor perkebunan yang dapat membantu laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia .



Lampiran 1**Unit root test Data Level “ADF test”**

Null Hypothesis: LFDI has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.999494	0.2853
Test critical values: 1% level	-3.699871	
5% level	-2.976263	
10% level	-2.627420	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LFDI)

Method: Least Squares

Date: 28/12/10 Time: 17:44

Sample (adjusted): 1981 2007

Included observations: 27 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LFDI(-1)	-0.275184	0.137627	-1.999494	0.0565
C	2.836370	1.344891	2.108996	0.0451
R-squared	0.137871	Mean dependent var		0.192868
Adjusted R-squared	0.103386	S.D. dependent var		1.353349
S.E. of regression	1.281482	Akaike info criterion		3.405099
Sum squared resid	41.05493	Schwarz criterion		3.501087
Log likelihood	-43.96884	F-statistic		3.997974
Durbin-Watson stat	2.404700	Prob(F-statistic)		0.056534

Lampiran 2

Unit root test Data Level “PP test”

Null Hypothesis: LFDI has a unit root

Exogenous: Constant

Bandwidth: 3 (Newey-West using Bartlett kernel)

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	-1.769947	0.3865
Test critical values:		
1% level	-3.699871	
5% level	-2.976263	
10% level	-2.627420	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)	1.520553
HAC corrected variance (Bartlett kernel)	1.100805

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(LFDI)

Method: Least Squares

Date: 28/12/10 Time: 17:49

Sample (adjusted): 1981 2007

Included observations: 27 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LFDI(-1)	-0.275184	0.137627	-1.999494	0.0565
C	2.836370	1.344891	2.108996	0.0451
R-squared	0.137871	Mean dependent var		0.192868
Adjusted R-squared	0.103386	S.D. dependent var		1.353349
S.E. of regression	1.281482	Akaike info criterion		3.405099
Sum squared resid	41.05493	Schwarz criterion		3.501087
Log likelihood	-43.96884	F-statistic		3.997974
Durbin-Watson stat	2.404700	Prob(F-statistic)		0.056534

Lanjutan

Null Hypothesis: LEXIF has a unit root
 Exogenous: Constant
 Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel)

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	1.149112	0.9969
Test critical values: 1% level	-3.699871	
5% level	-2.976263	
10% level	-2.627420	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)	0.026079
HAC corrected variance (Bartlett kernel)	0.030724

Phillips-Perron Test Equation
 Dependent Variable: D(LEXIF)
 Method: Least Squares
 Date: 28/12/10 Time: 17:50
 Sample (adjusted): 1981 2007
 Included observations: 27 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LEXIF(-1)	0.121959	0.084529	1.442814	0.1615
C	-0.898022	0.658945	-1.362817	0.1851
R-squared	0.076868	Mean dependent var		0.051571
Adjusted R-squared	0.039943	S.D. dependent var		0.171281
S.E. of regression	0.167826	Akaike info criterion		-0.660593
Sum squared resid	0.704138	Schwarz criterion		-0.564605
Log likelihood	10.91801	F-statistic		2.081713
Durbin-Watson stat	1.302457	Prob(F-statistic)		0.161486

Lanjutan

Null Hypothesis: LGDP has a unit root
 Exogenous: Constant
 Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel)

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	-4.369834	0.0023
Test critical values:		
1% level	-3.737853	
5% level	-2.991878	
10% level	-2.635542	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		
Residual variance (no correction)		0.189470
HAC corrected variance (Bartlett kernel)		0.211277

Phillips-Perron Test Equation
 Dependent Variable: D(LGDP)
 Method: Least Squares
 Date: 28/12/10 Time: 17:50
 Sample (adjusted): 1982 2007
 Included observations: 24 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LGDP(-1)	-0.537851	0.120735	-4.454808	0.0002
C	1.196740	0.281752	4.247492	0.0003
R-squared	0.474254	Mean dependent var		0.011627
Adjusted R-squared	0.450357	S.D. dependent var		0.613231
S.E. of regression	0.454637	Akaike info criterion		1.341019
Sum squared resid	4.547281	Schwarz criterion		1.439191
Log likelihood	-14.09223	F-statistic		19.84531
Durbin-Watson stat	1.790811	Prob(F-statistic)		0.000199

Lanjutan

Null Hypothesis: LERUS has a unit root
 Exogenous: Constant
 Bandwidth: 11 (Newey-West using Bartlett kernel)

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	-1.765043	0.3889
Test critical values:		
1% level	-3.699871	
5% level	-2.976263	
10% level	-2.627420	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		
Residual variance (no correction)		0.073611
HAC corrected variance (Bartlett kernel)		0.037962

Phillips-Perron Test Equation
 Dependent Variable: D(LERUS)
 Method: Least Squares
 Date: 28/12/10 Time: 17:50
 Sample (adjusted): 1981 2007
 Included observations: 27 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LERUS(-1)	-0.092708	0.057009	-1.626181	0.1165
C	0.849462	0.455405	1.865291	0.0739
R-squared	0.095660	Mean dependent var		0.114167
Adjusted R-squared	0.059486	S.D. dependent var		0.290736
S.E. of regression	0.281956	Akaike info criterion		0.377058
Sum squared resid	1.987484	Schwarz criterion		0.473046
Log likelihood	-3.090285	F-statistic		2.644464
Durbin-Watson stat	2.218604	Prob(F-statistic)		0.116452

Lanjutan

Null Hypothesis: DINR has a unit root
 Exogenous: Constant
 Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel)

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	-3.276861	0.0262
Test critical values:		
1% level	-3.699871	
5% level	-2.976263	
10% level	-2.627420	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)	89.19047
HAC corrected variance (Bartlett kernel)	87.50506

Phillips-Perron Test Equation
 Dependent Variable: D(DINR)
 Method: Least Squares
 Date: 28/12/10 Time: 17:44
 Sample (adjusted): 1981 2007
 Included observations: 27 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DINR(-1)	-0.609002	0.185041	-3.291176	0.0030
C	11.24736	3.933929	2.859065	0.0084
R-squared	0.302296	Mean dependent var		-0.109907
Adjusted R-squared	0.274388	S.D. dependent var		11.52176
S.E. of regression	9.814566	Akaike info criterion		7.476799
Sum squared resid	2408.143	Schwarz criterion		7.572787
Log likelihood	-98.93679	F-statistic		10.83184
Durbin-Watson stat	1.830497	Prob(F-statistic)		0.002969

Lanjutan

Null Hypothesis: FINR has a unit root
 Exogenous: Constant
 Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel)

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	-2.085617	0.2515
Test critical values:		
1% level	-3.699871	
5% level	-2.976263	
10% level	-2.627420	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)	2.511003
HAC corrected variance (Bartlett kernel)	1.136618

Phillips-Perron Test Equation
 Dependent Variable: D(FINR)
 Method: Least Squares
 Date: 28/12/10 Time: 17:44
 Sample (adjusted): 1981 2007
 Included observations: 27 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FINR(-1)	-0.183062	0.089695	-2.040945	0.0519
C	1.393486	0.908724	1.533454	0.1377
R-squared	0.142822	Mean dependent var		-0.344722
Adjusted R-squared	0.108534	S.D. dependent var		1.744148
S.E. of regression	1.646780	Akaike info criterion		3.906708
Sum squared resid	67.79708	Schwarz criterion		4.002695
Log likelihood	-50.74055	F-statistic		4.165457
Durbin-Watson stat	1.617706	Prob(F-statistic)		0.051948

Lanjutan

Null Hypothesis: LCINP has a unit root
 Exogenous: Constant
 Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel)

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	-2.518862	0.1237
Test critical values:		
1% level	-3.737853	
5% level	-2.991878	
10% level	-2.635542	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)	0.549216
HAC corrected variance (Bartlett kernel)	0.583708

Phillips-Perron Test Equation
 Dependent Variable: D(LCINP)
 Method: Least Squares
 Date: 28/12/10 Time: 17:52
 Sample (adjusted): 1982 2007
 Included observations: 24 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LCINP(-1)	-0.398078	0.160452	-2.480979	0.0212
C	0.451241	0.239416	1.884755	0.0727
R-squared	0.218618	Mean dependent var		0.004970
Adjusted R-squared	0.183101	S.D. dependent var		0.856410
S.E. of regression	0.774044	Akaike info criterion		2.405279
Sum squared resid	13.18117	Schwarz criterion		2.503451
Log likelihood	-26.86335	F-statistic		6.155256
Durbin-Watson stat	1.599296	Prob(F-statistic)		0.021230

Lampiran 3

Unit root test first difference “ADF test”

Null Hypothesis: D(LFDI) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-7.307239	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.711457	
5% level	-2.981038	
10% level	-2.629906	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LFDI,2)

Method: Least Squares

Date: 28/12/10 Time: 17:52

Sample (adjusted): 1982 2007

Included observations: 26 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LFDI(-1))	-1.384689	0.189496	-7.307239	0.0000
C	0.276905	0.258545	1.071014	0.2948
R-squared	0.689905	Mean dependent var		-0.025671
Adjusted R-squared	0.676985	S.D. dependent var		2.289645
S.E. of regression	1.301307	Akaike info criterion		3.438418
Sum squared resid	40.64157	Schwarz criterion		3.535195
Log likelihood	-42.69944	F-statistic		53.39574
Durbin-Watson stat	2.238923	Prob(F-statistic)		0.000000

Lampiran 4

Unit root test first difference “PP test”

Null Hypothesis: D(LFDI) has a unit root

Exogenous: Constant

Bandwidth: 16 (Newey-West using Bartlett kernel)

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	-17.32080	0.0001
Test critical values:		
1% level	-3.711457	
5% level	-2.981038	
10% level	-2.629906	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)	1.563137
HAC corrected variance (Bartlett kernel)	0.138171

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(LFDI,2)

Method: Least Squares

Date: 28/12/09 Time: 17:55

Sample (adjusted): 1982 2007

Included observations: 26 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LFDI(-1))	-1.384689	0.189496	-7.307239	0.0000
C	0.276905	0.258545	1.071014	0.2948
R-squared	0.689905	Mean dependent var		-0.025671
Adjusted R-squared	0.676985	S.D. dependent var		2.289645
S.E. of regression	1.301307	Akaike info criterion		3.438418
Sum squared resid	40.64157	Schwarz criterion		3.535195
Log likelihood	-42.69944	F-statistic		53.39574
Durbin-Watson stat	2.238923	Prob(F-statistic)		0.000000

Lanjutan

Null Hypothesis: D(LEXIF) has a unit root
 Exogenous: Constant
 Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel)

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	-3.584511	0.0134
Test critical values: 1% level	-3.711457	
5% level	-2.981038	
10% level	-2.629906	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)	0.019447
HAC corrected variance (Bartlett kernel)	0.015814

Phillips-Perron Test Equation
 Dependent Variable: D(LEXIF,2)
 Method: Least Squares
 Date: 28/12/10 Time: 17:56
 Sample (adjusted): 1982 2007
 Included observations: 26 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LEXIF(-1))	-0.671868	0.183538	-3.660650	0.0012
C	0.055682	0.029290	1.901085	0.0694
R-squared	0.358295	Mean dependent var		0.030431
Adjusted R-squared	0.331557	S.D. dependent var		0.177532
S.E. of regression	0.145147	Akaike info criterion		-0.948329
Sum squared resid	0.505627	Schwarz criterion		-0.851553
Log likelihood	14.32828	F-statistic		13.40036
Durbin-Watson stat	2.151467	Prob(F-statistic)		0.001236

Lanjutan

Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root
 Exogenous: Constant
 Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel)

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	-11.58647	0.0000
Test critical values: 1% level	-3.769597	
5% level	-3.004861	
10% level	-2.642242	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)	0.100840
HAC corrected variance (Bartlett kernel)	0.104568

Phillips-Perron Test Equation
 Dependent Variable: D(LGDP,2)
 Method: Least Squares
 Date: 28/12/10 Time: 17:56
 Sample (adjusted): 1983 2007
 Included observations: 22 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LGDP(-1))	-1.354076	0.115201	-11.75402	0.0000
C	-0.003778	0.071089	-0.053140	0.9581
R-squared	0.873543	Mean dependent var		-0.043773
Adjusted R-squared	0.867220	S.D. dependent var		0.914003
S.E. of regression	0.333053	Akaike info criterion		0.725477
Sum squared resid	2.218484	Schwarz criterion		0.824663
Log likelihood	-5.980246	F-statistic		138.1569
Durbin-Watson stat	1.590501	Prob(F-statistic)		0.000000

Lanjutan

Null Hypothesis: D(LERUS) has a unit root
 Exogenous: Constant
 Bandwidth: 7 (Newey-West using Bartlett kernel)

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	-6.510677	0.0000
Test critical values: 1% level	-3.711457	
5% level	-2.981038	
10% level	-2.629906	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)	0.075641
HAC corrected variance (Bartlett kernel)	0.042475

Phillips-Perron Test Equation
 Dependent Variable: D(LERUS,2)
 Method: Least Squares
 Date: 28/12/10 Time: 17:57
 Sample (adjusted): 1982 2007
 Included observations: 26 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LERUS(-1))	-1.147879	0.193326	-5.937542	0.0000
C	0.115303	0.060518	1.905276	0.0688
R-squared	0.594967	Mean dependent var		-0.018877
Adjusted R-squared	0.578090	S.D. dependent var		0.440707
S.E. of regression	0.286259	Akaike info criterion		0.409964
Sum squared resid	1.966661	Schwarz criterion		0.506741
Log likelihood	-3.329533	F-statistic		35.25440
Durbin-Watson stat	1.738668	Prob(F-statistic)		0.000004

Lanjutan

Null Hypothesis: D(DINR) has a unit root
 Exogenous: Constant
 Bandwidth: 16 (Newey-West using Bartlett kernel)

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	-10.11055	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.711457	
5% level	-2.981038	
10% level	-2.629906	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)	128.7180
HAC corrected variance (Bartlett kernel)	16.23140

Phillips-Perron Test Equation
 Dependent Variable: D(DINR,2)
 Method: Least Squares
 Date: 28/12/10 Time: 17:44
 Sample (adjusted): 1982 2007
 Included observations: 26 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(DINR(-1))	-1.163490	0.201108	-5.785409	0.0000
C	-0.250507	2.315881	-0.108169	0.9148
R-squared	0.582398	Mean dependent var		-0.207212
Adjusted R-squared	0.564998	S.D. dependent var		17.90420
S.E. of regression	11.80866	Akaike info criterion		7.849347
Sum squared resid	3346.668	Schwarz criterion		7.946124
Log likelihood	-100.0415	F-statistic		33.47096
Durbin-Watson stat	2.122573	Prob(F-statistic)		0.000006

Lanjutan

Null Hypothesis: D(FINR) has a unit root
 Exogenous: Constant
 Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel)

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	-4.866682	0.0006
Test critical values:		
1% level	-3.711457	
5% level	-2.981038	
10% level	-2.629906	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)	2.565421
HAC corrected variance (Bartlett kernel)	3.172197

Phillips-Perron Test Equation
 Dependent Variable: D(FINR,2)
 Method: Least Squares
 Date: 28/12/10 Time: 17:44
 Sample (adjusted): 1982 2007
 Included observations: 26 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(FINR(-1))	-0.911502	0.187655	-4.857341	0.0001
C	-0.445103	0.332727	-1.337743	0.1935
R-squared	0.495732	Mean dependent var		-0.145096
Adjusted R-squared	0.474721	S.D. dependent var		2.300199
S.E. of regression	1.667095	Akaike info criterion		3.933846
Sum squared resid	66.70094	Schwarz criterion		4.030622
Log likelihood	-49.13999	F-statistic		23.59376
Durbin-Watson stat	1.291306	Prob(F-statistic)		0.000060

Lanjutan

Null Hypothesis: D(LCINP) has a unit root
 Exogenous: Constant
 Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel)

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	-6.687411	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.769597	
5% level	-3.004861	
10% level	-2.642242	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		
Residual variance (no correction)		0.446924
HAC corrected variance (Bartlett kernel)		0.496319

Phillips-Perron Test Equation
 Dependent Variable: D(LCINP,2)
 Method: Least Squares
 Date: 28/12/10 Time: 17:58
 Sample (adjusted): 1983 2007
 Included observations: 22 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LCINP(-1))	-1.176463	0.171793	-6.848147	0.0000
C	-0.092321	0.149551	-0.617321	0.5440
R-squared	0.701033	Mean dependent var		-0.122463
Adjusted R-squared	0.686085	S.D. dependent var		1.251432
S.E. of regression	0.701154	Akaike info criterion		2.214328
Sum squared resid	9.832326	Schwarz criterion		2.313514
Log likelihood	-22.35761	F-statistic		46.89712
Durbin-Watson stat	1.789153	Prob(F-statistic)		0.000001

Lampiran 5

Uji Kointegrasi Dickey-Fuller (ADF) dari Engle and Granger (1987) Persamaan Model Regresi faktor-faktor penentu FDI

Dependent Variable: LFDI

Method: Least Squares

Date: 01/12/11 Time: 11:17

Sample (adjusted): 1981 2007

Included observations: 26 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-65.67105	29.89489	-2.196731	0.0414
LEXIF	0.260670	1.053041	0.247540	0.8073
LGDP_2000	1.946255	1.088186	1.788531	0.0905
LERUS	1.134828	0.891808	1.272503	0.2194
DINR	-0.038657	0.019840	-1.948448	0.0671
FINR	0.086306	0.128394	0.672196	0.5100
LCINP	0.746576	0.296555	2.517495	0.0215
DKRISIS	-2.070160	1.124533	-1.840905	0.0430
R-squared	0.805442	Mean dependent var		9.745831
Adjusted R-squared	0.729780	S.D. dependent var		1.839639
S.E. of regression	0.956293	Akaike info criterion		2.996155
Sum squared resid	16.46093	Schwarz criterion		3.383261
Log likelihood	-30.95001	F-statistic		10.64534
Durbin-Watson stat	2.167292	Prob(F-statistic)		0.000028

Lampiran 6**Actual, fitted, residual**

obs	Actual	Fitted	Residual	Residual Plot
1981	7.28324	6.73440	0.54884	. * .
1982	7.47681	7.59721	-0.12040	. * .
1983	7.67034	7.54549	0.12484	. * .
1984	7.86384	8.32621	-0.46237	. * .
1985	8.05738	8.81617	-0.75879	* .
1986	8.25093	8.69996	-0.44903	. * .
1987	8.44445	8.56673	-0.12228	. * .
1988	8.63798	8.72580	-0.08782	. * .
1989	8.83151	7.78116	1.05035	. * .
1990	8.82560	8.58056	0.24504	. * .
1991	7.00087	9.02529	-2.02442	* .
1992	10.2326	9.72445	0.50818	. * .
1993	10.6452	10.1182	0.52701	. * .
1994	10.9364	10.9461	-0.00973	. * .
1995	11.7728	10.7422	1.03059	. * .
1997	7.76861	8.29041	-0.52179	. * .
1998	10.2613	10.0626	0.19874	. * .
1999	10.7204	10.0978	0.62259	. * .
2000	11.1359	10.3012	0.83471	. * .
2001	11.0677	10.8186	0.24916	. * .
2002	9.10008	10.6356	-1.53555	* .
2003	12.2976	11.3116	0.98600	. * .
2004	11.9889	11.9877	0.00128	. * .
2005	12.0527	12.3912	-0.33850	. * .
2006	12.7712	12.5243	0.24688	. * .
2007	12.2972	13.0407	-0.74352	. * .

Lampiran 7

Unit root test

Residual persamaan Model Regresi faktor-faktor penentu FDI

Null Hypothesis: D(EQ4_RES) has a unit root
 Exogenous: Constant, Linear Trend
 Lag Length: 5 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.648828	0.1110
Test critical values:		
1% level	-4.498307	
5% level	-3.658446	
10% level	-3.268973	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(EQ4_RES,2)
 Method: Least Squares
 Date: 01/04/11 Time: 07:01
 Sample (adjusted): 1988 2007
 Included observations: 20 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(EQ4_RES(-1))	-7.921712	1.780629	-4.448828	0.0008
D(EQ4_RES(-1),2)	5.659922	1.603403	3.529943	0.0041
D(EQ4_RES(-2),2)	3.991442	1.293574	3.085591	0.0094
D(EQ4_RES(-3),2)	2.584096	0.926080	2.790361	0.0163
D(EQ4_RES(-4),2)	1.211142	0.558054	2.170293	0.0508
D(EQ4_RES(-5),2)	0.439322	0.259607	1.692254	0.1164
C	1.206464	0.589803	2.045537	0.0634
@TREND(1980)	-0.067261	0.031941	-2.105743	0.0570
R-squared	0.918913	Mean dependent var		-0.018335
Adjusted R-squared	0.871613	S.D. dependent var		2.164107
S.E. of regression	0.775424	Akaike info criterion		2.618361
Sum squared resid	7.215389	Schwarz criterion		3.016654
Log likelihood	-18.18361	F-statistic		19.42716
Durbin-Watson stat	1.984014	Prob(F-statistic)		0.000012

Lampiran 11.
Data Tesis FDI di sektor Perkebunan 1980 s/d 2007

	realisasi (milyar US\$)	milyar US\$	triliun Rp.	\$/Rp.	%	%	indeks	
Thn	FDI	EXIF	GDP Nominal	ERUS	DINR	FINR	IHK2000	DKRISIS
1980	1.200	2.287	81.90	431.8	15.87	16.36	48.20	0
1981	1.456	1.570	104.82	736.6	19.26	19.38	48.20	0
1982	1.767	1.221	98.86	466.4	20.24	15.26	54.92	0
1983	2.144	1.373	111.24	994.3	16.17	12.09	60.68	0
1984	2.602	1.533	114.86	1,730.1	21.63	13.23	68.04	0
1985	3.157	1.388	122.84	1,314.8	13.34	11.10	69.64	0
1986	3.831	1.754	135.74	1,282.9	15.14	9.81	70.85	0
1987	4.649	1.666	155.11	1,649.6	17.52	9.66	72.05	0
1988	5.642	1.909	176.35	2,000.2	18.00	10.57	73.57	0
1989	6.847	1.943	210.07	1,794.2	15.57	12.22	74.38	0
1990	6.806	2.083	245.70	1,901.0	17.37	11.10	74.68	0
1991	1.098	2.282	288.36	2,392.0	18.12	8.69	75.34	0
1992	27.796	2.212	322.60	2,062.0	15.14	6.69	76.18	0
1993	41.990	2.644	369.62	2,110.0	11.84	6.15	77.51	0
1994	56.184	2.818	387.16	2,200.0	12.78	7.68	79.68	0
1995	129.673	2.889	411.33	2,308.0	16.67	8.87	81.14	0
1996	72.094	2.913	435.47	2,383.0	16.96	8.39	82.61	0
1997	2.365	3.133	456.76	4,650.0	29.97	8.61	82.43	1
1998	28.604	3.654	392.51	8,025.0	66.14	8.53	83.37	1
1999	45.272	2.902	342.36	7,100.0	26.62	8.39	96.32	1
2000	68.592	2.709	347.50	9,595.0	13.62	9.45	100.00	1
2001	64.071	2.439	376.96	10,400.0	17.89	6.46	104.49	1
2002	8.956	2.568	394.12	8,940.0	17.60	4.70	109.38	1
2003	219.177	3.209	420.25	8,465.0	12.81	4.13	116.38	1
2004	160.964	4.160	439.76	9,290.0	10.51	4.58	123.54	1
2005	171.558	4.772	484.13	9,830.0	11.89	6.51	136.71	1
2006	351.918	6.076	522.08	9,020.0	14.90	7.79	154.63	1
2007	219.080	9.203	531.90	9,419.0	12.90	7.05	167.67	1

Lampiran 12.**Data Tesis FDI di sektor Perkebunan 1980 s/d 2007 (Data Log)**

Thn	LFDI	LEXIF	LGDP	LERUS	DINR	FINR	LCINP= 2000	DKRISIS
1980	0.182	0.827	4.405	6.068	15.868	16.358	3.875	0
1981	0.376	0.451	4.652	6.602	19.255	19.380	3.875	0
1982	0.569	0.200	4.594	6.145	20.240	15.260	4.006	0
1983	0.763	0.317	4.712	6.902	16.165	12.085	4.106	0
1984	0.956	0.427	4.744	7.456	21.628	13.228	4.220	0
1985	1.150	0.328	4.811	7.181	13.335	11.100	4.243	0
1986	1.343	0.562	4.911	7.157	15.143	9.808	4.261	0
1987	1.537	0.510	5.044	7.408	17.515	9.658	4.277	0
1988	1.730	0.647	5.172	7.601	17.998	10.568	4.298	0
1989	1.924	0.664	5.347	7.492	15.568	12.215	4.309	0
1990	1.918	0.734	5.504	7.550	17.365	11.098	4.313	0
1991	0.093	0.825	5.664	7.780	18.123	8.688	4.322	0
1992	3.325	0.794	5.776	7.631	15.138	6.693	4.333	0
1993	3.737	0.972	5.912	7.654	11.840	6.145	4.350	0
1994	4.029	1.036	5.959	7.696	12.783	7.680	4.378	0
1995	4.865	1.061	6.019	7.744	16.665	8.870	4.396	0
1996	4.278	1.069	6.076	7.776	16.963	8.390	4.414	0
1997	0.861	1.142	6.124	8.445	29.973	8.613	4.412	1
1998	3.354	1.296	5.973	8.990	66.138	8.528	4.423	1
1999	3.813	1.065	5.836	8.868	26.615	8.393	4.568	1
2000	4.228	0.997	5.851	9.169	13.623	9.448	4.605	1
2001	4.160	0.891	5.932	9.250	17.890	6.460	4.649	1
2002	2.192	0.943	5.977	9.098	17.598	4.698	4.695	1
2003	5.390	1.166	6.041	9.044	12.810	4.128	4.757	1
2004	5.081	1.426	6.086	9.137	10.505	4.578	4.817	1
2005	5.145	1.563	6.182	9.193	11.885	6.508	4.918	1
2006	5.863	1.804	6.258	9.107	14.900	7.790	5.041	1
2007	5.389	2.220	6.276	9.150	12.900	7.050	5.122	1

Lampiran 13.

Data GDP Nominal Indonesia tahun 1980 - 2007

Thn Obs	triliun Rp.	indeks	triliun Rp.
	GDP Riil	IHK2000	GDP Nominal
1980	39.48	48.20	81.90
1981	50.53	48.20	104.82
1982	54.30	54.92	98.86
1983	67.50	60.68	111.24
1984	78.15	68.04	114.86
1985	85.55	69.64	122.84
1986	96.18	70.85	135.74
1987	111.75	72.05	155.11
1988	129.75	73.57	176.35
1989	156.25	74.38	210.07
1990	183.50	74.68	245.70
1991	217.25	75.34	288.36
1992	245.75	76.18	322.60
1993	286.50	77.51	369.62
1994	308.50	79.68	387.16
1995	333.75	81.14	411.33
1996	359.75	82.61	435.47
1997	376.50	82.43	456.76
1998	327.25	83.37	392.51
1999	329.75	96.32	342.36
2000	347.50	100.00	347.50
2001	360.75	104.49	376.96
2002	376.50	109.38	394.12
2003	395.00	116.38	420.25
2004	414.25	123.54	439.76
2005	437.50	136.71	484.13
2006	461.57	154.63	522.08
2007	490.54	167.67	531.90

Lampiran 8

Uji Autokorelasi

Persamaan Model Regresi faktor-faktor penentu FDI

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.424842	Prob. F(2,16)	0.269481
Obs*R-squared	3.930664	Prob. Chi-Square(2)	0.140109

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/12/11 Time: 12:32

Sample: 1981 2007

Included observations: 26

Presample and interior missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.124263	29.24366	-0.038445	0.9698
LEXIF	-0.158395	1.033535	-0.153256	0.8801
LGDP	-0.054248	1.065375	-0.050919	0.9600
LERUS	0.448854	0.909645	0.493438	0.6284
DINR	-0.006742	0.020598	-0.327297	0.7477
FINR	0.087641	0.135154	0.648449	0.5259
LCINP	-0.128833	0.299108	-0.430723	0.6724
DKRISIS	-0.012002	1.262112	-0.009509	0.9925
RESID(-1)	-0.300718	0.276394	-1.088005	0.2927
RESID(-2)	-0.447491	0.269696	-1.659242	0.1165

R-squared	0.151179	Mean dependent var	-2.08E-15
Adjusted R-squared	-0.326282	S.D. dependent var	0.811441
S.E. of regression	0.934491	Akaike info criterion	2.986094
Sum squared resid	13.97238	Schwarz criterion	3.469977
Log likelihood	-28.81922	F-statistic	0.316631
Durbin-Watson stat	1.917404	Prob(F-statistic)	0.957563

Lampiran 9

Uji Heteroskedastisitas Persamaan Model Regresi faktor-faktor penentu FDI

White Heteroskedasticity Test:				
F-statistic	0.400436	Prob. F(13,12)	0.942419	
Obs*R-squared	7.866436	Prob. Chi-Square(13)	0.852191	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 01/12/11 Time: 12:32				
Sample: 1981 2007				
Included observations: 26				
Collinear test regressors dropped from specification				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3890.124	4233.856	0.918813	0.3763
LEXIF	14.17942	50.48632	0.280857	0.7836
LEXIF^2	-0.853974	2.974020	-0.287145	0.7789
LGDP	-237.1382	261.6801	-0.906214	0.3827
LGDP^2	3.592575	3.973273	0.904185	0.3837
LERUS	-11.22551	17.42278	-0.644301	0.5315
LERUS^2	0.893050	1.148109	0.777844	0.4517
DINR	0.460298	0.261978	1.757007	0.1044
DINR^2	-0.005076	0.003125	-1.624098	0.1303
FINR	-0.882193	0.706159	-1.249284	0.2354
FINR^2	0.013831	0.031001	0.446149	0.6634
LCINP	-2.408173	1.735603	-1.387514	0.1905
LCINP^2	0.573782	0.527298	1.088156	0.2979
DKRISIS	-6.727838	4.777033	-1.408372	0.1844
R-squared	0.302555	Mean dependent var	0.633113	
Adjusted R-squared	-0.453010	S.D. dependent var	1.345447	
S.E. of regression	1.621813	Akaike info criterion	4.108700	
Sum squared resid	31.56334	Schwarz criterion	4.786137	
Log likelihood	-39.41310	F-statistic	0.400436	

Durbin-Watson stat	2.631796	Prob(F-statistic)	0.942419
--------------------	----------	-------------------	----------

Lampiran 10

Uji Multikolinieritas

Persamaan Model Regresi faktor-faktor penentu FDI

	LEXIF	LGDP	LERUS	DINR	FINR	LCINP
LEXIF	1	-0.497	0.800	-0.272	-0.637	0.302
LGDP	-0.497	1	-0.702	-0.230	0.522	-0.247
LERUS	0.800	-0.702	1	-0.154	-0.768	0.190
DINR	-0.272	-0.230	-0.154	1	0.347	-0.166
FINR	-0.637	0.522	-0.768	0.347	1	-0.025
LCINP	0.302	-0.247	0.190	-0.166	-0.025	1